Nalar Islam Kebangsaan
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Mohammad Dahlan & Asiyah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
Center of Excellence
BENGKULU

NALAR ISLAM KEBANGSAAN LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Oleh:
Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
Asiyah, M.Pd.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2018

IAIN BENGKULU PRESS

"Nalar Islam Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin"

Copyright©2019 © Dr. Moh. Dahlan, M.Ag & Asiyah, M.Pd.
Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Bengkulu, April 2019

Oleh :
Penerbit Vanda
"Menebarkan Ilmu dan Kebaikan"
Anggota IKAPI No. 001/Bengkulu/2015
Jl. Mayjen Sutoyo No. 43 Tanah Patah – Bengkulu
Telp. (0736) 346508 / HP. 081314690831
e-mail : Rumahcetakvanda@gmail.com

Editorial :
Siti Masulah, M.Pd.I

Editor Penerbit :
Oki Alek S., S.H.
Desain Cover dan Isi :
Ganda Saputra, S.Sos

Pencetak :
Rumah Cetak Vanda

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
izin tertulis dari Penerbit.

viii hlm. 221; 15 cm x 21 cm
ISBN : 978-602-6784-82-7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
UCAPAN TERIMA KASIH.....vi
KATA PENGANTAR.....vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B.Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan 15
C. Metode Pembahasan.....16
D. Sistematika Pembahasan.....19

BAB II: BIOGRAFI INTELEKTUAL DAN KIPRAH LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

A. Biografi Intelektual Lukman Hakim Saifuddin.....20
B.Paradigma Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin.....26
C.Kiprah Lukman Hakim Saifuddin Sebagai Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Agama dan Menteri Agama.....37

D. Wacana Tekstualisme dan Empirisisme Keislaman dan Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin: Antara Gusdurian dan Nurcholisian.....51
E. Respons Berbagai Kalangan terhadap Pemikiran dan Kiprah Lukman Hakim Saifuddin 57

BAB III :PARADIGMA IJTIHAD ISLAM KEBANGSAAN LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

A. Prinsip Ijtihad Kebangsaan.....63
B. Paradigma Ijtihad Tawazun.....73
C. Problem Ijtihad Tawasuth.....87
D. Paradigma Ijtihad Tasam.....105

BAB IV :PARADIGMA ISLAM KEBANGSAAN LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

A. Paradigma Relasi Agama dan Negara....117
B. Paradigma Kedaultan Bangsa.....122

1.Paradigma Konsensus Dasar Bernegara 123
2.Paradigma Birokrasi-Religius.....129
C. Paradigma Kepribadian Bangsa.....145
1. Paradigma Pemberdayaan Bangsa 146
2. Paradigma Kerukunan Bangsa.....152
D. Paradigma Kemandirian Bangsa.....173
1. Paradigma Pendidikan bangsa.....173
2. Paradigma Spirit dan Etos Kerja Bangsa.....184

BAB VII : PENUTUP

A. Kesimpulan.....191
B. Saran.....194

DAFTAR PUSTAKA.....195

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, saya patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya, sehingga kajian dan penelitian ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai rencana. Oleh sebab itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan masukan dalam proses penelitian ini, di antaranya:

1. Menteri Agama RI yang telah memberikan wawasan keilmuan dan kebijakan dalam berbagai forum kegiatan Kementerian Agama RI.
2. Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui berbagai forum kegiatan yang telah memberikan dukungan dan wawasan mengenai arah kebijakan program Kementerian Agama RI terutama wawasan keilmuan, pendidikan dan keagamaan.
3. Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan dukungan anggaran dan kebijakan dalam proses penelitian ini.
4. Sekretaris Menteri Agama RI yang telah memberikan dukungan spirit, *sharing* pemikiran dan data-data penelitian ini.
5. Para tim penilai penelitian dan para dosen IAIN Bengkulu yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pemikiran dan kritikan atas kegiatan penulisan penelitian.

6. Para informan dalam penelitian ini yang telah memberikan tanggapan dan sudung pandang pemikirannya terhadap Bapak Lukman Hakim Saifuddin.
7. Istri dan anak-anak yang telah memberikan pengertian atas waktunya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala dukungan dan bantuannya. Amin.

Bengkulu, April 2019
Tim Penulis,

Moh Dahlan & Asiyah

KATA PENGANTAR

Islam sebagai prinsip hidup beragama mayoritas bangsa Indonesia telah memberikan sumbangan besar dalam pembangun nasional, sedangkan kebangsaan sebagai komitmen bersama senasib dan seperjuang menjadi jangkar dalam mengisi dan memajukan hidup berbangsa di dalam wadah NKRI.

Hadirnya buku ini memberikan narasi Islam kebangsaan tersebut yang dapat mendukung dan memajukan hidup umat Islam pada khususnya dan relasi antar umat beragama, sehingga peran dan fungsi agama dapat berjalan dan berkembang secara otentik dan membumi melalui tradisi ijtihad Islam kebangsaan. Melalui paradigma ijtihad Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin yang berlandaskan pada prinsip *tawazun*, *tasamuh*, dan *tawasuth* diharapkan dapat terwujud penerapan paradigma Islam *rahmatan lil alamin* dalam kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk dalam segala seginya.

Dalam tataran empiris, orientrasi budaya kerja Kementerian Agama RI kemudian juga diubah oleh Lukman Hakim Saifuddin dari budaya birokrasi elitis menjadi birokrasi yang melayani, sehingga berbagai tugas dan kebijakan Kementerian Agama RI dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan empiris masyarakat Indonesia, misalnya hubungan antara agama semakin membaik dan kondusif, mutu pendidikan Islam juga semakin meningkat, pemahaman keislaman/fiqih umat Islam semakin inklusif dan akomodatif, kemandirian hidup umat beragama semakin baik, dan layanan keagamaan pada umumnya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dengan meminjam paradigma kebangsaan Trisakti Bung Karno, maka paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin pada dasarnya berorientasi pada Trisakti-Religius sebagai pengembangan dari paradigma Trisakti-Sekuler ala Bung Karno.

Akhirnya, saya selaku Rektor IAIN Bengkulu menyambut baik hadirnya karya saudara Moh Dahlan dan Asiyah. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan umat dan bangsa Indonesia.

Bengkulu, Maret 2019
Rektor IAIN Bengkulu,

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Diskusi hubungan antara agama dan negara sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 hingga kini tetap menjadi isu aktual. Apalagi jika dihubungkan dengan masalah kemajemukan[1] dan hubungan antara umat beragama di Indonesia yang juga hingga kini tetap menjadi isu yang aktual untuk dibahas,[2] misalnya adanya sejumlah konflik yang bernuansa agama di sejumlah daerah yang pernah terjadi pada masa pasca pemerintahan Soekarno[3] dan juga yang terjadi pada pasca reformasi.

Pasca reformasi, pemerintah pada umumnya menahan diri dalam menyelesaikan berbagai konflik, dalam artian aparat tidak menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan senjata, dalam menyelesaikan konflik agama di masyarakat. Dalam konteks ini, argumentasi yang digunakan adalah karena adanya pelanggaran HAM yang menghantui, sehingga dikedepankan pendekatan

---

[1] Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa kita harus bangga dengan persatuan dalam kemajemukan yang luar biasa besar dari berbagai sudutnya, kemajemukan beragama, ada lebih dari 245 aliran kepercayaan, tidak kurang dari 750 bahasa daerah, hampir 1.128 etnis/suku bangsa, dan sekitar 17.508 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Rote.Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI Pada Studium Generale "*Temu Kebangsaan Orang Muda: Orang Muda dan Indonesia 2035*" Bogor, 9 April 2016.

[2] Ahmad Ali Nurdin, "Revisiting discourse on Islam and state relation in Indonesia: the view of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Volume 6, Nomor 1 (2016), hlm. 63-64.

[3] Dalam masalah konflik bernuansa agama, Menteri Agama RI, KH Moh Dachlan membentuk forum kerukunan umat beragama. Forum kerukunan umat beragama itu kemudian dilanjutkan dan dioptimalkan pada era A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama, sehingga kerukunan umat beragama menjadi salah satu pilar kehidupan umat beragama dalam prinsip pembangunan nasional di Indonesia.Azyumardi Azra, "Kerukunan dan dialog Islam-Kristen di Indonesia; Kajian Historis-Sosiologis", dalam Mursyid Ali, (ed.), *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-agama*, (Jakarta: Balitbang Agama, 1999-2000), hlm. 19; Taufik Abdullah, "Menteri Agama Republik Indonesia: Suatu Pengantar Profil Biografis", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI,* (Jakarta: INIS, PPIM, Balitbang Depag RI, 1998), hlm. xxxv-xxxviii.

persuasif. Oleh sebab itu, peran negara menjadi kurang optimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang terjadi di masyarakat. Untuk mengisi kekuarangan itu, para tokoh agama, dan adanya norma kepatuhan pengikut kepada mereka, berperan penting dalam menangani konflik keagamaan, lebih-lebih ketika ketokohan dan kepemiminan tersebut bersifat positif dalam arti pro-perdamaian dan saling perngertian antarumat beragama. Hasil penelitian Samsu Rizal Panggabeandkk, yang berjudul *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*, mengemukakan:[4]

> Para pemimpin agama, misalnya, menasehati pengikut mereka supaya tidak terprovokasi dan terlibat kekerasan keagamaan. Mereka juga menegur, memarahi, atau menyediakan sanksi internal bagi pengikut mereka yang melanggar dan tidak patuh. Mekanisme semacam ini disebut dengan "pemolisian internal" atau "pemolisian di dalam kelompok" (Fearon & Laitin 1996), yang menyebabkan warga atau pengikut di dalam kelompok tersebut tidak terlibat konflik dengan warga dari kelompok lain – dalam hal ini kelompok keagamaan. Jika kelompok dan komunitas keagamaan menerapkan internal policing atau in-group policing, kekerasan dapat dihindari dan kerjasama antaragama dapat berlangsung. Pemerintah dan polisi sering memanfaatkan kekuatan dan peran tokoh-tokoh agama dalam rangka menangani konflik sosial keagamaan. Pemerintah daerah dan polisi melibatkan tokoh agama ketika menanganai dan menanggulangi konflik keagamaan. Kadangkadang, polisi dan pemerintah daerah seperti gubernur secara resmi membentuk "polisi kehormatan" yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang dapat bertemu dengan

[4]Samsu Rizal Panggabeandkk, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*, (Yogyakarta: Program Studi Agama danLintasBudaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies, SekolahPascasarjana, UniversitasGadjahMada, 2014), hlm. 7-8.

polisi dan pemerintah supaya kekerasan dapat dihindari atau diatasi. Polisi kehormatan ini berfungsi, misalnya, di Bali sejak peristiwa Bom Bali, dan sekarang anggota polisi kehormatan ini sudah lebih dari seratus tokoh.[5]

Dalam kerangka tersebut, Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama mengambil peran penting dalam upaya melakukan penguatan peran dan fungsi tokoh agama yang mana di era reformasi ini, para tokoh agama seharusnya diberi posisi lebih optimal dalam mengambil peran untuk menciptakan suasana kerukunan dan kerjasaman antara umat beragama.[6]

Melalui Acara *Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama Dalam Pembangunan Nasional, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017,* Lukman Haki Saifuddin menegaskan bahwa rakor itu bertujuan untuk melakukan diskusi dan meneguhkkan langkah-langkah penguatan fungsi agama dalam rangka pembangunan nasional, terutama melalui program pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat baik melalui jalur pendidikan,

[5]Samsu Rizal Panggabeandkk, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi,* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 7-8.

[6]Regulasi penanganan konflik secara normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut: "Pasal 7 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan Konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat. (2) Penyelesaianperselisihansecaradamaisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tokoh agama; b. tokoh adat; dan/atau c. unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adatdan/atau pranata sosialnya. (4) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658.

majlis taklim, penyelenggaraan haji-umrah, sistem birokrasi yang melayani, dan lainnya.[7]

Sebagaimana telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, Lukman Haki Saifuddin menyatakan bahwa Kementerian Agamasangat *concern* dalam usaha meningkatkan kualitas program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kementerian Agama tengah berada di jalur dan waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara menyelenggarakan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengajak dan bekerjasama dengan para tokoh agama dalam upaya menggali dan mengembangkan ide-ide inovatif dalam penguatan fungsi agama di masyarakat.[8]

Apa yang dilakukan Lukman Hakim Saifuddin dalam mendiskusikan peran agama dengan para tokoh agama tersebut memiliki kedekatan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, yakni untuk mengatasi persoalan jika para tokoh agama juga terlibat dalam konflik, mendukung konflik, atau berpartisipasi dalam kekerasan. Ada sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki persoalan sama dalam persoalan konflik, sehingga sulit diatasi karena para pemuka agama juga berperan/terlibat dalam persoalan konflik itu.[9]

> Kekerasan komunal yang terjadi di Maluku, Maluku Tengah, dan Poso, Sulawesi Tengah, tidak hanya melibatkan massa dari komunitas Muslim dan Kristen, tetapi pemimpin-

---

[7]Lukman hakim saifuddin,*Sambutan MenteriAgama RI Pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama Dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat IslamTahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017

[8]Lukman hakim saifuddin,*Sambutan MenteriAgama RI Pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama Dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat IslamTahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017

[9]Samsu Rizal Panggabean dkk, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*, (Yogyakarta: Program Studi Agama danLintasBudaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 7-8.

> pemimpin mereka juga. Dalam konflik sektarian seperti Sunni-Syiah di Sampang dan konflik anti-Ahmadiyah di beberapa tempat di Indonesia, tokoh-tokoh agama juga terlibat. Dalam hal ini, pengaruh tokoh agama menjadi bagian dari konflik dan kekerasan. Pemerintah dan polisi, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, harus berhadapan dengan tokoh agama dalam rangka menghentikan kekerasan dan memulai proses rekonsiliasi di kalangan pihak-pihak yang bertikai.[10]

Hasil penelitian Wasisto Raharjo Jati yang berjudul *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan* mengakui bahwa adanya konflik-konflik bernuansa agama itu terjadi karena adanya kesalahan dalam menafsirkan dan memahami teks-teks agama, sehingga pemahamannya menjadi ekslusif-parsial, bahkan ekstrim-radikal.[11] Demikian juga A Mukti Ali mengakui bahwa adanya konflik bernuansa agama itu yang pernah terjadi di Indonesia tidak lepas dari adanya pemikiran tokoh agama yang ekslusif.[12]

Secara sosial-historis, juga adanya budaya global yang mulai mengikis budaya luhur masyarakat Indonesia, seperti adanya pergeseran dari budaya gotong royong menjadi budaya transaksional di masa kini. Demikian juga wacana demokrasi di kalangan umta Islam juga mengalami pasang surut, terutama jika dihadapkan pada paham keagamaan transnasional yang menghendaki berdirinya khilafah yang tentu saja sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apalagi bila dikaitkan dengan proses demokratisasi d

---

[10]Samsu Rizal Panggabeandkk, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi,* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 7-8.

[11]Wasisto Raharjo Jati, *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*, Jurnal Walisongo, Volume 21, Nomor 2, November 2013, hlm. 394.

[12]A.Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia", dalam Zaini Muhtarom dkk.,(redaksi), *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan),* (Jakarta: INIS, 1990), hlm.3.

Indonesia, maka peran umat Islam yang sangat besar dalam pergualatan pembentukan ideologi negara, juga sebanding sengitnya perdebatan dengan kaum nasionalis sekuler. Walaupun tentu saja perdebatan itu masih berjalan dalam koridor yang santun dan ramah, misalnya antara Soekarno dan Mohammad Natsir.[13]Dengan meminjam pemikiran KH MA Sahal Mahfudh, maka dalam menjawab masalah tersebut, umat Islam perlu merumuskan paradigma ijtihad yang mampu membangun dialektika antara rasionalisme dengan normatifisme supaya umat Islam tidak terobang-ambing dalam tarikan fundamentalisme dan sekularisme, yang mana kedua-duanya tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.[14]

Dalam kerangka ini, Lukman Hakim Saifuddin kemudian mengemukakan perlunya penguatan fungsi agama dalam pembangunan nasional yang merupakan amanat undang-undang. Ijtihad dibutuhkan untuk melakukan diseminasi pemikiran yang digali dari norma-norma agama untuk diterapkan dalam pembangunan nasional, sehingga kualitas layanan di bidang agama semakin maksimal dengan adanya wacana keagamaan yang moderat. Signifikansi pemahaman moderat ini penting untuk memastikan bahwa umat beragama dapat menjalankan peribadatannya dengan baik tanpa ada benturan antara satu aliran/paham dengan lainnya, antara satu agama dengan agama lainnya, sehingga umat beragama sama-sama bisa mengambil peran yang dominan dalam dalam pembangunan nasional.[15] Oleh sebab itu, Kementerian Agama kemudian perlu menjabarkan wacana

---

[13]Ahmad Ali Nurdin, "Revisiting discourse on Islam and state relation in Indonesia: the view of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Volume 6, Nomor 1 (2016), hlm. 63-92.

[14]KH M A Sahal Mahfudh*, Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi*,http://www.nu.or.id/post/read/50426/posisi-umat-islam-indonesia-dalam-era-demokratisasi, diakses 20 Juni 2016, lihat juga KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2004)

[15]Lukman hakim saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama Dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017.

keagamaan yang moderat itu diterapkan dalam tataran empiris baik secara kelembagaan maupun kemasyarakatan.

> Kementerian Agama telah menjabarkan peran fungsi agama dalam berbagai program pelayanan dan kemitraan yang hingga saat ini telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Pengelolaan zakat dan wakaf misalnya, hingga saat ini, terus mendapatkan perhatian serius Kementerian Agama melalui berbagai kebijakan penguatan, seperti regulasi dan bantuan operasional. Kemitraan merupakan keniscayaan dalam penguatan fungsi agama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi publik merupakan keniscayaan dalam kemitraan ini. Kita harus bersama-sama mengawal dan melaksanakan fungsi agama dalam kapasitasnya masing-masing. Kita jalin kerjasama antar lembaga, agar program-program bidang agama tepat sasaran dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional.[16]

Dalam tataran aplikatif, Lukman hendak mengubah paradigma berpikir dan bekerja umat beragama dari hanya sekadar berhenti di konsep, menjadi konsep yang seharusnya dilaksanakan. Oleh sebab itu, Lukman menegaskan bahwa "*Jadikan hasil pertemuan kali ini sebagai pedoman dan spirit dalam setiap pengambilan kebijakan. Mari kita ubah paradigma kita selama ini bahwa hasil-hasil kegiatan seperti ini hanya sekedar menjadi dokumentasi tahunan yang kurang memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas. Hasil-hasil Kegiatan kali ini, kita jadikan sebagai peneguhan kembali komitmen untuk memantapkan fungsi agama dalam pembangunan nasional, sekaligus menjadi pedoman,*

[16]Lukman hakim saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama Dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017.

koridor dan spirit kebijakan yang lebih berkualitas dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat".[17]

Dalam posisi ini, Lukman berbeda dengan Soekarno yang berpaham nasionalis-sekuler dan Mohammad Natsir yang berpaham integralistik antara Islam dan negara. Demikian juga Lukman berbeda dengan Nurcholish Madjid yang berperan sebagai jalan tengah, tetapi hanya bergerak dalam tataran konseptual sebagai karakternya.[18] Lukman menjadi jalan tengah yang berusaha mendiaklektikakan antara pemikiran Soekarno dan Mohammad Natsir, tetapi tidak hanya sekadar dalam tataran konseptual, tetapi juga berada dalam tataran praktis.

Dalam fokus kajian itu, Lukman berusaha menghidupkan kembali semangat kebangsaan (baca: *ukhuwah wathoniyah*)[19]berlandaskan pada nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia seperti *kejuangan, semangat, kebersamaan atau gotong royong, kepedulian atau solidaritas sosial, sopan santun, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, dan tanggung jawab*.[20]Budaya luhur tersebut dibutuhkan untuk membendung arus budaya global yang negatif, seperti budaya hedonistik, konsumtif, individual dan konsumeristikdari Barat. Di samping itu, juga membedung arus

---

[17]Lukman hakim saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama Dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017

[18]Ahmad Ali Nurdin, "Revisiting discourse on Islam and state relation in Indonesia: the view of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societie*s Volume 6, Nomor 1 (2016), hlm. 63-92.

[19]Indonesia adalah sebuah negara-bangsa yang majemuk dalam segala dimensinya, mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).Karena itu, bagaimana substansi pembelajaran pendidikan Islam mampu membangun keseimbangan antara pendidikan dimensi tauhid (*akidah*) dan *syari'ah-'ubudiyah* dengan pendidikan *mu'amalah*, sehingga urusan agama (*ad-diny lillah*) dan urusan kebangsaan (*al-wathon lil-jama'ah*) harus selalu berdialektika, tidak boleh dipisahkan antara satu dengan lainnya. Lukman Hakim Saifuddin, *Keynote Speech Menteri Agama RI pada Simposium Pendidikan IslamRevitalisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, 4 Mei 2017.

[20]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI dalam Acara Wisuda Sarjana Akademi Angkatan Udara,* Tahun 2017Yogyakarta, Senin, 10 Juli 2017

budaya gerakan keagamaan transnasional yang berideologi khilafah internasional.[21]

Dua budaya itu adalah budaya yang tidak kondusif dalam membangun masa depan Islam kebangsaan di Indonesia. budaya gerakan keagamaan trans-nasional (dari Timur Tengah) telah membawa gerakan radikalisme keagamaan, bahkan terorisme. Hasil penelitian As'ad Ali Said yang berjudul *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, menggambarkan bahwa jaringan al-Qaeda sebagai gerakan keagamaan radikal internasional telah membawa dampak negatif bagi Indonesia, misalnya tindakan pengeboman di bom Bali I, bom Marriot, bom kedutaan besar Australia, bom Bali II.[22]Belum kasus pelibatan simbol-simbol agama dalam proses Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.[23]Sementara itu, globalisasi dari Barat yang membawa budaya hedonisme, konsumerisme, dan individualisme juga membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia termasuk umat beragama.[24]

Dalam upaya membangun paradigma Islam kebangsaan itu, Lukman berusaha membangun paradigma Islam yang berlandaskan pada dialektika antara paradigma rasionalisme ala Muktazilah yang menerima rasio (*aql*) sebagai pijakan utama dalam mencari kebenaran dan normatifisme ala Asy'ariyah yang lebih memilih wahyu sebagai pijakan utama.[25]

---

[21]Pokok Pikiran Kebangsaan KH Sahal Mahfudh, http://www.nu.or.id/post/read/37877/pokok-pikiran-kebangsaan-kh-sahal-mahfudh, diakses 20 Juni 2016

[22]As'ad Ali Said, *Al-Qaeda: Tinjauan sosial-Politik, Ideologi dan SepakTerjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 258.

[23]Bandingkan dengan pemikiran Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti: Amanat Konstitusi untuk Menyejahterakan Rakyat*, (Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017), hlm. 21-24

[24]Bandingkan dengan pemikiran Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam; KajianTematis*, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi, (Bandung: Mizan 2002), hlm. 23-9.

[25]Paradigma ijtihad *naqliyah* bercorak tekstual, bahkan bisa berkembang menjadi ekstrim, sedangkan paradigmaij tihad*aqliyah* bercorak kontekstual, bahkan bisa berkembang liberal-sekuler. KH MA SahalMahfudh, *Aktualisasi-Nilai-Nilai-Aswaja,*http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja,

Demikian juga tokoh-tokoh agama Islam yang telah memberikan garis paradigma dialektis yang dalam bahasan ini berkarakter kebangsaan, misalnya seperti pemikiran Imam Ibn Hazm (994-1064) dalam karyanya yang berjudul *al-Fashl fi al-Milal*,dan Imam al-Syahrastani (1071-1153) dalam karyanya yang berjudul *al-Milal wa al-Nihal*.[26]Demikian juga Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya mengajarkan paradigma Islam kebangsaan, yakni Islam yang membawa rahmat dan memperkuat tali persaudaraan bagi sesama umat manusia dan bangsa.[27]

Jika menggunakan pemikiran A. Mukti Ali, paradigma Islam kebangsaan Lukman itu pada dasarnya dibangun dari proses ijtihad dialektis antara unsur doktrin dan sains, sehinga menjadi *sainstifik cum doktriner*.[28]Demikian juga jika menggunakan paradigma ijtihad Fazlur Rahmanberarti dibangun dialektika antara unsur ideal moral dengan legal spesifik, yakni menjadikan pesan wahyu yang universal yang dikenal ideal moral sebagai landasan dalam merumuskan pembaruan pemikiran Islam termasuk dalam menjawab isu-isu kebangsaan, sedangkan pesan legal spesifik ditafsirkan ulang untuk digali pesan ideal moralnya untuk dikompromikan dengan pesan wayu universal.[29]

---

diakses 20 Juni 2016; Oliver Leaman, *PengantarFilsafat Islam:KajianTematis*, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi, (Bandung: Mizan 2002), hlm. 23-9.

[26]Djaka Soetapa, "Ibn Hazmatau As-Syahrastani", dalam Zaini Muhtarom dkk.,(redaksi), *Ilmu Perbandingan Agama*....,hlm. 3-5.

[27]Q.S. al-Anbiya' [21]: 107.Joko Widodo, *Pengantar Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Mengenai Pendidikan Tinggi Islam Moderat di Indonesia*,http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9395&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[28]Paradigma ijtihad Islam KH Saifuddin Zuhri melalui lembaga IAIN yang bertujuan mewujudkan ulama-intelektual yang berjiwa nasionalis mendapat momentumnya pada era A Mukti Ali sebagai Menteri Agama RI A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 29; A. Mukti Ali, "Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia", dalam Muhamad Wahyuni Nafis dkk, (eds.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Syadzali*, (Jakarta: Paramadina,1995), hlm. 596; A. Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufik Abdullah dan M Rusli Karim (eds.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebdiuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm.41.

[29]Paradigma liberal-sekular tidak dapat diterima di Indonesia karena Indonesia adalah Negara yang berdasarkan ideologi Pancasila yang mana sila pertama menyatakan, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, sehingga Indonesia adalah

Paradigma ijtihad Islam kebangsaan ala Lukman Hakim Saifuddin inilah yang perlu dikembangkan di Indonesia, bukan paradigma ijtihad monolitik (*single entities*) ataupun sekularistik.[30]Paradigma ijtihad Islam kebangsaan ini berlandaskan pada kitab suci al-Qur'an dan Sunnah dengan selalu melakukan interpretasi produktif. Paradigma ijtihad Islam kebangsaan inilah yang dalam bahasa A Mukti Ali dikenal dengan paradigma ijtihad *sainstifik cum doktriner* atau *sainstifik cum suigeneris.*[31]

Secara filosofis, pemikiran Lukman Hakim Saifuddin mengenai paradigma Islam kebangsaan[32]dapat disampaikan dengan ciri khas,di antaranya *kejuangan, semangat, kebersamaan atau gotong royong, kepedulian atau solidaritas sosial, sopan santun,*

---

negara yang religius, bukan negara sekuler, tapi juga bekan negara agama yang menganut agama tertentu. A. Mukti. Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini,* (Jakarta, Rajawali Press, 1987), hlm. 279; Gufron A.Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam,*(Jakarta: Rajawali Pers, 1997); M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius", dalam M. Amin Abdullah dkk (eds.), *Antologi Studi Islam*, (Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm. 19.

[30]M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius", dalam M. Amin Abdullah dkk (eds.), *Antologi Studi Islam…*, hlm. 19; A. Mukti Ali, *Metodologi…,* hlm.47.

[31]A. Mukti Ali, *Metodologi…*, hlm. 49; Moh Dahlan, "Modernisasi Islam di Indonesia: Studi Atas Akar Pemikiran H A Mukti Ali", *Jurnal Hermeneia* PPs UIN Sunan Kalijaga, Vol 05 Tahun 2006; Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm.12.

[32]Menurut Lukman Hakim Saifuddin, bangsa yang beragama ini harus menampilkan wajah yang mencerahkan, yakni "Keberagamaan yang Mencerahkan dapat diartikan sebagai tampilan agama yang penuh kebajikan, berlimpah kebaikan, yang mengembuskan kesejukan, menebarkan kedamaian, menawarkan solusi, dan seterusnya sebagai wujud Rahmatan Lil Alamin. Agama yang mencerahkan sama artinya agama yang menghadirkan senyum karena terasa nikmat di dada dan elok di mata. Keberagamaan yang Mencerdaskan dapat dimaknai sebagai kewajiban umat beragama untuk cerdas memilikiilmu yang mendalam dan berwawasan luas, pintar memahami situasi, bijak dalam bertindak, cakap menjalan kanpekerjaan, tangkas mengatasi masalah, ringkas dalam menata kebaikan, dancergas dalam membantu orang lain dan menghindari keburukan. Keberagamaan yang Berkeadaban dapat dipahami sebagai kewajiban untuk konsisten dalam menjaga nilai masyarakat yang beradab dan consensus bangsa, komitmen memelihara kerukunan dan persaudaraan, kepedulian untuk menciptakan harmoni dan menghadirkan solusi". Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Pengkajian Ramadlan 1438h PP Muhammadiyah, Ciputat, Senin, 5 Juni 2017.

persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, dan tanggung jawab.[33]Dalam paradigma Islam *Rahmatan lil 'Alamin*dapat dinyatakan bahwa Islam kebangsaan adalah "paham Islam yang ramah –bukan Islam yang marah–, Islam yang mengusung prinsip *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (seimbang)".[34]Ciri khas tersebut juga disinggung oleh Lukman Hakim Saifuddin pada acara peresmian dan diesnatalis ke-45 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada 6 April 2015 di Audit II Kampus III UIN Walisongo, yakni paradigma Islam yang harus dikembangkan sesuai dengan budaya ke-Indonesia-an dan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan sains, sehingga al-Qur'an dan Sunnah dapat dipahami dan diamalkan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia.[35]

Secara praktis, dengan menyitir pemikiran KH Wahab Chasbullah, pemikiran Lukman Hakim Saifuddin mengenai paradigma (ijtihad) Islam kebangsaan dapat dirumuskan menjadi empat hal, yakni *Pertama*, gerakan ekonomi kerakyatan, yakni bagaimana ekonomi bangsa Indonesia harus tumbuh lebih baik dengan usaha membangun kesejahteraan umum yang menjadi spirit ajaran Islam dan Pancasila sebagai ideologi NKRI.*Kedua*, gerakan

---

[33]Menurut Lukman Hakim Saifuddin, "Nilai-nilai tersebut penting untuk di internalisasikan karena belakangan cenderung semakin luntur dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat secara jelas misalnya, dalam berbagai kasus konflik sosial dan komunal yang terjadi di berbagai daerah dengan penyebab yang sepele, konflik horizontal antar etnik, konflik berbasis isu SARA bahkan konflik antar pelajar dan mahasiswa. Fenomena ini adalah cermin ketidakkukuhan nilai dan karakter kebangsaan di masyarakat. Seandainya kekukuhan nilai-nilai tersebut, senantiasa terwujud dalam kehidupan setiap manusia Indonesia, maka konflik itu tentu dapat diminimalisir, atau bahkan dinihilkan". Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI dalam Acara Wisuda Sarjana Akademi Angkatan Udara,* Tahun 2017 Yogyakarta, Senin, 10 Juli 2017

[34]Lukman Hakim Saifuddin, *Amanat Menteri Agama RI Sebagai Pembina Upacara Pada Acara Penutupan Perkemahan Jambore Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah*, Karanganyar, 26 Februari 2016.

[35]Lukman Hakim Saifuddin: UIN Walisongo Harus Mewarnai Islam Indonesia sebagai Islam Moderat, *http://justisia.com/2015/04/lukman-hakim-saifuddin-uin-walisongo-harus-mewarnai-islam-indonesia-sebagai-islam-moderat/, diakses 9 Agustus 2016; Menag: Gerakanradikalisme Islam ancamkeutuhan NKRI* http://indonesia.ucanews.com/2014/08/29/menag-gerakan-radikalisme-islam-ancam-keutuhan-nkri/diakses 9 Agustus 2016.

politik-religious, yakni bagaimana kita mampu membangun sistem dan gerakan politik yang berbasis pada nilai-nilai luhur ajaran agama (Islam). *Ketiga*, gerakan intelektualisme-spiritualis-praksis, yakni kita berusaha membongkar kejumudan berfikir yang menyelimuti sebagian besar bangsa Indonesia.*Keempat*, gerakan cinta tanah air, yakni bagaimana kita mampu memberikan kontribusi dan ajaran *hubbul wathan* (cinta tanah air) sebagaimana diajarkan KH Wahab Chasbullah yang melahirkan lagu legendaris *Hubbul Wathan*. Dengan lagu itu dapat membakar dan membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.[36]Inilah ciri khas Islam kebangsaan[37] yang hendak dikembangkan oleh Lukman Hakim Saifuddin di Indonesia,[38] yakni bagaimana mengangkat kembali dan melestarikan tradisi luhur masyarakat Islam Indonesia yang berkarakter damai, moderat, toleran, seimbang dan gotong royong.[39]

---

[36]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara Haul Ke-46 KH. Abdul Wahab Chasbullah*, Jombang,Jum'at, 4 Agustus 2017.

[37]Penggeloraan spirit kebangsaan dibutuhkan untuk membendung arus radikalisme dan sekaligus mengantisipasi potensi konflik. Sebab, bangsa ini sangat rentan terhadap konflik keagamaan, walaupun keanekaragaman telah terbukti menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Pada tahun 2015, konflik keagamaan masih terjadi di beberapa wilayah. Pada tahun 2016, persoalan seperti itu juga masih terjadi, terutama ketika hendak melakukan pesta-pesta politik. Dengan demikian, kita sebagai bangsa yang majemuk masih tetap dituntut untuk selalu responsif dalam menjawab isu-isu keagamaan, baik dalam hal hubungan kehidupan keagamaan, aliran atau paham keagamaan ataupun pelayanan keagamaan. Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI Pada StudiumGenerale "*TemuKebangsaan Orang Muda:Orang Mudadan Indonesia 2035*" Bogor, 9 April 2016.

[38]Jika kita merunut secara historis, Islam masuk ke wilayah Indonesia melalui tiga teori: *Pertama*, teori Gujarat menyatakan bahwa Islam memasuki wilayah Indonesia melalui jalur pedagang Gujarat dari India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 M.*Kedua*, teori Persia menyatakan bahwa Islam memasuki wilayah Indonesia melalui pedagang yang berasal dari Persia dimana mereka dalam perjalanannya bersinggah terlebih dahulu di Gujarat, setelah itu melanjautkan perjalanannya ke wilayah Nusantara pada sekitar abad ke-13 M.*Ketiga*, teori Makkah menyatakan bahwa Islam sudah sampai di wilayah Nusantara (Indonesia) yang mana hal itu disiarkan langsung oleh pedagang Muslim dari Timur Tengah pada sekitar abad ke-7 M. *Mempertanyakan Sejarah Masuknya Islam di Indonesia (1)*, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/07/21/m7ihrr-mempertanyakan-sejarah-masuknya-islam-di-indonesia-1.

[39]Ajaran agama Islam tersebar dengan masif tidak melalui cara-cara kekerasan atau kekuasaan, tetapi melalui cara-cara damai. T.W. Arnold, *The Preaching of Islam A History of the Propagation of the Muslim Faith,* Second

Berdasarkan hal tersebut, pemikiran Lukman mengenai paradigma Islam kebangsaannya pada dasarnya berusaha mencari titik temu dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa terutama masalah hubungan agama dan negara, hubungan antara agama, tetapi tidak boleh ada percampuan ideologi keagamaan, apalagi penyamaan terhadap semua keyakinan keagamaan bahwa semua agama sama di sisi Tuhan sebagaimana pandangan Nurcholish Madjid. Inilah titik perbedaan setidaknya dari tiga tokoh utama politisi dan intelektual Muslim di Indonesia, sehingga kajian ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan dari kajian Ahmad Ali Nurdin yang berjudul "Revisiting discourse on Islam and state relation in Indonesia: the view of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid", *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 6, Number 1, June 2016 dalam memposisikan paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin.[40]Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam membangun nilai-nilai Islam sebagai upaya membangun semangat kebangsaan dan memperkokoh NKRI.[41]

Di samping itu, signifikansi pemikiran Lukman Hakim Saifuddin mengenai paradigma Islam kebangsaannya dari segi ilmiah-praktis, ia sebagai Menteri Agama RI memiliki keunikan dan

---

Edition Revised And Enlarged, (London: Constable & Company Ltd, 1913), hlm. 161.

[40]Titik fokus kajian ini berangkat dari upaya melanjutkan dan sekaligus kritik terhadap kajian Ahmad Ali Nurdin tersebut. Fokus kajian tersebut juga sekaligus menjadi pembeda dari kajian Moh Dahlan dan Sirajuddin M yang berjudul *Paham Islam Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin*, artikel belum diterbitkan, 2017.

[41]Hasil penelitian Noah Feldman mengemukakan bahwa komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan ajaran hukum dan kemampuan ahli fikih dalam mengeluarkan hukum Islam yang aktual menjadi rahasia suksesnya negara Islam klasik (the secret of the success of the classical Islamic state). Sementara itu, jatuhnya negara Islam klasik teradi karena adanya ketidakseimbangan antara kekuasaan, menurunnya peran syariat dan peran pakar hukum syariat dalam melakukan ijtihad keislaman. Emin Poljarevic,"Exploring the Islamic State", Review Buku dari karya Noah Feldman, *The Fall and Rise of the Islamic state*, (Princeton, Princeton University Press, 2008), di Jurnal European Political Science: 7 2008, European Consortium for Political Research. 1680-4333/08 www.palgrave-journals.com/eps/, diakses 2 Desember 2018, hlm. 487.

mendapat respons yang cukup positif dari berbagai kalangan, yakni Pemikiran Lukman itu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam universal, sehingga pemikirannya dapat menjadi payung bagi kemajemukan hidup bangsa Indonesia sesuai dengan salah satu pilar kebangsaan, *Bhinneka Tunggal Ika*,[42] dan juga Lukman Hakim Saifuddin berada dalam gejolak pergulatan golongan Islam formal/radikal dengan golongan Islam moderat/golongan nasionalis-religius.Lebih lanjut, Lukman sebagai tokoh agama dan Menteri Agama mendapatkan respons dari berbagai kalangan, yakni *Pertama*, Bonaran Tigor Naipopos, Wakil Ketua Setara Institute, mengatakan bahwa Lukman Hakim Saifuddin mendapatk banyak pujian karena ia merupakan sosok Menteri yang siap meluangkan waktu untuk berdialog dengan pihak-pihak penganut agama minoritas. *Kedua*, Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, memberikan penilaian bahwa Lukman sebagai Menteri Agama merupakan sosok yang tepat. *Ketiga*, Elga Sarapung, Tokoh Dialog Antar Agama asal Yogyakarta, menyampaikan bahwa Lukman sebagai sosok Menteri Agama telah berhasil mengelola perbedaan yang ada di Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang beradab.[43]

B. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENULISAN

Relasi Islam dan kebangsaan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena Islam sebagai jati diri bangsa Indonesia dan kehidupan berbangsa sebagai wadah hidup bersama dalam satu wilayah geografis yang majemuk dari segala seginya. Adapun kajian terhadap paradigma Islam kebangsaan Lukman dapat digambarkan sebagaimana barikut: *Pertama*, bagaimana paradigma ijtihad Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin? *Kedua*,

[42]Ali Zawawi, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 25.

[43]Ali Zawawi, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 160-161, 170-171, dan 190-191.

bagaimana paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin di Indonesia?

Tujuan kajian terhadap pemikiran dan kebijakan keagamaan Lukman dapat digambarkan sebagaimana barikut: *Pertama*, untuk meneliti paradigma ijtihad Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin. *Kedua*, untuk meneliti paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin di Indonesia.

C. METODE PEMBAHASAN

1. Paradigma

Paradigma yang dimaksud di sini merujuk pada pemikiran filsafat Ilmu Thomas S. Kuhn yang membahas persoalan pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dalam ilmu pengetahuan,[44] sehingga paradigma itu digunakan untuk menelaah pergerseran paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin yang berusaha membangun dialektika antara nilai-nilai Islam universal dengan realitas empiris kebangsaan di di Indonesia.

Dalam aplikasinya, pendekatan filsafat ilmu Thomas S. Kuhn itu diperkuat dengan pendekatan hermenutika filosofis Martin Heidegger yang memiliki konsepsi bahwa "memahami teks/keadaanbukanlah menggali pengetahuan objektif, tetapi berusaha mendeskripsikan fenomena tentang *Dasein* dalam temporalitas dan historisitasnya, sehingga dalam hal ini, keadaan pergeseran paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin dapat dipahami, yaknibagaimana dialektika antara teks dan konteks bisa dipahami dalam paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin sebagai paradigma otentik -yang merujuk pada pemikiran Martin Heidegger berlandaskan pada *fore-structure of*

[44] Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), hlm. 84-88.

Understanding yang meliputi tiga aspek; *vorhabe* (*fore-having*), *Vorsicht* (*foresight*) dan *Vorgriff* (*fore-conception*).[45]

2. Tipologi Paradigma Ijtihad

Adapun paradigma ijtihad Islam dapat dibagi menjadi tiga tipologi:*Pertama*, paradigma ijtihad tekstual yang menafsirkan secara tekstual terhadap nas-nas sumber agama Islam, sehingga penafsirnya hanya sekadar mengartikan teks sumber agama Islam secara harfiah. *Kedua*, paradigma ijtihad konservatif yang berusaha memahami teks-teks sumber agama Islam dengan cara kembali pada wacana Islam di masa kejayaannya, sehingga penafsirnya selalu merasa tidak puas terhadap keadaan empiris-aktual yang dihadapi.*Ketiga*, paradigma ijtihad modern yang dapat menafsirkan kembali teks-teks sumber agama Islam sesuai dengan perkembangan aktual hidup umat manusia dan sekaligus mampu menerima metode-metode baru dalam memahami teks-teks sumber agama Islam.[46]

3. Kebangsaan

Adapun yang dimaksud dengan kebangsaan di sini adalah merujuk pada konsepsi Trisakti Bung Karno, yakni *Berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya*.[47]Dalam tataran praktisnya, bangsa Indonesia harus tetap berada dalam rel agama Tuhan dan cinta tanah air.[48] Namun demikian, agama tetap harus dipisahkan dari urusan negara karena

---

[45] Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics; Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge dan Kegan Paul, t.th.), hlm.2-5dan 101-105.

[46]Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan,1999),hlm. 178; James Norman Dalrymple Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: CV. Amrpress, 1991), hlm. 91-92.

[47]Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti: Amanat Konstitusi untuk Menyejahterakan Rakyat*, (Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017), hlm. 21 dan 23-24.

[48]Soekarno, "Agama Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan", Amanat pada Kongres Muhammadiyah Bandung, 24 Juli 1965, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm 349.

kalau agama berada dalam kendali negara, maka agama akan mudah disalahgunakan oleh kepentingan rezim otoriter untuk kendaraan politik praktis.[49] Dalam kerangka ini, penelitian ini hendak menegaskan bahwa *Pertama*, kerangka konsep kebangsaan Bung Karno itu akan diperkaya dengan pemikiran Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin, dan *Kedua*, penelitian hendak menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan bernegara tidak akan menyebabkan agama disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, tetapi justru agama dapat dikembangkan lebih optimal dengan sarana dan fasilitas dukungan dari negara.

4. Analisa Data

Secara teknis praktis, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sumber utama/primer adalah naskah pidato Lukman Hakim Saifuddin dan buku-buku terkait Lukman Hakim Saifuddin, sedangkan sumber sekunder dan pelengkapnya adalah data-data kajian keilmuan terkait dan wawancara dengan pihak-pihak terkait serta observasi lapangan.Adapun metode kajian ini menggunakan analisa deduktif untuk menjelaskan teori-teori keislaman dan kebangsaan serta bagaimana memposisikan paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin dari antara kajian-kajian sebelumnya dan dimana titik pijak kajian ini terhadap paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin. *Kedua*, metode induktif digunakan merangkai berbagai sumber dari bahan pustaka, wawancara, dan observasi lapangan untuk kemudian ditarik sisi umum pemikirannya yang terkait dengan pembahasan kajian ini. Selanjutnya, hasil penelitian ini kemudian dibahas dalam Focus Group Disscussion (FGD) dan Rapat Dalam Kantor.

[49]Ahmad Ali Nurdin, "Revisiting discourse on Islam and state relation in Indonesia: the view of Soekarno, Natsir and NurcholishMadjid", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Volume 6, Nomor 1 (2016), hlm. 69.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan meliputi Bab I pendahuluan yang berisi LatarBelakangMasalah, Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan, Metode Pembahasan, Paradigma Ijtihad, Metode Analisa Kajian, dan SistematikaPembahasan.

Bab II berisi Sejarah dan Biografi Intelektual Lukman Hakim Saifuddin yang meliputi pembahasan Sejarah Hidup dan Pendidikan Lukman Hakim Saifuddin, Kiprah Lukman Hakim Saifuddin Sebagai Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Agama dan Menteri Agama, dan respons Berbagai Kalangan terhadap Pemikiran dan Kiprah Lukman Hakim Saifuddin

Bab III menjelaskanParadigma Ijtihad Islam Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin yang meliputi pembahasan Paradigma Ijtihad Tawazun, Paradigma Ijtihad Tawasuth, dan Problem Ijtihad Tasamuh

Bab V menjelaskan Paradigma Ijtihad Islam Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin yang meliputi pembahasan Islam dan Pemberdayaan Umat, Islam dan Birokrasi Pemerintahan, Islam dan Kerukunan Beragama, Islam dan Konsensus Hidup Berbangsa, dan Islam dan Pesantren Multikultural

Bab VII merupakan penutup yang mengulas kesimpulan dan saran

BAB II
BIOGRAFI INTELEKTUAL
DAN KIPRAH LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

A. Biografi Intelektual Lukman Hakim Saifuddin

Lukman Hakim Saifuddin lahir di Jakarta 25 Nopember 1962. Ia adalah salah satu putra dari KH Saifuddin Zuhri, Menteri Agama RI Periode 1962-1967. Lukman Hakim Saifuddin, sapaan akrabnya Lukman adalah putra bungsu dari sepuluh bersaudara. Pendidikan dasar Lukman ditempu di Madrasah Ibtidaiyah Manaratul Ulum Jakarta, sedangkan pendidikan SMP dan SMA dijalani di Pondok Pesantren Modern Gontor.Adapun Perkuliahan Lukman di Universitas Islam As-Syafiiyah Jakarta.[50]

Lukman merupakan sosok yang tegas, santun dan visioner. Ia adalah sosok yang pantang menyerah dalam bekerja hingga tuntas, di samping itu ia adalah sosok yang toleran, peduli kepada sesama dan selalu bersilaturrahmi dengan menghadiri berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti acara tahlilan, doa, mendatangi guru dan tokoh agama. Ia menikah dengan Trisna Willy, Guru SMAI al-Azhar Jakarta dikarunia 3 anak, yakni Naufal Zilal Kamal, Zahira Humaira, dan Sabila Salsabila. Sebagai seorang ayah di rumah tanggah, ia tetap mampu memberikan perhatian dan rasa cintahnya kepada keluarganya. Hari minggu sedapat mungkin digunakan untuk keluarga dengan berdiskusi dan menanyakan perkembangan anak-anak serta keluahannya. Suasana santai Lukman itu juga terkadang digunakan dengan mengajak keluarga ke rumah makan.[51]

Lukman adalah sosok yang memiliki bakat dalam *leadership*. Hal itu terbukti dari sikap dan perilaku dia sejak kecila sudah bisa

---

[50]*Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Agama Peduli Kaum Minoritas,* Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tebuireng edisi 35/November-Desember 2014, dimuat kembali untuk kepentingan pendidikan. http://tebuireng.org/lukman-hakim-saifuddin-menteri-agama-peduli-kaum-minoritas/, diakses 9 Agustus 2016

[51]Khiarul Huda Basyir dkk, *Lukman Hakim Saifuddin, Memimpin Kementerian Agama Periode 2014-Desember 2015*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kemenag RI, 2016), hlm. 144-145.

menjadi penengah jika terjadi perselisihan di tengah-tengah saudaranya. Ibu Farida mencerikan bahwa Lukman kecil adalah anak yang memiliki bakat dan cerdas serta tangkas dalam mengambil keputusan dan mencari solusi bagi saudara-saudaranya yang kebetulan berselisih pandangan. Lukman kecil selalu mengatakan pada saudara-saudaranya untuk bisa mengalah salah satunya atau dirundingkan jika ada pertentangan atau persoalan.[52]

Bakat Lukman itu menjadi bekal ketika menempu pendidikan SMP dan SMA.Ia pernah ditawari untuk menempu pendidikan tinggi di luar negeri agar memiliki wawasan dan pengalaman yang luas, tetapi ia justru berpendapat lain. Ia memilih untuk menempu pendidikan tinggi di dalam negeri. Ia berkeyakinan bahwa mutu pendidikan tinggi dalam negeri memiliki kesamaan dengan mutu pendidikan tinggi luar negeri. Menurutnya, alumni pendidikan tinggi dalam negeri juga dapat memiliki tingkat kesuksesan dengan alumni pendidikan tinggi luar negeri, bahkan alumni pendidikan tinggi luar negeri tidak mesti lebih sukses dan berhasil daripada alumni pendidikan tinggi dalam negeri. Di samping itu, ia juga memiliki kesamaan cara berpikir, komitmen dan motivasi/etos kerja yang sama dengan ayahandanya, KH. Saifuddin Zuhri.[53]

Sikap dan perhatian Lukman yang sangat baik terhadap keluarga pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh ayahandanya, KH. Saifuddin Zuhri yang merupakan sosok ayah yang mempunyai perhatian tinggi terhadap keluarganya. KH. Saifuddin Zuhri tekun dan telaten mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai ketawadu'an, ketulusan dan tanggung jawab. Hal ini tentu saja menjadi nilai-nilai mulia yang kemudian melekat di kalangan anak-anaknya termasuk

---

[52]*Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Agama Peduli Kaum Minoritas,*Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tebuireng edisi 35/November-Desember 2014, dimuat kembali untuk kepentingan pendidikan.http://tebuireng.org/lukman-hakim-saifuddin-menteri-agama-peduli-kaum-minoritas/, diakses 9 Agustus 2016

[53]*Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Agama Peduli Kaum Minoritas,* Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tebuireng edisi 35/November-Desember 2014, dimuat kembali untuk kepentingan pendidikan.http://tebuireng.org/lukman-hakim-saifuddin-menteri-agama-peduli-kaum-minoritas/, diakses 9 Agustus 2016

Lukman. Walaupun KH. Saifuddin Zuhri merupakan tokoh nasional terkenal berani dan tegas, tetapi ia tetap bersikap tawadlu' dan ikhlas dalam berjuang terutama ketika akan dipilih sebagai Menteri Agama oleh Presiden RI Pertama, Ir H Soekarno. Walaupun KH. Saifuddin Zuhri[54] telah diminta untuk menjadi Menteri Agama, tetapi ia tidak menerimanya secara langsung. Ia tetap minta saran dan masukan terlebih dahulu pada sejumlah kiai, ulama dan tokoh nasional.

Menurut Ibu Farida, selain menempu pendidikan di sekolah formal, di keluarga KH Saifuddin Zuhri, seluruh anak-anak diharuskan untuk mengikuti pendidikan diniyah dengan pertimbangan bahwa ilmu agama itu pasti berguna bagi anak-anaknya. Bagi Lukman sebagai putra bungsunya, ia tidak pernah berpesan secara khusus, tetapi ia hanya berpesan kepada anak-anaknya termasuk pada Lukman untuk menjadi orang yang berguna.[55]

Dalm jabatan publik,Lukman memulai karirnya sejak terpilih menjadi Anggota DPR-RI Periode 2004-2009, 1999-2004, dan 1997 – 1999.Dalam organisasi sosial keagamaan, ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) tahun 1985–1988, Wakil Sekretaris Lajnah

[54]Sederet jabatan telah diembannya oleh KH. Saifuddin Zuhri, pada usia 35 tahun ia menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga merangkap sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Harian Duta Masyarakat dan anggota Parlemen Sementara, pada usia 39 tahun diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI, dan diangkat sebagai menjadi Menteri Agama pada usia 43 tahun. Lukman Hakim Saifuddin dkk, *Riwayat Hidup dan Perjuangan PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI Ulama Pejuang Kemerdekaan*, (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2013), lihat http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/riwayat%20perjuangan%20Prof.%20KH.%20Saifuddin%20Zuhri.pdf, diakses 12 Agustus 2016

[55]*Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Agama Peduli Kaum Minoritas,*Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tebuireng edisi 35/November-Desember 2014, dimuat kembali untuk kepentingan pendidikan.http://tebuireng.org/lukman-hakim-saifuddin-menteri-agama-peduli-kaum-minoritas/, diakses 9 Agustus 2016

Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU tahun 1988-1999.[56]

Sikap ikhlas,santun dan tawadu' Lukman masih tetap melekat hingga dewasa. Hal ini tanpak ketika ia ditawari sebagai Menteri Agama selama dua kali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni *Pertama*, ketika SBY akan menyusun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tahun 2009, dan *Kedua*, ketika SBY akan me-*reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pada bulan Oktober 2011. Sikap tawadu' Lukman tampak dari jawabannya ketika diwawancarai pada acara Mata Najwa, ia menjawab: "saya merasa bahwa masih banyak yang lebih baik dari saya, baik dari sisi akademik, kapabilitas, dan lain-lain. Untuk itu mereka lebih tepat guna mengemban amanat sebagai menteri". Pada tawaran ketiga, ia tidak dapat menolak lagi karena ada berbagai pertimbangan yang harus diambilnya, seperti nama baik PPP, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Haji, Kementerian Agama dan lain-lain. Adapun tokoh yang dimintai pendapatnya di antaranya adalah KH Maemun Zubair, dan KH A Mustofa Bisri. Setelah berkonsultasi itu, ia kemudian berkesimpulan bahwa amanah itu harus dijalani untuk membawa Kementerian Agama dan kehidupan beragama menjadi lebih baik. Dalam sambutannya, ketika SBY berpesan agar tugas-tugas pokok Kementerian Agama dituntaskan, penyelenggaraan ibadah haji diperbaiki dan ditingkatkan, serta mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan moril aparatur Kementerian Agama untuk bisa bekerja fokus dan berjalan baik.[57]

Sebagai wujud sikap tawadlu' dan inklusif terhadap semua kalangan, setelah menjabat Menteri Agama, Lukman kemudian

---

[56]*Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Agama Peduli Kaum Minoritas,*Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tebuireng edisi 35/November-Desember 2014, dimuat kembali untuk kepentingan pendidikan.http://tebuireng.org/lukman-hakim-saifuddin-menteri-agama-peduli-kaum-minoritas/, diakses 9 Agustus 2016

[57]Ali Zawawi, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 18-20.

melakukan berbagai agenda kegiatan untuk melakukan dan menerima masukan di antaranya, *Pertama*, ia melakukan pertemuan dengan pejabat-pebajat eselon I Kementerian Agama RI untuk segera membenahi, memperbaiki, dan meningkatkan kepercayaan publik pada Kementerian Agama. Ia juga melakukan pertemuan dengan Irjen Kemenag M Jasin -yang juga mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)- untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan wewenang yang bisa berujung pada tindak pidana korupsi. Menurutnya, "pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan". *Kedua*, ia melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan transpransi pengelolaan haji. Ia hendak memastikan bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat dan KPK bisa sejalan dengan agenda yang akan dilakukan Kementerian Agama ke depan. Karena adanya berbagai persoalan internal yang sangat berat dimana sebagian pegawai Kementerian Agama mengalami demoralisasi akibat kasus korupsi dan kepercayaan masyarakat juga menurun, maka Lukman mengajak seluruh pegawai Kementerian Agama untuk berusaha keras dengan ikhlas dalam mewujudkan perbaikan. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan komitmen Lukman sebagai Menteri Agama dalam mewujudkan perbaikan kinerja Kementerian Agama. *Ketiga*, ia melakukan pertemuan dengan *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Hasil pertemuannya adalah masukan terkait dengan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan baik berhubungan dengan pengelolaan dana haji maupun peningkatan layanan penyelenggaraan ibadah haji. *Keempat*, ia melakukan silaturrahim dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan masukan dan saran bagaimana Kementerian Agama menjalankan tugas-tugas pokoknya bisa berjalan dengan optimal untuk mewujudkan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". *Kelima*, dalam urusan membangun kerukunan intern dan antar umat beragama selain berkoordinasi dengan sejumlah tokoh agama, Kementerian Agama juga berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya seperti Kepolisian

Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membina dan membangun nilai-nilai toleransi, moderasi dan kerukunan umat beragama sesuai dengan falsafah *bhinneka tunggal ika*. *Keenam*, dalam urusan pengelolaan pemerintahan, Kementerian Agama berusaha meningkatkan pencegahan penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan memperbaiki layanan kepada umat. *Ketujuh*, dalam urusan pendidikan, Kementerian Agama berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan madrasah dan pondok pesantren setara, bahkan lebih tinggi dari lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Sebab, madrasah dan pesantren merupakan lembaga pendidikan yang khas Indonesia yang telah berperan besar dalam perjuangan Kemerdekaan RI, sehingga keduanya juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[58]

Dalam urusan keagamaan di Indonesia, Lukman sebagai sosok Menteri Agama bagi semua agama memiliki sikap yang inklusif. Oleh sebab itu, ia menegaskan perlunya memantapkan "Islam di Indonesia" yang memiliki ciri khas sangat inklusif, dalam artian dapat menerima tradisi sebelum Islam, bahkan juga rela menjadikannya sebagai bagian ritual Islam, dengan penyesuaian tertentu. Ini menandakan bahwa ajaran Islam yang universal tetap bisa hidup dan berkembang di dalam tradisi-tradisi lokal Nusantara, sehingga agama dan adat istiadat tidak perlu dipertentangkan satu sama lainnya. Demikian juga agama tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, sehingga agama tidak boleh dipertentangkan dengan pemerintah.[59]

Lukman juga menjadi inisiator dalam kegiatan ramah tamah bersama organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang

[58]Ali Zawawi, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 21-26.

[59]Ali Zawawi, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 52.

pembangunan umat beragama, Hak Asasi Manusia, dan perwakilan umat minoritas seperti syiah, sunda wiwitan. Ia mengumpulkan berbagai elemen ormas dan umat minoritas untuk menengarkan aspirasi dan kehendak mereka dalam membangun nilai-nilai keberagamaan dankebangsaan.Ia juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang religius mengakui eksistensi enam agama, walaupun dalam faktanya juga masih ada warga negara Indonesia yang menganut kepercayaan di luar enam agama itu. Oleh sebab itu, bagi kelompok minoritas, pemerintah juga melindunginya dengan memberikan kebebasan dengan persyaratantidakmelanggarregulasi yang berlaku, Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965.[60]

B. Paradigma Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin

Dalam sejarah perkembangan suatu bangsa (nation), ada sejumlah teori yang dikemukakan mengenai teori kebangsaan, yakni *Pertama*, Hans Kohn menyatakan bahwa bangsa adalah terbentuk karena adanya persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. Teori kebangsaan ini mengalami banyak kritik sebagaimana kasus Negara Israel yang bertujuan membangun negara Zeonis Raya berdasarkan ras Yahudi. *Kedua*, Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa adalah prinsip-prinsip terbangun dari adanya asas asas kerohanian, solidaritas yang besar, dan hasil sejarah, sehingga suatu bangsa merupakan eksistensi yang tidak abadi melainkan dinamis. Demikian juga wilayah dan ras tidak menjadi penyebab lahirnya suatu bangsa melainkan hanyalah memberi ruang untuk bisa hidup dan berkembang di wilayah itu, sedangkan manusia menjadi makhluk yang membentuk jiwanya. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang membentuk jiwa dari suatu bangsa bisa lahir karena adanya peradaban masa lalu yang maju,

[60]*Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Agama Peduli Kaum Minoritas,*Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tebuireng edisi 35/November-Desember 2014, dimuat kembali untuk kepentingan pendidikan. http://tebuireng.org/lukman-hakim-saifuddin-menteri-agama-peduli-kaum-minoritas/, diakses 9 Agustus 2016

komitmen hidup bersama di masa kini dan mendatang, kesamaan perjuangan dan penderitaan dalam memperoleh kemerdekaan, pemungutan suara dan pembinaan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. *Ketiga*, Frederick Ratzel menyatakan bahwa bangsa adalah sistem negara yang memiliki organisme yang hidup sehingga untuk memajukan suatu negara itu dibutuhkan ruang untuk hidup, yang dapat dilaksanakan dengan melakukan ekspansi, militerisme dan optimisme.[61]

Kajian terhadap teori-teori kebangsaan menjadi penting karena fenomena terakhir ini telah terjadi dinamika dan perkembangan radikalisme dan ekstrimisme yang tidak hanya berbasiskan agama sebagaimana kasus Bom disejumlah tempat di Indonesia mulai Bam Bali 1, Bom Bali 2 dan lainnya, tetapi juga unsur lainnya sebagaimana kasus eksitrimisme ujaran kebencian. Hal itu jelas mengancam spirit kebangsaan dari bangsa Indonesia yang hidup dalam kebhinekaan di era modern ini.

Di era modern ini, narasi kebencian bisa disematkan pada pimpinan Nazi Jerman, Adolf Hitler. Joseph Gobbels, yang menjadi pengikut setianya menjabat Menteri Propaganda Nazi, telah bekerja dalam memimpin program kebencian pada publik. Doktrin Goebbels yang dikampanyekan adalah "kebohongan yang dikampanyekan terus-menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kebenaran". Dari perilaku ekstrimisme yang dilakukan melalui doktrin kebohongan itu, peradaban manusia menjadi hancur dan pertumpahan darah terjadi karena manusia sudah didoktrin dengan kebohongan yang berisi ujaran kebencian (*hate speech*) yang kemudian melahirkan tindakan kejahatan berbasis kebencian (*hate crime*).[62]

Tertangkapnya para pengelola Saracen oleh Polri membuktikan bahwa hate speech telah menjadi komoditi dan

---

[61]Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2015), hlm. 190-192.

[62]Eko Sulistyo, *Negara Hadir Melawan 'Hate Speech'*, http://ksp.go.id/negara-hadir-melawan-hate-speech/, diakses 12 September 2017; lihat juga Koran Sindo, 4 September 2017.

> mempunyai pengikut sampai 800 ribu akun di media sosial. Bisnis kotor hate speech ini mempunyai titik temu dengan kompetisi politik. Ini dibuktikan dengan temuan atas laporan ke pihak kepolisian bahwa kejahatan siber meningkat tajam, terutama menjelang Pilkada 2017. Apa yang telah terjadi di Pilkada DKI Jakarta lalu menunjukkan bahwa speech berbasis agama, suku dan ras (SARA) menjadi wacana politik yang bisa menyeret massa yang luas dan berpotensi menciptakan ketegangan sosial. Perbuatan ujaran kebencian jika tidak ditangani dengan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan berpotensi memunculkan konflik sosial, tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.[63]

Dalam kerangka spirit kebangsaan tersebut, Presiden Joko Widodo melalui program Nawa citanya yang hendak menghadirkan pemerintahannya di tengah-tengah masyarakat berusaha menguatkan kembali spirit kebangsaan yang majemuk berlandaskan Pancasila sebagai konsensus nasional dari bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan dikembangkan untuk mewarnai pembangunan bangsa Indonesia secara berkesinambungan, sehingga disamping ada upaya konkrit untuk menindak tegas pelaku tindak radikalisme dan ekstrimisme, dan juga sekaligus ada upaya konkrit penanaman ideologi Pancasila untuk menjadikan ideologi Pancasila bisa terus tertanam dalam jiwa dan semangat kerja bangsa Indonesia.

[63]"Dalam hukum yang berlaku, tindakan ujaran kebencian (Hate Speech) sudah termuat dalam KUHAP (Pasal 156-157). Beberapa undang-undang dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan mempidanakan "ujaran kebencian'. Seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial". Eko Sulistyo, *Negara Hadir Melawan 'Hate Speech'*, http://ksp.go.id/negara-hadir-melawan-hate-speech/, diakses 12 September 2017.

(Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tanggal 1 Juni 2016)[64]

Pancasila sebagai ideologi negara dan Bangsa Indonesia menjadi jiwa dan semangat juang bangsa Indonesia dalam menjagara, memajukan dan menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI). Pancasila menjadi jiwa raga bangsa Indonesia yang dalam segala gerak gerik kita seharusnya menjadi ruh untuk membangun kemajuan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan Indonesia harus terus dijaga dan dikembangkan dalam menghadapi berbagai masalah aktual bangsa Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan arus budaya dan ideologi luar yang tidak jarangan membawa efek negatif, misalnya ideologi radikalisme keagamaan, budaya hedonisme, dan budaya liberalisme-kapitalisme. Oleh sebab itu, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terbangun dari berbagai suku, bahasa, ras, etnis, agama dan

[64] *Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila*, http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html, diakses 15 september 2017.

aliran harus tetap terjaga dan harus tetap menjadi modal dasar dalam menjaga dan memajukan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.[65]

Realitas kemajemukan itu sangat disadari oleh *founding father*, misalnya Soekarno alias Bung Karno –Presiden RI Pertama-, sejak awal mula sudah menyadari eksistensi bangsa Indonesia yang majemuk sehingga spirit hidup bernegara yang utama yang digelorakan adalah spirit kebangsaan yang berlandaskan sikap anti diskriminasi yang jelas dan tegas. Landasan pemikiran Bung Karno menjadikan spirit kebangsaan sebagai pondasinya adalah bahwa perikemanusiaan itu lahir dari rasa cinta kasih yang tulus dan ikhlas yang dilandasi keyakinan keagamaan, Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pidato Bung Karno yang disampaikan 17 Juni 1954 menyatakan bahwa spirit kebangsaan yang dibangun untuk NKRI adalah spirit kebangsaan yang positif, bukan spirit kebangsaan negatif, yakni spirit kebangsaan yang hendak mengungkapkan segala rasa yang luhur dan mulia yang tumbuh dari hati nurani untuk bersama-sama membangun negara ini. Spirit kebangsaan yang positif ini dapat menjadi modal dasar dalam mewariskan spirit kebangsaan dan menangkal segala bentuk ideologi radikalisme dan ekstrimisme yang mengancam tradisi kebhinekaan, toleransi dan pluralisme yang telah melembaga di dalam budaya bangsa Indonesia.[66] Salah satu bentuk ekstrimisme modern selain ektrimisme keagamaan adalah ektrimisme ujaran kebencian yang telah terbukti juga mampu menghancurkan peradaban manusia yang beradab.

Eksistensi bangsa Indonesia merupakan realitas sejarah yang telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara, sehingga segala bentuk gerakan yang hendak mengubah

---

[65] *Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila*, http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html, diakses 15 september 2017.

[66] *Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila*, http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html, diakses 15 september 2017.

ideologi Pancasila sama saja dengan langkah mundur sebagai bangsa dan sama saja dengan berusaha membubarkan NKRI. Sementara itu, Pancasila merupakan konsensus nasional yang menjadi landasan dasar terbentuknya NKRI yang memiliki karakter kebinekaan. Sejarah menegaskan bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, *founding father* Indonesia Bung Karno menyatakan dengan tegas bahwa Pancasila hanya akan menjadi realitas aktual hidup berbangsa dan bernegara jika seluruh elemen bangsa ini bekerja dengan *"perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan.*[67]

Dalam pemikiran Presiden Jokowi, "Pancasila harus diamalkan. Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja. Pancasila harus dijaga kelanggengannya."Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila harus menjadi spirit hidup berbangsa yang menjadi landasan dasarnya dalam berjuang dan bekerja mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia. Spirit kebangsaan kita harus dipupuk berdasarkan Pancasila dalam segala aspek hidup masyarakat untuk meneguhkan rasa nasionalisme dan sekaligus menanggal ancaman yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila merupakan kerja yang berkelanjutan dalam mengisi Kemerdekaan RI. Hal itu harus juga menyatu dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia, terutama menghadapi paham atau ideologi keagamaan radikal-ekstrim yang kini sangat masif perkembangannya. Dengan demikian, Pancasila harus menjadi ruh dalam segala perjuangan dan pembangunan di segala lini hidup bangsa Indonesia. Apa yang kita lakukan di masa lalu dan masa kini untuk penguatan ideologi Pancasila di dalam jiwa anak Bangsa akan memiliki pengaruh yang sangat besar di masa mendatang sebagai perjuangan menjadikan nilai-nilai ideologi Pancasila agar bisa membumi dalam jiwa raga anak bangsa. Spirit kebangsaan kita

[67] *Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila*, http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html, diakses 15 september 2017.

harus menjadikan Pancasila sebagai jalan hidup bersama dan pedoman dalam mengarungi perjalanan hidup bangsa Indonesia dalam setiap ruang dan waktu yang dihadapi.[68] Dengan demikian, spirit kebangsaan kita harus menjadikan Pancasila sebagai kompasnya, sehingga Pancasila terus mewarnai kinerja kita dan terlembaga dalam sistem kebijakan baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.[69]

Salah satu wujud semangat kebhinekaan seagai salah satu wujud penghargaan terhadap spirit kebangsaan kita adalah adanya sikap kebhinekaan yang disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin pada *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017 yang menegaskan bahwa adanya Kementerian Agama merupakan bukti nyata dari eksistensi NKRI sebagai negara yang religius yang nasionalis, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946, Pemerintah atas usul dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) membentuk Kementerian Agama dan mengangkat Menteri Agama yang pertama yaitu Haji Mohammad Rasjidi.[70]

Adanya Kementerian Agama menjadi jelas bahwa negara merupakan eksistensi yang hidup yang memerlukan ruh, salah satu ruh yang bisa mendinamisir kehidupan negara adalah agama. Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, sehingga negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Hal itu tentu saja berbeda dengan pemikiran Bung Karno yang menghendaki pemisahan agama dari negara, namun juga tidak berarti pemikiran Lukman sama dengan pemikiran Mohammad Natsir yang hendak

---

[68]*Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila*, http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html, diakses 15 september 2017.

[69]*Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila*, http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html, diakses 15 september 2017.

[70]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

menyatukan peran agama dan negara. Lukman merupakan profil Menteri Agama yang lebih banyak memberikan perhatian terhadap relasi agama dan negara karena bangsa Indonesia di masa kepemimpinan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, sedang menghadapi ujian dan tantangan yang tidak ringan, kasus Pilkada Jakarta yang menghadirkan calon gubernur dari agama yang berbeda di antara keduanya menjadi ujian nyata, bahwa bangsa Indonesia sedang diuji sikap nasionalismenya. Oleh sebab itu, Lukman -yang memiliki kesamaan pemikiran dengan pemikiran Nurcholish Madjid yang hendak memposisikan agama sebagai pengisi substantif dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun tidak sepenhnya sama karena Nurcholish Madjid hanyalah ilmuwan murni-menyatakan dengan tegas bahwa semangat dan motivasi keagamaan menjadi sumber yang memberikan energi terhadap bangsa ini dalam memperjuangkan Kemerdekaan RI, mempertahankan keutuhan NKRI dan membangun kemajuan dan kejayaan NKRI. Lukman memiliki sikap yang tegas bahwa agama menjadi ruh dalam kehidupan kebangsaan dari bangsa Indonesia sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

> Kita ketahui, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa dan Negara kita. Semangat dan motivasi keagamaan adalah sumber kekuatan kita dalam meraih kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan nasional, dan menjaga keutuhan NKRI. Agama mendapatkan kedudukan terhormat dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dijadikan sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional. Agama menjadi ruh kehidupan kebangsaan kita sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.Salah satu pejuang kemerdekaan dan tokoh pendiri Republik Indonesia, Hadji Agus Salim, dalam tulisannya pada tahun 1950 berjudul "Kementerian Agama dalam Republik Indonesia", menjelaskanbenangmerahpolitik agama di Republik Indonesia yang berbeda dengan politik di masa kolonial. Menurutnya, jabatan dan tugas Kementerian Agama sungguh

> besar dan mulia karena sangat menentukan nasib bangsa ini. Kesatuan kebangsaan kita akan terpelihara secara kokoh dan tidak dapat dipecah belah amatlah tergantung pada kebijakan dan kecakapan aparatur Kementerian Agama.[71]

Di satu sisi, pemikiran Lukman memiliki kesamaan dengan Mohammad Natsir yang memandang agama merupakan bagian yang integral dari tata kehidupan bernegara sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal ini dapat disimak dari pernyataan Lukman yang menyatakan bahwa "*penegasan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai falsafah dasar kehidupan bernegara pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita senantiasa memerlukan tuntunan Tuhan*". Tetapi pada sisi lain, Lukman memiliki perbedaan karena yang dia kehendaki bukan aturan legal formal dari agama yang hendak dijadikan tuntutan dalam tata kehidupan bernegara, tetapi nilai-nilai fundamental saja yang bisa dijadikan landasan dalam pembangun kehidupan bernegara. Dalam hal ini, Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa "*prinsip fundamental tersebut mengamanatkan supaya ajaran dan nilai-nilai agama diperankan sebagai pemberi arah sekaligus mendasari kehidupan kebangsaan kita yang ber-motto Bhinneka Tunggal Ika*".[72]

Lukman Hakim Saifuddin merupakan Menteri Agama yang memiliki semangat nasionalisme-religius yang sejati yang membedakan dengan Soekarno dan Mohammad Natsir. Ia merupakan tokoh NU yang menampilkan spirit moderasi keagamaan Islam yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama, tetapi juga tidak

---

[71]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

[72]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pad a Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

menjadikan dia sebagai seorang primordial dalam kebijakan-kebijakannya, sehingga walaupun dia sebagai seorang NU tulen, tetapi kebijakan-kebijakannya tetap mencerminkan sebagai seorang nasionalis-religius yang sejati yang memperlakukan seluruh aparat sipil negara Kementerian Agama secara adil, fair dan setara. Oleh sebab itu, Lukman Hakim Saifuddin menghendaki agar umat beragama menjadi nilai-nilai agamanya sebagai unsur yang membentuk *Nation and Character Building* bangsa Indonesia yang majemuk, sehingga perbedaan agama itu haruslah menjadi unsur perekat dan pemersatu bangsa, bukan pemecah bela. Di samping itu, sikap toleransi dan kerukunan beragama haruslah menjadi spirit bagi semua pemeluk agama dan elemen bangsa.[73]

> Agama yang diyakini dan diamalkan oleh umatnya masing-masing harus menjadi unsure pembentuk Nation and Character Building bangsa Indonesia yang majemukini. Karena itu, seluruh umat beragama harus menyadari dan disadarkan bahwa nilai-nilai agama merupakan unsure perekat integrasi nasional. Dalam kaitan ini pula saya ingin mengingatkan, toleransi dan kerukunan bukan milik sesuatu golongan umat beragama semata, tetapi harus menjadi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama. Saling menghormati dan saling menghargai identitas keyakinan antar umat beragama harus terus dijaga dalam upaya melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[74]

[73]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

[74]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

Dalam mewujudkan nasionalisme-religius yang sejati, Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan bagian dari Pemerintahan Jokowi-JK hendak menghadirkan pemerintahan yang hadir dan dekat dengan rakyat sesuai dengan visi Nawacita Jokowi-JK itu, yakni dengan mengangkat tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-71 tahun 2017 yang judul "*BersihMelayani*" dan motto "*Lebih Dekat Melayani Umat*". Dengan tema dan moto tersebut, Lukman Hakim Saifuddin berusaha memperkuat gagasan membangun lima budaya kerja di Kementerian Agama yang bertujuan untuk mengubah paradigma kerja menuju paradigma kinerja yang melayani secara efesien, efektif, transparan, akuntabel, dan hati-hati. Perubahan itu dimulai dari paradigma berpikir aparatur bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan kerja besar sehingga kemudian Lukman menggagas lima budaya kerja, yakni integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Lima budaya kerja ini dijadikan pondasi dalam melakukan perbaikan Kementerian Agama.[75]

Dalam pemikiran Lomba Sultan, Islam kebangsaanLukman Hakim Saifuddin merupakan personifikasi dari Islam rahmatanlilalamin dan berislam yang washatiyah/moderat. Hal itu sesuai dengan syariat Islam yang diturunkan Allah swt. Kepada umat manusia untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan manusia dari kemadlaratan.[76]Dengan kata lain, Islam yang digagas oleh Lukman Hakim Saifuddin merupakan Islam yang berusaha membawa umat manusia keselamatan dan kesejahteraan yang hakiki baik di dunia maupun akhirat.

[75]Khiarul Huda Basyir dkk, *Lukman Hakim Saifuddin, Memimpin Kementerian Agama Periode 2014-Desember 2015*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kemenag RI, 2016). Hlm. 3.

[76]Hasil wawancara Lomba Sultan, Pengurus ICMI Sulawesi Selatan, Desember 2018.

C. Kiprah Lukman Hakim Saifuddin Sebagai Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Agama, dan Menteri Agama

Secara historis, Lukman Hakim Saifuddin merupakan tokoh NU yang memiliki kecerdasan dan keterbukaan pemikiran serta integritas yang terkenal di kalangan NU. Di samping lahir dari tokoh NU, KH Saifuddin Zuhri, ia juga merupakan aktivis NU dimana ia pernah menjawab sebagai Wakil Sekretaris Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) 1985-1988 dan Wakil Sekretaris Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam NU) 1988-1999.[77]

Lukman Hakim Saifuddin sebagai tokoh NU yang memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap berbagai kegiatan dan perjuangan ke-NU-an. Ia menampilkan berbagai prestasi NU dalam membangun bangsa dan negara yang telah ditorehkan baik ormas NU maupun tokoh NU. Salah satu tokoh yang fenomenal adalah Gus Dur alias KH Abdurrahman Wahid yang mana semasa hidup telah menorehkan banyak prestasi, di antaranya: *Pertama*, Gus Dur termasuk orang yang berhasil mengangkat citra positif pesantren tidak hanya sebagai pendidikan, tetapi juga sebagai komunitas yang memiliki nilai-nilai dan kultur khas yang membedakannya dari komunitas di luarnya yang menanamkan nilai-nilai keislaman, moderasi dan nasionalisme, bahkan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Gus Dur bersama ulama-ulama yang lain terdepan dalam menyelesaikan hubungan Islam dan Pancasila, sehingga umat Islam memiliki pemahaman yang benar dalam menempatkan posisi Islam dan Pancasila dimana Islam diposisikan sebagai roh Pancasila. *Ketiga*, perjuangan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tiga periode itu telah berhasil mendukung pembangunan keharmonisan bangsa Indonesia yang sangat plural terutama dari segi agama dan paham keagamaan. Melalui pemahaman Gus Dur itu, kita perlu melanjutkan

[77]https://www.intelijen.co.id/lukman-hakim-saifuddin/diakses 9- 8-2016

pengembangan paradigma keislaman inklusif itu dalam rangka membumikan wawasan Islam *rahmatan lil alamin* yang menjunjung tinggi toleransi (*tasamuh*), moderasi (*tawassuth*), dan keseimbangan (*tawazun*).[78]

Senada dengan Lukman Hakim Saifuddin, KH MA Sahal Mahfudh juga sudah pernah mengemukakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan Indonesia yang memiliki ajaran moderat dalam bidang akidah, syariah dan tawasuf. Ciri intrinsik dari aliran NU itu mengedepankan keseimbangan dalam menggunakan dalil *naqliyah* dan *'aqliyah*. Dengan paradigma keseimbangan itu dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah. Penggunaan dalil naqli dan dalil aqli yang tidak seimbang akan melahirkan ekstrimitas baik dalam bentuk skularisme ataupun fundamentalisme.[79] Hingga kini NU tetap istiqamah mengajarkan Islam moderat dan menolak segala bentuk radikalisme dan fundamentalisme agama hal ini juga diakui oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden RI, Eko Sulistiyo. Menurutnya, "Akar radikalisme sesungguhnya adalah intoleransi, dan peran Islam moderat di indonesia menjadi penting atas kemajemukan agama, bahasa, serta suku di negeri kita ini."[80]

---

[78] http://www.nu.or.id/post/read/64589/tiga-jasa-penting-gus-dur-menurut-menag-lukman-saifuddin 25 oktober 2018

[79] *MA Sahal Mahfudh,Aktualisasi Nilai-nilai Aswaja, Dikutip dari KH MA Sahal Mahfudh*, Nuansa Fiqih Sosial, *2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan pada seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Wilayah Sumatera Selatan, 16 Januari 1989 di Palembang.*

[80] *2017: Tangkal Potensi Radikalisme dan Intoleransi dengan Dialog,* http://ksp.go.id/2017-tangkal-potensi-radikalisme-dan-intoleransi-dengan-dialog/, diakses 14 September 2017.

(Deputi IV Kantor Staf Presiden RI, Eko Sulistiyo)

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang telah teruji sikap kenegarawanannya, Nadhlatul Ulama diharapkan menjadi penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menangkal potensi intoleransi dan radikalisme yang diperkirakan terus menguat pada 2017 ini. Pernyataan itu disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dalam refleksi akhir tahun di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung, di Jalan Sancang, kawasan Lengkong, Bandung..... peran penting NU dalam sejarah perpolitikan negeri ini yang terbukti berperan penting menjaga kesatuan Indonesia dan meredam radikalisme. Pertana, terkait orientasi politik ideologis, ditunjukkan dengan langkah NU menerima Pancasila sebagai ideologi final. Kedua, terkait orientasi keagamaan, secara teologis dan psikologis, melalui pendekatan dialogis dengan bekal teologi *ahl al-sunnah wa*

al-jamaah yang moderat, inklusif, dan toleran serta dengan dakwah *bilhikmah wal mauidzah hasanah*.[81]

Sesuai dengan latarbelakangnya sebagai tokoh NU, Lukman Hakim Saifuddin yang juga Menteri Agama memiliki komitmen yang kuat dalam menumbuhkan dan mengembangkan paradigma Islam Indonesia. Oleh sebab itu, pada saat ia menyampaikan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) dalam acara peresemian dan diesnatailis ke-45 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Senin (6/4/2015) mengajak Perguruan Tinggi Islam di Indonesia untuk memahami kalau Islam di Indonesia harus sesuai dengan ke-Indonesiaan. "Bahwa Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) berada di wilayah Indonesia, oleh karena itu pemikiran Islam secara modern dan rasional. Yaitu Islam Indonesia, Islam nusantara".[82]

Dalam bidang pendidikan, Lukman Hakim Saifuddin juga menekankan pentingnya Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja tetapi juga mampu menjaga tradisi baik yang dikembangkan oleh para pendahulu, yakni "*Pendahulu kita tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, kerangka kurikulum bisa diarahkan pada penguatan wawasan kebangsaan dan keindonesiaan selain kitab-kitab klasik.*"[83] Lebih dari itu, Lukman Hakim Saifuddin juga terus berusaha membendung arus gerakan radikalisme terutama melalui lembaga pendidikan seperti madrasah untuk terus berperan aktif dalam membentengi diri dari virus radikalisme. Menurutnya, "madrasah harus terus bisa

---

[81] *2017: Tangkal Potensi Radikalisme dan Intoleransi dengan Dialog*,http://ksp.go.id/2017-tangkal-potensi-radikalisme-dan-intoleransi-dengan-dialog/, diakses 14 September 2017.

[82] *Lukman Hakim Saifuddin: UIN Walisongo Harus Mewarnai Islam Indonesia sebagai Islam Moderat*, http://justisia.com/2015/04/lukman-hakim-saifuddin-uin-walisongo-harus-mewarnai-islam-indonesia-sebagai-islam-moderat/, diakses 9- 8- 2016

[83] *Wawasan Kebangsaan Harus Melekat dalam Kurikulum Ma'had Aly*, http://www.pendidikanislam.id/berita/1842/wawasan-kebangsaan-harus-melekat-dalam-kurikulum-mahad-aly.html, diakses 9- 8- 2016.

berperan aktif sebagai benteng yang efektif terhadap virus, paham dan gerakan radikalisme Islam yang tidak hanya merongrong dan mencoreng ajaran Islam, tapi juga dapat mengancam keutuhan NKRI." Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk membangun dan mengembangkan budaya madrasah yang tidak hanya menghasilkan lulusan profesional dan berintegritas, tetapi "*mempunyai wawasan kebangsaan, keindonesiaan dan keislaman yang moderat, terbuka dan damai.*"[84]

Dalam hubungan antara agama, Lukman Hakim Saifuddin mengajak umat beragama untuk membangun toleransi hidup antar umat beragama, tetapi bukan meleburkan atau mencampurbaurkan identitas masing-masing atribut atau simbol keagamaan yang berbeda. Toleransi beragama yang dibangun adalah sikap saling memahami, mengerti dan menghormati perbedaan masing-masing agama, bukan menuntut pihak lain yang berbeda untuk menjadi sama seperti dirinya. Hubungan antara umat beragama yang damai dan rukun merupakan modal dasar dalam membangun kemajuan bangsa dan negara sehingga toleransi umat beragama menjadi keniscayaan untuk dijaga dan dilestarikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia terutama pemerintah.[85]

Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah, dan Pemerintah. Formula ini merupakan hasil diskusi para pimpinan majelis agama yang menyusun secara bersama-sama PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Umat beragama disebutkan terlebih dahulu karena memang perannya yang sangat besar dalam terwujudnya suatu kondisi rukun. Jika setiap anggota masyarakat, setipa umat

---

[84] *Menag: Gerakan radikalisme Islam ancam keutuhan NKRI, http://indonesia.ucanews.com/2014/08/29/menag-gerakan-radikalisme-islam-ancam-keutuhan-nkri/, diakses 9- 8-16*

[85] *Sikapi Natal, Menag: Toleransi Bukan Campur Baur Simbol Agama, http://www.antiliberalnews.com/2014/12/10/sikapi-natal-menag-toleransi-bukan-campur-baur-simbol-agama/, diakses 9-8-2016.*

beragama, mampu menahan diri, mengelola kondisi lingkungan, maka kerukunan akan tercipta dengan sendirinya. Pemerintah Daerah disebutkan kemudian, karena di era otonomi daerah ini merekalah yang menjadi *frontliner* dalam mengelola dinamika masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 sendiri merupakan pedoman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan. Sementara itu, Pemerintah berperan sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator dalam upaya pemeliharaan kerukunan secara nasional.[86]

Dalam bidang hubungan antara agama, Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam membina hubungan antara agama dan perlindungan hak-hak asasi dalam beragama dan berkeyakinan, sehingga persoalan ini sangat relevan untuk dibahas sebagai masukan dan dukungan terhadap pemerintah yang dalam hal ini Kementrian Agama memiliki tugas di dalamnya. Secara konstitutsional, Pasal 29 UUD 1945, khususnya Ayat (2), memberikan jaminan kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan sehingga pemerintah terus berusaha untuk membangun tatanan kehidupan yang toleran, rukun dan damai dalam rangka pembangunan bangsa yang seutuhnya. Adapun bunyi Pasal 29 ayat (2) tersebut berikut: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk bersama-sama seluruh elemen masyarakat/bangsa untuk menjaga dan menjamin terwujudnya kebebasan beragama tersebut, baik Pemerintah pusat maupun daerah. "Pemerintah pusat yang dimaksud tentu antara lain, sekali lagi, antara lain, diperankan oleh Kementerian Agama, sebagai lembaga yang ditugasi mengurusi soal agama. Adapun di daerah, tanggung jawab tersebut diampu oleh

[86]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

Kepala Daerah dan jajarannya, termasuk Kementerian Agama di daerah". Dalam bidang perlindungan hak-hak beragama, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis melalui program penegakkan hak-hak asasi manusia dengan menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, yang melanjutkan capaian periode sebelumnya, RANHAM 2011-2014.[87]

> Khusus menyangkut hak asasi keagamaan, yang menjadi wilayah tugas kami, dalam RANHAM 2015-2019 teridentifikasi permasalahan masih tingginya jumlah konflik yang berbasis agama, sehingga strategi penerapan norma dan standar HAM-nya diarahkan pada tujuan terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, dengan indikator keberhasilan menurunnya jumlah konflik yang berbasis agama. Adapun tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah masih kurangnya pemahaman dan toleransi antarumat beragama, dan maka perlu peningkatan toleransi antarumat beragama. Inilah yang kemudian menjadi fokus kami: penguatan toleransi beragama dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.[88]

Dalam upaya menjaga kebebasan beragama, maka tantangan atas toleransi beragama dikabarkan semakin menguat dan mengkha-watirkan kondisi kehidupan beragama di Indonesia. Salah satu yang menjadi indikasinya adalah adanya isu-isu agama yang juga masuk ke ranah politik, sosial dan ekonomi, sehingga persoalan ini dapat memicu pertentangan dan konflik. Adanya sejumlah kegiatan ceramah di rumah ibadah yang memasukkan konten-konten politik perlu diantisipasi karena hal itu dapat menimbulkan keresahan

[87]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

[88]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

jamaah dan masyarakat yang bisa jadi pilihan politiknya berbeda-beda di dalamnya.[89]

> Sebagai contoh, ketika khutbah Jumat di suatu masjid atau khotbah Minggu di suatu gereja, yang menjadi bagian dari aktivitas keagamaan, diisi dengan konten politik, pilihlah ini dan jangan pilih itu, misalnya, maka menjadi kabur: apakah ini ritual agama yang sakral atau aktivitas politik yang profan. Kemudian, sejauhmana negara dapat "mengintervensi" aktivitas pseudo-agama itu, meski dilakukan dalam kerangka menjaga stabilitas sosial. Kondisinya tidak selalu mudah. Ada psikologi keagamaan umat, ada upaya *politicking*, ada konstelasi pemain ekonomi, dan di sisi lain ada keterbatasan-keterbatasan negara dalam melakukannya.[90]

Kondisi tersebut merupakan peringatan dini kepada para pemeluk agama untuk tidak mencampuradukan antara urusan agama dengan politik terutama dalam tataran politik praktis. Sebab, sejarah dunia membuktikan bahwa persoalan konflik agama seringkali diawali dan dipicu oleh adanya unsur-unsur luar agama yang dibungkus dengan baju agama, sehingga para pemeluk agama tersulut emosinya dan kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang sangat bertentangan dengan spirit utama lahirnya agama di muka bumi.[91]

Adanya urusan non-agama ke dalam urusan agama diakui oleh Jusuf Kalla, bahwa ada beberapa konflik, tetapi sesungguhnya konflik-konflik itu terjadi karena ketimpangan kesempatan politik, setelah desetralisasi daerah dan tidak transparannya

---

[89]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

[90]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

[91]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

penyelenggaraan pemilu kepala daerah atau pemilukada. Menurutnya, "Memang ada friksi, tetapi itu hanya beberapa saja di Indonesia dengan penduduk 240 juta. Walaupun demikian, sekecil apa pun, masalah intoleransi harus di atasi. Kita ingin segalanya lebih baik. Indonesia untuk semua." Namun demikian, secara keseluruhan, Indonesia merupakan negara yang sangat toleran dalam keragaman termasuk dalam hubungan antara agama.[92]

> Sebagai negeri dengan mayoritas penduduk adalah Muslim, jelas JK, 8 dari 33 gubernur beragama bukan Islam, cukup banyak menteri bukan Islam, bahkan pada masa Orba sempat kementrian bidang ekonomi dan pertahanan dipegang oleh saudara kita yang nonmuslim. Hanya di Indonesia toleransi seperti ini bisa terjadi, dan kita semua mensyukuri itu. Di Indonesia, tambah JK, semua jenis hari raya keagamaan dirayakan meski dalam fakta hampir 90 persen orang Indonesia adalah Muslim.[93]

Demikian juga Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan bahwa kondisi kerukunan umat beragama secara umum berjalan baik, meski di beberapa titik ada *isolated cases* yang memerlukan penanganan sebagaimana dipaparkan Jusuf Kalla (JK). Ada beberapa komentator yang memberikan gambaran kondisi Indonesia yang mengkhawatirkan dalam masalah kerukunan umat beragama, tetapi hal itu tidak menyebabkan kita pesimis atas kondisi kerukunan antara/ umat beragama di Indonesia. Sebab, secara umum, kondisi kerukunan antara/umat beragama masih tetap terjaga dengan baik dan terkendali sehingga potensi-potensi konflik yang bernuansa agama harus terus diwaspadai, sehingga tugas menjaga

---

[92] *JK: Indonesia Tertoleran Se-Dunia*, http://jusufkalla.info/archives/2013/11/06/jk-indonesia-tertoleran-se-dunia/, diakses 25 Maret 2017.

[93] *JK: Indonesia Tertoleran Se-Dunia*, http://jusufkalla.info/archives/2013/11/06/jk-indonesia-tertoleran-se-dunia/, diakses 25 Maret 2017.

dan membangun toleransi dan kerukunan beragama merupakan tugas yang berkesinambungan dan dinamis di Indonesia.[94]

> Beberapa komentator atau *observer*, yang melihat secara terbatas pada beberapa kasus atau beberapa wilayah, menyimpulkan gambaran yang menakutkan mengenai kondisi kerukunan umat beragama. Namun demikian, kalau kita melihat bangsa Indonesia secara utuh, dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga desa, kondisi faktual kerukunan umat beragama di Indonesia sejatinya baik. Komunikasi antartokoh pemuka agama terjalin di berbagai lapisan. Kita punya Forum Kerukunan Umat Beragama di semua provinsi, dan di 486 kabupaten/kota. Kita juga bisa melihat dan merasakan kebersamaan segenap umat beragama dalam berbagai aktivitas mereka. Ada *local wisdoms* dan *religious wisdoms* yang turut merekatkan persaudaraan antariman. Bahkan, beberapa negara banyak belajar dari pengalaman kerukunan masyarakat Indonesia, termasuk yang terakhir Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud yang sangat mengapresiasi toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.[95]

Kondisi aktual dari toleransi umat beragama yang ditandai dengan adanya kerukunan antara/umat beragama tercermin masih dalam kondisi yang dinamis dan positif dapat dibuktikan dengan adanya hasil survei nasional sebagai ukuran kuantitatif terhadap eksistensi toleransi dan kerukunan umat beragma yang masih berada dalam kondisi kondusif. Oleh sebab itu, upaya-upaya pemerintah

[94]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

[95]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

terutama apa yang disampaikan JK tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hasil survei tersebut.[96]

> Secara kuantitatif, hasil survei nasional kerukunan umat beragama di Indonesia 2016 juga mengonfirmasi kondisi tersebut. Bahwa indeks kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2016 ini sebesar 75,47dalamrentang 0 sampai 100. Angka ini naik 0,12 dari indeks serupa tahun 2015. Survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini melibatkan 6.800 responden yang tersebar di 34 propinsi pada Agustus 2016. Survei yang menggunakan *Multistage Clustered Random Samplingv*denganv*margin errorv*sebesar 1,2% dan tingkat kepercayaan 98,8% ini mengukur tiga konsep, yaitu: toleransi, kesetaraan dan kerjasama.[97]

Demikian juga dalam rangka membangun toleransi beragama, kemerdekaan beragama juga menjadi spirit dari pendiri bangsa, Soekarno. Hal itu tercermin dari gagasan Soekarno dalam memberikan nama Masjid Istiqlal sebagai simbol dari pembebasan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan, sehingga dengan penamaan ini ia menyampaikan pesan bahwa umat Islam Indonesia seharusnya menjadi pondasi penting dalam membangun dan merawat cita-cita kemerdekaan Indonesia.[98]

> Lokasi Masjid Istiqlal juga sengaja dipilih oleh Soekarno di depan Gereja Katerdal yang sudah lebih dahulu berdiri di Lapangan Banteng sejak 1828. Berdirinya monumen dua agama yang saling bersebelahan untuk menunjukan Indonesia sebagai negeri Bhineka Tunggal Ika

---

[96]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

[97]Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

[98]Eko Sulistiyo, *Soekarno dan Masjid Istiqlal*, http://ksp.go.id/soekarno-dan-masjid-istiqlal/

dimana sesama pemeluk agama dapat hidup berdampingan dan saling toleransi. Kehidupan toleransi beragama juga ditunjukan dengan pemilihan desain masjid yang dibuat arsitek Protestan bernama Friedrich Silaban, salah satu lulusan terbaik dari Academie van Bouwkunst, Amsterdam, 1950.[99]

(Menteri Agama RI Lukman Haki Saifuddin mendampingi Presiden RI, Ir H Joko Widodo dalam pertemuan dengan para Alim Ulama di Istana Merdeka Jakarta, Selasa siang, 4 April 2017)[100]

Dalam acara tersebut, Presiden RI berdialog dalam rangka menyerap dan menerima harapan, keinginan, dan aspirasi yang berkembang dalam kehidupan keumatan, sehingga dalam pertemuan tersebut, pemerintah berharapkan peran ulama dalam menjaga perdamaian di negara. Lebih lanjut, menurut Lukman Hakim

[99]Eko Sulistiyo, *Soekarno dan Masjid Istiqlal*, http://ksp.go.id/soekarno-dan-masjid-istiqlal/

[100]*Peran Penting Ulama Memelihara Semangat Kebersamaan dan Kedamaian*, http://ksp.go.id/peran-penting-ulama-memelihara-semangat-kebersamaan-dan-kedamaian/

Saifuddin, Presiden RI mengharapkan para ulama manyampaikan harapan-harapan, keinginan-keinginan, aspirasi yang berkembang, terkait dengan kehidupan keumatan selama ini. Salah satu harapan yang disampaikan para ulama itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara secara adil.[101]

Di kalangan ulama/habaib, Lukman diterima dengan sangat baik. Lukman juga didaulat untuk bisa hadir dalam peringatan 90 tahun, Rabithah Alawiyah. Dalam pertemuan dengan Lukman tersebut, organisasi Rabithah Alawiyah ini menyampaikan renacana kegiatan yang akan mengadakan pertemuan bersama ormas untuk menyikapi tahun politik termasuk mengundang duta negara sahabat. Dalam kesempatan tersebut, Lukman juga sangat mengapresiasi kinerja ormas Rabithah Alawiyah yang mengajarkan Thariqah Alawiyah berdasarkan asas ilmu, amal, ikhlas, wira'i (hati-hati), dan takwa. Nilai-nilai itu tentu saja dapat memberikan sumbangan terhadap dakwah Islam melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.[102]

[101]*Peran Penting Ulama Memelihara Semangat Kebersamaan dan Kedamaian*, http://ksp.go.id/peran-penting-ulama-memelihara-semangat-kebersamaan-dan-kedamaian/

[102]Khoiron(ed.), *Habib Zen Umar Sumaith Undang Menag di Peringatan 90 Tahun Rabithah Alawiyah*, https://kemenag.go.id/berita/read/509383/habib-zen-umar-sumaith-undang-menag-di-peringatan-90-tahun-rabithah-alawiyah--, diakses 21 November 2018.

(Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima kujungan KetuaUmum dan pengurus Rabithah Alawiyah, Habib Zen Umar Sumaith, Sekretaris Umum Rabithah Alawiyah, Habib Husen Ali Alatas, dan Habib Nabiel Al Musawa. Sementara Menag didampingi Kabag Tata Usaha, Khoirul Huda, di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018)[103]

[103]Khoiron(ed.), *Habib Zen Umar Sumaith Undang Menag di Peringatan 90 Tahun Rabithah Alawiyah*, https://kemenag.go.id/berita/read/509383/habib-zen-umar-sumaith-undang-

D. Wacana Tekstualisme dan Empirisisme Keislaman dan Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin: Antara Gusdurian dan Nurcholisian

Dalam paradigma ijtihad keislaman, ciri khas Gus Dur selalu mengedepankan rasionalitas dan budaya, sehingga pesan-pesan ajaran syariat Islam selalu dibungkus dengan nilai-nilai kebudayaan dan rasionalitas, bahkan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) seringkali mengungkapkan bahasa syariat Islam dengan bahasa budaya misalnya Gus Dur mengemukakan kesejahteraan umum dengan padanan kata 'al-Mashalah al-'ammah'. Sementara itu, Nurcholish Madjid mengemukakan paradigma paham keislamaannya berbasis ke-Indonesia-an dengan tetap mengemukakan norma-norma syariat Islam secara tekstual berdasaran al-Qur'an dan Sunnah, sehingga budaya teksnya lebih kuat ketimbang paradigma keislaman Gus Dur.

Berangkat dari dua paradigma ijtihad keislaman tersebut, Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan bahwa ajaran (Syariat Islam) memerlukan ijtihad karena perkembangan hidup manusia terus berjalan, sedangkan sumber normatif ajaran syariat Islam baik al-Qur'an dan Sunnah sudah final dan tidak bisa bertambah lagi, sehingga walaupun sama-sama bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah tetapi bisa jadi perwujudkan syariat Islamnya berbeda karena adanya perbedaan tuntutan sosial dan budaya hidup masyarakat yang berbeda. Salah satu contoh aktualnya adalah jaminan kebebasan beragama (*hifdz al-din*) menjadi esensial dalam ajaran syariat Islam. Implementasi dari ajaran syariat Islam itu kemudian diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia yang tertuang dalam konstitusi.

> Pasal 29 UUD 1945, khususnya Ayat (2), yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

menag-di-peringatan-90-tahun-rabithah-alawiyah--, diakses 21 November 2018.

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dari pasal tersebut juga eksplisit disebutkan siapa aktor yang harus menjamin kebebasan beragama tersebut, yakni negara, yang dalam pelaksanaannya diperankan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat yang dimaksud tentu antara lain, sekali lagi, antara lain, diperankan oleh Kementerian Agama, sebagai lembaga yang ditugasi mengurusi soal agama. Adapun di daerah, tanggung jawab tersebut diampu oleh Kepala Daerah dan jajarannya, termasuk Kementerian Agama di daerah.[104]

Sejumlah tokoh agama mengakui peran serta dan gagasan Lukman Hakim Saifuddin dalam menyuarakan dan menerjemahkan ide-ide dasar keislaman dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diakui oleh Elga Sarapung, Tokoh Dialog Antar Agama asal Yogyakarta, yang mengakui bahwa Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama telah berhasil membangun tata kehidupan beragama yang rukun dan harmonis dalam suasana kemajemukan di Indonesia sehingga, bangsa Indonesia dinilai sebagai bangsa yang beradab oleh dunia walaupun beragam dari segala seginya terutama dari sisi agama.[105]

> Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2016 ini sebesar 75,47dalamrentang 0 sampai 100. Angka ini naik 0,12 dari indeks serupa tahun 2015. Survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini melibatkan 6.800 responden yang tersebar di 34 propinsi pada Agustus 2016. Survei yang menggunakan

[104]Lukman Hakim Saifuddin, "*Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam Pembinaan Toleransi dan Penghormatan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan",* Sambutan Menteri Agama RI pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2017 yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

[105]Ali Zawawi, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 160-161, 170-171, dan 190-191.

> *Multistage Clustered Random Sampling* dengan *margin error* sebesar 1,2% dan tingkat kepercayaan 98,8% ini mengukur tiga konsep, yaitu: toleransi, kesetaraan dan kerjasama.[106]

Paradigma ijtihad Lukman Hakim Saifuddin memiliki ciri khas yang berbeda dari para pendahulunya, yakni ia mampu memadukan tradisi teks dan konteks secara seimbang, tidak berat sebelah. Ada dinamika politik pilkada di DKI Jakarta, misalnya, ternyata memiliki gaung cukup kuat dan daya rambat luas yang kemudian melahirkan gerakan 212. Dalam hal ini, Lukman Hakim Saifuddin mengkritisi fenomena gerakan tersebut.[107]

> Gerakan ini dapat dipahami sebagai ekspresi luapan kegairahan dalam beragama yang dipicu momentum adanya dugaan tindak penistaan agama. Gejala ini juga dapat dipandang sebagai adanya gejala penguatan konservatisme agama yang ikut dalam gelombang besar bangkitnya gairah keberagamaan tersebut. Dalam tingkat tertentu, konservatisme itu diduga ditumpangi radikalisme atau ekstrimisme agama. Dan, tampaknya juga ada stagnasi literasi keagamaan. Fiqh siyasah mengacu pada literature klasik otoritarian, fiqh ubudiyah lebih menonjol, sementara fiqh muamalah kurang dapat perhatian, bahkan miskin fiqh ilmiyah. Dari sisi lain, kita dapat menganalisis adanya faktor non keagamaan dalam fenomena gerakan massa itu. Ada nuansa dinamika politik lokal pemilihan kepala daerah, ada juga kecemburuan sosial-ekonomi dalam skala agak makro,

---

[106]Lukman Hakim Saifuddin, "*Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam Pembinaan Toleransi dan Penghormatan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakiana",* Sambutan Menteri Agama RI pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2017 yangdiselenggarakanolehKomnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

[107]Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI pada Pengarahan Program Penelitian Tahun 2017 Balai Litbang Agama Semarang "Isu-Isu Aktual Penelitian Bidang Keagamaan" Semarang, 31 Januari 2017.

ataupun gejala penetrasi media massa termasuk media sosial.[108]

Dalam anasisis tersebut, Lukman Hakim Saifuddin tidak hanya membaca fakta secara apa adanya tetapi juga membaca fenomena di balik fakta itu. Demikianlah paradigma ijtihad Lukman Hakim Saifuddin dalam kajian keislaman dan fiqih tidak hanya membaca fakta apa adanya tetapi juga berusaha menggali semangat dari fakta itu.[109]Karenanya, menurut Lomba Sultan, Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Selawesi Selatan, pemikiran Lukman Hakim Saifuddin berisfat fleksibel tetapi tetap berpegang teguh pada nas. Pemikirannya sesuai dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa "*berubahnya hukum tergantung zaman, tempat, keadaan, motivasi dan adat. Akan tetapi Islam secara aqidah bersifat universal, yakni sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw mengucapkan "Tidak ada Tuhan selain Allah"*.[110]

Dari sisi geneologi pemikiran kebangsaan NU di Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin juga mengemukakan KH. Abdul Wahab Chasbullah (Mbah Wahab) sebagai sosok ulama yang juga sekaligus pejuang kemerdekaan. Mbah Wahab merupakan sosok Kyai yang telah menorehkan prestasi yang luar biasa dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, Mbah Wahab merupakan salah satu pendiri NU yang memiliki gagasan dan perjuangan hidup berbangsa yang visioner yang ditandai dengan sejumlah gagasan-gagasan berikut: *Pertama*, ia membentuk *Nahdlatut Tujjar* pada tahun 1918-an yang bertujuan memajukan umat dan bangsa bisa berdikari dalam bidang ekonomi dengan konsep koperasi. *Kedua*, ia membentuk *Taswirul Afkar* yang

[108]Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI pada Pengarahan Program Penelitian Tahun 2017 Balai Litbang Agama Semarang "Isu-Isu Aktual Penelitian Bidang Keagamaan" Semarang, 31 Januari 2017.

[109]Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI pada Pengarahan Program Penelitian Tahun 2017 Balai Litbang Agama Semarang "Isu-Isu Aktual Penelitian Bidang Keagamaan" Semarang, 31 Januari 2017.

[110]Hasil wawancara Lomba Sultan, Pengurus ICMI Sulawesi Selatan, Desember 2018.

merupakan gerakan keilmuan dan kebudayaan pada tahun 1914 yang bertujuan membangun iklim keilmuan dan keislaman yang membumi. *Ketiga*, ia membentuk *Nahdlatul Wathan* pada tahun 1916 yang bertujuan membangun gerakan politik untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan. Di samping itu, Mbah Wahab juga membentuk dan aktif dalam Sarekat Islam cabang Mekkah pada tahun 1920-an. Gagasan dan kiprah Mbah Wahab tersebut menjadi mata rantai bagi perjuangan monumental dalam rangka ikut serta membentuk dan membidani *Nahdlatul Ulama* bersama KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Tidak hanya sampai di situ, Mbah Wahab juga memberikan masukan kepada Presiden Soekarno mengenai perlunya mengeluarkan Dekrit Presiden pada tahun 1955.[111]

Mbah Wahab sebagai salah satu tokoh nasional religius yang memiliki banyak gagasan yang visioner, ia juga telah menyusun karya monumental berupa lagu pembangkit nasionalisme, yakni lagu *Syubbanul Wathan*. Oleh sebab itu, gagasan dan gerakan perjuangan keislaman dan kebangsaan Mbah Wahab yang terdiri dari empat aspek itu memiliki relevansi yang perlu terus kita tegakkan dan lanjutkan, yakni *Pertama*, gerakan ekonomi kerakyatan yang harus dibangun berlandaskan pada pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi bangsa ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga *benefit*nya dapat didistribusikan sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Inilah rahasia gerakan Mbah Wahab yang telah membentuk lembaga *Nahdlatut Tujjar* (kebangkitan para saudagar) tahun 1918. Gagasan itu perlu dihidupkan kembali dengan memperbanyak dan mengaktifasi lembaga-lembaga ekonomi kerakyatan, koperasi dan usaha kecil-menengah di pedesaan dan lingkungan pesantren,[112] yang kini oleh Presiden Joko Widodo dikembangkan dalam wujud Bank Wakaf Mikro dan Balai Latihan

[111]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Haul ke-46 KH. Abdul Wahab Chasbullah Jombang*, Jum'at, 4 Agustus 2017

[112]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Haul ke-46 KH. Abdul Wahab Chasbullah Jombang*, Jum'at, 4 Agustus 2017

Kerja (BLK) yang didirikan di sejumlah pesantren, disamping dukungan dana untuk pembangunan pedesaan.

Kedua, gerakan politik-religious yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur ajaran agama (Islam), yakni Keadilan, kejujuran, transparansi dan tanggungjawab yang perlu diwujudkan dan diterapkan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Dengan demikian, politik-religious bertujuan membangun tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dengan media kekuasaan, bukan sebaliknya, mempolotisir agama demi kepentingan politik. Dalam hal ini, Mbah Wahab telah mendirikan *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) yang bertujuan mengajak bangsa Indonesia untuk bangkit dari ketertinggalan, sehingga bangsa Indonesia bisa hidup mandiri, adil, makmur dan bermartabat.[113]

Ketiga, gerakan intelektualisme-spiritualis-praksis yang suarakan oleh Mbah Wahab bertujuan membongkar kejumudan berfikir yang menyelimuti sebagian besar bangsa Indonesia pada waktu itu dengan mendirikan sebuah organisasi, yaitu *Taswirul Afkar* (Potret Pemikiran). Melalui wadah ini, gagasan dan wawasan kaum muda bangsa Indonesia (khususnya santri) dibuka dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan empiris umat dan bangsa, sehingga ia mendorong generasi muda untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk mendorong semangat untuk merealisasikan gerakan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Dalam konteks ini, Mbah Wahab pada dasarnya menghendaki lahirnya generasi-generasi yang tangguh, unggul dan kompetitif.[114]

Keempat, gerakan cinta tanah air yang disuarakan Mbah Wahab dilakukan melalui media lagu *Syubbanul Wathan* untuk membakar semangat kebangsaan dari umat Islam untuk mencintai tanah air (*hubbul wathan*). Lirik lagu ini begitu memikat hati anak

[113]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Haul ke-46 KH. Abdul Wahab Chasbullah Jombang*, Jum'at, 4 Agustus 2017

[114]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Haul ke-46 KH. Abdul Wahab Chasbullah Jombang*, Jum'at, 4 Agustus 2017

negeri dan membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, sehingga dengan lirik lagu itu, maka anak-anak bangsa ini semakin kuat dan teguh semangat nasionalismenya untuk NKRI.[115]

Dari pemikiran dan perjuangan Mbah Wahab, pemikiran Lukman Hakim Saifuddin menjadi semakin jelas karakternya bahwa nilai-nilai keislaman yang membumi menjadi perhatian dan fokus dari pemikiran dan kiprahnya dalam membangun bangsa Indonesia. Apalagi jika kita mengeksplorasi pemikiran Gus Dur yang memiliki aksentuasi pada penggalian dan penerapan substansi ajaran Islam dalam kehidupan empiris kemanusiaan. Walaupun terkadang diakui atau tidak, Gus Dur lalu kurang memberikan proporsi yang memadai dalam mengeksplorasi teks-teks keislaman dalam menjawab realitas empiris itu, sehingga sisi kosong itulah yang diisi oleh Nurcholish Madjid yang selalu berusaha mendasarkan pada dalil-dalil normatif dalam menjawab persoalan empiris kemanusian, sehingga ia terkadang elitis alias tidak membumi walaupun dari sisi akar normatifnya kuat. Berangkat dari dua sisi yang memiliki kelebihan dan kekurangan itu, Lukman Hakim Saifuddin hadir untuk membangu dialektika antara tekstualisme dan empirisisme.

E. Respons Berbagai Kalangan terhadap Pemikiran dan Kiprah Lukman Hakim Saifuddin

Secara teoritik, Mac Howard Ross dalam karyanya yang berujudul, *the Culture of Conflict: Interpretation and Interest in Comparative Perspective*, terbitan Yale University Press, Connecticut, 1993, telah menjelaskan bahwa budaya yang mejemuk merupakan keniscayaan yang dihadapi umat manusia di dunia, sehingga setiap generasi muda perlu mendapatkan pelajaran dan wawasan yang mampu memberikan bekal untuk bisa hidup berdambingan baik sebagai umat beragama, masyarakat maupun

[115]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Haul ke-46 KH. Abdul Wahab Chasbullah Jombang*, Jum'at, 4 Agustus 2017

bangsa. Kita tidak bisa membekali generasi muda hanya dengan wawasan keilmuan dan keagamaan yang monolitik, bukan multikultural, karena hal itu dapat berpotensi menimbulkan berbagai gejolak dan konflik akibat adanya pemikiran yang sempit, dangkal dan ekslusif.Oleh sebab itu, Musa Asya'rie, Guru Besar Filsafat Islam, jugamenyatakan bahwa paradigma pembelajaran agama dan juga penyampaian misi keagamaan harus berlandaskan pada wacana keilmuan agama yang moderat, tulus, ikhlas, dan toleran.[116] Dalam aplikasinya, penyelenggaraan pembelajaran dan penyampaian misi keagamaan harus mempertimbangkan aspek geografis, budaya, bahasa, etnik, ras dan golongan.[117]

Secara empiris, ketika Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan tentang pesantren, ia mengemukakan bahwa di dunia pesantren, ajaran Islam diajarkan dengan komprehensif, sehingga yang tampak dari ajaran Islam itu adalah substansinya, yakni paham Islam yang ramah –bukan Islam yang marah–, Islam yang membawa prinsip *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (seimbang). Tiga kriteria inilah yang disematkan oleh Lukman Hakim Saifuddin sebagai manifestasi dari ajaran Islam *Rahmatan lil 'Alamin* yang menjadi keniscayaan kita bersama untuk dipahami, diletasrikan dan diamalkan. Oleh sebab itu, pesantren yang asli dari warisan budaya Nusantara adalah pesantren yang mengajarkan tradisi Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*.[118]

Demikian juga tradisi birokrasi yang dibangun oleh beliau mengajarkan lima budaya kerja yang mencerminkan dari nilai-nilai ajaran Islam *Rahmatan lil 'Alamin*tersebut. Oleh sebab itu, dalam berbagai kesempatan beliau selalu menegaskan pentingnya

---

[116]MuhSainHanafy, "Pendidikan Multikultural dan Dinamika Ruang Kebangsaan", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 124.

[117]Sapendi, "Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Pendidikan Tanpa Kekerasan, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No 1 (2015), hlm. 98.

[118]Lukman Hakim Saifuddin, *Amanat Menteri Agama RI Sebagai Pembina Upacara Pada Acara Penutupan Perkemahan Jambore Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah*, Karanganyar, 26 Februari 2016

memahami, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Sebab, nilai-nilai tradisi ajaran Islam itu yang dapat mengayomi masyarakat Indonesia yang majemuk.[119]

Secara normatif, Islam *Rahmatan lil 'Alamin*dapat ditelusuri dari nilai-nilai normatif ajaran agama Islam dalam sejumlah nash al-Qur'an, yakni (a) Q.S al-Syura: 38, yang mengajarkan perlunya mentaati Tuhan, mendirikan shalat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan kesadaran untuk berbagi rezeki pada sesamanya; (b) Q.S al-Hadid: 25 yang mengajarkan perlunya berpedoman pada al-Qur'an, berbuat adil, dan mendayagukan ciptaan Allah swt untuk kemaslahatan; (c) Q.S al-A'raf yang mengajarkan perlunya menegakkan kebenaran dan keadilan. Sementara itu, secara historis-empiris, Nabi Muhamamd saw mengajarkan perlunya berpaham multikultural sesuai dengan prinsip Piagam Madinah.[120] Bahkan Nabi saw mengajarkan perlunya menyambung tali persaudaraan antar sesama umat manusia meskipun berbeda agama.[121]

Dengan karakter berpikir dan kiprah Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama RI dan tokoh agama, ia memiliki keunikan, yakni pemikiran Lukman itu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam universal, yakni Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, Islam yang moderat, toleran dan seimbang, sehingga pemikiran Lukman dapat menjadi payung dalam memajukan tata kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk sesuai dengan prinsip salah satu pilar kebangsaan, *Bhinneka Tunggal Ika*,[122] dan juga Lukman Hakim Saifuddin berada dalam gejolak pergulatan golongan Islam

---

[119]Desmon Andrian dkk, *Spirit Moderasi Beragama, Ucapan dan Tindakan Lukman Hakim Saifudddin*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 21.

[120]AchmadRois,"Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah",*Epistemé, Vol. 8, No. 2, Desember 2013, hlm. 313-314.*

[121] M. Anang Sholikhudin, "Praktik Pluralisme di Pondok Pesantren Ngalah", *Dirāsāt* Volume 2 Nomor 2, hlm. 280; Bandingkan dengan Abū AbdAllāhMuḥammad b. Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 8, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964)

[122]Ali Zawawi, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 25.

formal/radikal dengan golongan Islam moderat/golongan nasionalis-religius. Lebih lanjut, Lukman sebagai tokoh agama dan Menteri Agama mendapatkan respons dari berbagai kalangan, yakni *Pertama*, Bonaran Tigor Naipopos, Wakil Ketua Setara Institute, mengatakan bahwa Lukman Hakim Saifuddin mendapat banyak pujian karena ia merupakan sosok Menteri yang siap meluangkan waktu untuk berdialog dengan pihak-pihak penganut agama minoritas. Ia merupakan sosok yang terbuka dan mau mendengar aspirasi golongan-golongan agama dari dekat.*Kedua*, Elga Sarapung, Tokoh Dialog Antar Agama asal Yogyakarta, menyampaikan bahwa Lukman sebagai sosok Menteri Agama telah berhasil mengelola perbedaan yang ada di Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang beradab. Ia mampu memposisikan diri di tengah dalam pergaulan hidup beragama, bermasyarakat dan berbangsa. *Ketiga*, Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, memberikan penilaian bahwa Lukman sebagai Menteri Agama merupakan sosok yang tepat karena ia memiliki pemikiran dan perilaku yang inklusif sehingga ia mudah diterima oleh berbagai kalangan.[123]

Keempat, Jailani, masyarakat Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, juga mengakui bahwa Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, tetap konsisten dengan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dilihat di media cetak, elektronik, dan online.[124]*Kelima*, Mukhtar Hadi mengemukakan bahwa sesuai dengan sikap keagamaan Nahdlatul Ulama sebagai latarbelakangnya, Lukman Hakim Saifuddin memiliki sikap yang tegas dalam menolak gerakan radikalisme dan memiliki sikap akomodatif terhadap dinamika budaya seperti al-Qur'an langgam

[123]Ali Zawawi, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 160-161, 170-171, dan 190-191.

[124]Hasil Wawancara dengan Jailani, warga masyarakat Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tanggal 25 Novemver 2018.

Jawa.[125]*Keenam*, M Nasron HK mengemukakan bahwa Lukman Hakim Saifuddin adalah sosok Menteri Agama yang bertanggung jawab, sudah banyak berbuat untuk masyarakat dan bijaksana dalam mengambil keputusan.[126]*Keenam*, Rohimin mengemukakakan bahwa Lukman Hakim Saifuddin telah menanamkan pemikiran moderat, toleran dan pluralis. Di samping itu, ia sudah membangun tradisi berpikir yang tawazun, tasamuh dan tasawuth.[127]

[125]Wawancara dengan Dr Mukhtar Hadir, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, tanggal 25 November 2018.

[126]Hasil Wawancara dengan M Nasron HK, Da'i Propinsi Bengkulu, yang juga Direktur Ma'had al-Jami'ah IAIN Bengkulu,Juli 2018.

[127]Hasil Wawancara dengan Prof Dr H Rohimin, Ketua MUI Propinsi Bengkulu, Agustus 2018.

BAB III
PARADIGMA IJTIHAD ISLAM KEBANGSAAN LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Dalam budaya masyarakat Indonesia, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menjadi pusat alternatif pendidikan dan pembelajaran agama Islam hingga kini. Pesantren menjadi salah satu alternatif persemaian dan pendidikan keagamaan yang menanamkan nasionalisme mulai sejak berdirinya di wilayah Nusantara. Ia mengajarkan kepada generasi bangsa untuk bisa membangun kesadaran beragama, bermasyarakat dan berbangsa yang ramah dan damai serta terbuka. Hasil penelitian Abdul Djamil yang berjudul*Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak,* terbitan *LKi*S, Yogyakarta, 2001, Yogyakarta, menyebutkan bahwa pendidikan pesantren telah berhasil menanamkan nilai-nilai profetik yang dilandasi dengan spirit gerakan perubahan sosial sebagaimana paradigma pendidikan K.H. Ahmad Rifa'i untuk memajukan generasi umat dan bangsa.[128] Dalam kerangka perubahan sosial, Manfred Ziemek dalam penelitiannya yang berjudul *Pesantren Dalam Perubahan Sosial,* terbitan P3M, Jakarta, 1986, juga menyatakan bahwa pesantren sebagai tradisi pendidikan asli Indonesia mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan lingkungan masyarakat Nusantara, sehingga pesantren mampu memainkan penting dalam melakukan perubahan sosial, tidak hanya itu, tradisi beragama di masyarakat juga menjadi bagian dari pelajaran pesantren. Kondisi ini menandakan bahwa pesantren pada dasarnya telah mengajarkan cara berpikir dan berpaham keislaman yang berlandasakan tradisi hidup masyarakat dan berbangsa.[129]

---

[128] Dakir & Umiarso, "Pesantren Dan Perubahan Sosial: Optimalisasi Modal Sosial Bagi Kemajuan Masyarakat", *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Volume XIV, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm. 11.

[129] Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial,* (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 96-100.

Hasil penelitian Nur Efendi dalam buku yang berjudul *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teoritik dan Praktik Pengelolaan Perubahan sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan Menatap Tantangan Masa Depan*, Terbitan Teras, Yogyakarta, 2014 menyebutkan bahwa budaya belajar dan pendidikan pesantren yang asli lahir dari budaya Nusantara memiliki spirit dan strategi pengajaran yang menanamkan pelajaran agama Islam yang relevan dengan budaya masyarakat Nusantara, sehingga para alumni pesantren mampu mendorong gerakan perubahan sosial. Secara historis, pesantren itu tidak lepas dari ciri khasnya yang pada umumnya lahir dari wilayah pedesaan dan alamiah, tetapi kiprah kiai yang sangat dengan masyarakat, maka masyarakat juga mendukung orientasi perjuangan kiai yang berjuang untuk memajukan umat dan bangsa serta melepaskan dari segala belenggu kebodohan dan penjajahan. Oleh sebab itu, pelajaran agama dan nasionalisme menjadi satu bagian yang saling terkait sebagai satu bangunan keilmuan dan ijtihad keagamaan yang dibangun dan diajarkan di pesanren.[130]

Dari lingkungan pesantren itulah, maka tradisi ijtihad keagamaan Islam lahir dan berkembang dengan komitmen yang kuat untuk menjaga kemaslahatan hidup umat beragama dan umat manusia secara bersamaaan yang hidup dalam satu wilayah georafis yang diikat dalam satu spirit kebangsaan.

A. Prinsip Ijtihad Kebangsaan

Nasionalisme merupakan realitas hidup bangsa di dunia global modern yang keberadaannya menjadi kebutuhan esensial dalam membangun tata kehidupan berbabangsa dan bernegara. Rasa kebangsaan yang baru sangat dibutuhkan agar manusia dapat mempertahankan harkat dan martabat manusiawinya. Ada beragam macam jenis nasionalisme, misalnya nasionalisme yang lahir dari

[130] Dakir & Umiarso, "Pesantren Dan Perubahan Sosial: Optimalisasi Modal Sosial Bagi Kemajuan Masyarakat", *Al-A'raf*, Vol. XIV, No. 1, Januari – Juni 201, hlm. 10.

adanya kesadaran akan kebersamaan dalam satu teritorial, sehingga bata teritorial yang menentukan satu bangsa (ikatan daerah) dan ada juga nasionalisme berdasarkan ikatan yang berdasarkan pada kesamaan dalam warisan budaya dan agama (ikatan darah), serta nasionalisme juga ada yang dibangun berdasarkan kesetiaan mutlak dan buta terhadap raja atau atasan atau terhadap sekutu. Sementara itu, Muh Yamin memberikan kriteria kebangsaan berdasarkan pada asas kesamaan budaya, rumpun, keturunan, dan ikatan primordial lainnya, sehingga dalam pemikiran kebangsaan Indonesia meliputi semua suku bangsa dalam tumpah darah nusantara atau daerah. Kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar *ius soli* yang mengikat manusia Indonesia dalam sebagai masyarakat senasib dan juga nilai-nilai kerakyatan.[131]

Dalam upaya melestarikan budaya keagamaan untuk memperkuat nasionalisme di masa kini, Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan:

Pertama, pada tataran konsep, istilah "nasionalisme" menjadi perdebatan di awal munculnya. Sejak pertama kali dipergunakan pada akhir abad 18-an, hingga abad 21, istilah "nasionalisme" masih belum memiliki rumusan definisi yang disepakati semua pihak dan menjadi diskusi yang tanpa akhir. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan zaman, konsep nasionalisme mulai memiliki pengertian yang semakin jelas dan beragam maknanya, misalnya nasionalisme dipahami sebagai bentuk kesetiaan (loyalitas) dan kebanggaan (*pride*) terhadap negerinya karenalatar kesamaan suku/ras, teritori, budaya, bahasa dan atribut lain. Pada awalnya, konsep nasionalisme dirumuskan sebagai "negara bangsa" (*nation state*), yakni sebuah negara yang dibingkai dan dibangun berlandaskan keyakinan (*political belief*) dan pengakuan (*recognition*) terhadap kesamaan entitas politik dan entitas budaya warga negaranya. Konsepsi nasionalisme itu kemudian melahirkan

[131] Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 3-9.

beragam bentuk, misalnyanasionalisme chauvinistis, nasionalisme etnosentris, nasionalisme relijius, dan nasionalisme demokratis. Selama sekitar dua abad, bentuk-bentuk nasionalisme yang berdasarkan pada kesamaan entitas berkembang subur dan eksis di berbagai belahan dunia, sehingga setiap warga negara merasa bangga hidup di suatu negara dengan adanya kesamaan lata belakang entitas. Namun, dengan adanya kemajuan pemikiran kemanusiaan, IPTEK, dan kesadaran keterbukaan, konsep nasionalisme yang berbasis pada adanya kesamaan entitas semakin rentan berhadapan dengan perubahan dan pergeseran hidup manusia.[132]

> Di abad 21, fenomena kebangkitan nasionalisme baru mulai menampak secara signifikan. Dalam konteks inilah, kiranya forum simposium internasional kali ini, dapat merumuskan apa sebenarnya nasionalisme itu sendiri sebagai entitas politik (*political entity*) maupun sebagai entitas kebudayaan (*cultural entity*). Lebih praktis lagi, diharapkan simposium menghasilkan konsep yang pasti, operasional, dan prospektif bagi nasionalisme Indonesia yang dapat dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.[133]

Kedua, pada era global, terutama pada beberapa dekade tarakhir, nasionalisme sebagai entitas politik maupun entitas budaya semakin dipertanyakan eksistensinya. Apakah nasionalisme sebagai entitas politik atau entitas budaya masih diperlukan kehadirannya dalam sebuah negara ataukah sudah tergantikan dengan universalisme atau kosmopolitanisme? Persoalan politis di atas menimbulkan berbagai fenomena baru dalam tata kehidupan

---

[132] Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan*International Symposium On Religious Literature & Heritage* Ke 2, Bogor, Selasa, 18 Juli 2017.

[133] Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan*International Symposium On Religious Literature & Heritage* Ke 2, Bogor, Selasa, 18 Juli 2017.

nasionalisme. Survei PEW (lembaga riset terpercaya berpusat di Washington, USA), tahun 1991-1999 menyebutkan bahwa sekitar 12 negara di Eropa Timur kehilangan kebanggaan rasa kebangsaannya. Bahkan negara-negara bekas Uni Sovyet, merasa lebih bangga mengaku sebagai orang Rusia (Russian) dari pada mengaku sebagai bangsa "Armenian, Kazakh, Turkmens, dan Belarusans. Demikian juga warga negara di sejumlah negara Eropa Barat lebih senang mengaku sebagai "orang Eropa", dari pada mangakui sebagai "bangsa Jerman, Ceko". Fenomena tersebut menjadi trend di berbagai belahan dunia, bahkan yang mendorong munculnya fenomena tersebut karena adanya arus pergerakan universalisme, globalisme, atau idiologi universal serta globalisasi yang meretas sekat geografis, ekonomi, kebudayaan, dan kepentingan kemanusiaan. Oleh sebab itu, kita harus selalu mencermati dan menjawab dinamika peta model nasionalisme di berbagai belahan dunia, mampu menganalisis faktor-faktor dominan pembentuk nasionalisme, dan mampu merumuskan model ideal nasionalisme yang relevan dengan perkembangan zaman.[134]

Ketiga, pada tataran politik nasional, diskusi tentang nasionalisme di Indonesia merupakan agenda penting, relevan, dan sangat strategis. Berbagai kasus radikalisme dan penyimpangan sosial serta ideologi transnasional yang mengancam semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI perlu diantisipasi dan dihadapi. Arus gerakan ideologi transnasional—baik berbasis pada agama maupun liberalisme—juga menjadi ancaman bagi eksistensi ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI yang notabene merupakan "entitas politik dan entitas budaya" nasionalisme Indonesia. Oleh sebab itu, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan perlunya kita untuk memperteguh nasionalisme Indonesia dan mengatasi tantangan terdominan bagi keberadaan nasionalisme Indonesia dan

[134] Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan*International Symposium On Religious Literature & Heritage* Ke 2, Bogor, Selasa, 18 Juli 2017.

membangun strategi efektif dalam menguatkan nasionalisme Indonesia dalam bingkai NKRI.[135]

Dengan meminjam kerangka berpikir Muhami Munir Muhammad Thahir asy-Syawwaf dapat disimpulkan bahwa *Ijtihâd* sebagai segala daya upaya dari seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menggali ketentuan ajaran Islam dari sumber aslinya setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, yakni (a) ada profesionalitas mujtahid yang ditandai dengan kompetensinya yang mumpuni di bidang keilmuan al-Qur'an dan al-hadis serta khazanah keilmuan Islam, di samping itu memiliki komitmen mencetuskan hukum yang terbaik yang ditandai sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang mengakomodir kesesuai dengan sumber aslinya dan kemaslahatan umat yang hakiki; (b) adanya integritas yang berarti bahwa seorang mujtahid tidak hanya menguasai al-Qur'an dan hadits serta khazanah keilmuan Islam tetapi juga berakidah Islam; (c) adanya inovasi sebagai karakter asasi dari ijtihad yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid sehingga ia dinamis, progresif dan terbuka terhadap adanya perubahan, tidak stagnan, dalam masalah mu'amalah (*ma'qul al-makna*); (d) adanya tanggung jawab yang berarti seorang mujtahid bukanlah orang yang merasa benar sendiri atau merasa paling benar, tetapi ia selalu mengakui bahwa yang paling tahu mengenai kebenaran hanyalah Allah swt, sehingga sumber aslinya yang tidak boleh berubah hanyalah al-Qur'an dan hadits, sedangkan karya ijtihadnya dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan kemashalatan umat; dan (e) adanya keteladan yang selalu ditampilkan seorang mujtahid, sehingga sesuai dengan prinsip ilmu agama Islam itu bahwa ilmu itu bukan hanya untuk diketahui, tetapi perlu diamalkan.[136]

---

[135] Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan*International Symposium On Religious Literature & Heritage* Ke 2, Bogor, Selasa, 18 Juli 2017.

[136]Muhâmî Munîr Muhammad Thâhir asy-Syawwâf, *Tahâfut al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah* (Cyprus: Al-Syawwâf li al-Nasyr wa al-Dirâsât, 1993), hlm. 450; lihat dan bandingan bahasa buku ini dengan karya Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gu Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba Press, 2013);

Dari kerangka ijtihad Islam tersebut, kita dapat menganalisis dan menjabarkannya dari paradigma lima budaya kerja Kementerian Agama yang digagas oleh Lukman Hakim Saifuddin, yakni *Pertama*, seorang mujtahid harus memiliki integritas dalam artian bahwa seorang mujtahid dalam Islam tidak hanya memahami ajaran agama Islam secara utuh, tetapi juga harus seorang Muslim, sehingga di sini Lukman Hakim Saifuddin menyebutkanya harus memiliki "*keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar*". Seorang mujtahid harus memiliki komitmen daya jihad yang kuat sehingga harus memiliki niatan yang baik dan menggunakan segala daya upaya untuk menemukan ketentuan ajaran Islam, bersifat zuhud, qanaah, dan terpercaya, dalam melakukan ijtihad, yang berarti bahwa seorang mujtahid harus "*bertekad dan bekemauan untuk berbuat yang baik dan benar; berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; menolak korupsi, suap, atau gratifikasi*". *Kedua*, seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang utuh tentang al-Qur'an dan Sunnah serta khazanah keilmuan Islam, sehingga seorang mujtahid harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menggali dan mengeluarkan ketentuan ajaran Islam dari sumbernya sesuai dengan kebutuhan zamannya, yang dalam bahasa Lukman Hakim Saifuddin di sini disebut dengan *profesionalitas*, yakni"*bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik"* yang ditandai dengan;*"Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan; Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja; Melakukan pekerjaan secara terukur; Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu*." *Ketiga*, seorang mujtahid harus memiliki kemampuan inovatif dalam menjawab perkembangan zaman. Di sini Lukman Hakim Saifuddin memiliki komitmen yang teguh dalam menerjemahkan nilai-nilai inovasi dalam upaya

---

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saifullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 388-399.

melakukan ijtihad keislaman, yakni mampu menerima perkembangan zaman dalam melakukan berbagai aktifitas keagamaan atau kebangsaan-pemerintahan, yakni menerima dan menjawab perkembangan zaman dan waktu sebagai bagian upaya melakukan ijtihad keislaman dan selalu terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif. Ijtihad sebagai sebuah upaya dengan segala daya untuk menemukan ketentuan hukum baru dalam ajaran Islam menjadi salah satu bentuk mencari terobosan dan solusi baru dalam memecahkan masalah, dan tidak hanya itu tetapi juga dapat menggunakan ilmu-ilmu sains untuk memecahkan kasus-kasus aktual berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.*Keempat*, seorang mujtahid tentu saja harus akan mintai pertanggung jawaban oleh Allah swt, sehingga seorang mujtahid selalu berhati-hati dalam menelorkan sebuah ketentuan hukum dalam ajaran Islam, sehingga ia melakukan segala daya upaya untuk mencapai ketentuan itu dengan selalu bertanggung jawab lahir dan batin dan tidak pernah merasa paling benar, sehingga ia selalu mengakhiri karyanya "*wallahu a'lam bi al-shawab*", yakni "Bekerja secara tuntas dan konsekuen" yang ditandai dengan; "*Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan; Mengatasi masalah dengan segera; dan Komitmen dengan tugas yang diberikan*". *Kelima*, seorang mujtahid selalu menjaga kehormatannya dan memberikan teladan dalam perilakunya, sehingga segala hal yang baik yang diketahui biasanya selalu dikerjakan dan segala hal yang buruk yang diketahui ditinggalkannya. Ia selalu memberikan keteladan bagi umat dan masyarakat, yakni "Menjadi contoh yang baik bagi orang lain" dengan indikasi; "*Berakhlak terpuji; Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, dan adil; Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat; Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri*".[137]

[137] Lukman Hakim Saifuddin, *Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian*

Paradigma budaya kerja Kementerian Agama itu pada dasarnya merupakan bangun nilai-nilai luhur yang hendak ditanamkan kepada segenap umat beragama/bangsa Indonesia, sehingga umat beragam dapat beragama dengan niat, cara dan tujuan yang baik, bukan hanya tujuan saja yang baik tetapi caranya tidak baik sebagaimana banyak dilakukan kaum fundamentalis yang memiliki tujuan menegakkan *kalimatillah* tetapi dengan cara-cara teror dan kekerasan. Berangkat dari kondisi itu, gagasan Lukman Hakim Saifuddin itu memiliki relevansi dengan pemikiran Abdurrahman Wahid yang mengutip ayat al-Qur'an berikut:[138]

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> Artinya: Dan janganlah kamu mencampuradukkan antara kebenaran dan kebathilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah, 2: 42).

Agama RI,https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/uploads/2016/09/5_nilai_budaya_kemenag_compressed.pdf, diakses 30 November 2018

[138] KH Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, Tri Agus Siswowiharjo dkk, (peny), (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 184-185.

Adapun konsepsi kebangsaan dalam Islam diutarakan melalui al-Qur'an dengan istilah "*syu'ban*" yang bermakna "bangsa". Demikian juga al-Qur'an Surah al-Hujarat (49):13 yang mendukung paham kebangsaan. Kata "*kauman*" yang disebutkan sebanyak 322 kali dalam Al-Qur'an, misalnya Q. S. al-Hujarat (49): 11. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan tidak anti kebangsaan.[139]Dalam hal ini, paradigma ijtihad Islam kebangsaan merupakan upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam bingkai kebangsaan di Indonesia. Sejak era reformasi, arus budaya global dan informasi telah mempengaruhi gagasan dan paradigma berpikir bangsa Indonesia. Di samping dampak positif adanya kemajuan di bidang demokratisasi, tetapi juga ada efek negatif yang terasa di antaranya gerakan pemikiran keislaman yang berusaha mendikotomikan antara nilai-nilai kebangsaan dan keislaman serta menjadikan Indonesia berada di bawah keislaman. Walaupun gerakan pemikiran keislaman tersebut bukalah arus utama, tetapi upaya mendeskriditkan nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an sudah jelas dilakukan oleh kalangan gerakan radikal dan ekstrim keagamaan, yakni *Pertama*, gerakan radikal dan ekstrim keagamaan itu telah berusaha menggugat konsep dasar bernegara Indonesia. *Kedua*, era kebebasan politik dan informasi telah dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, termasuk isu agama dijadikan alat legitimasi politik. Gerakan radikal dan ekstrim keagamaan itu melupakan sejarah kebangsaan Indonesia yang telah berjalan istiqamah dalam relasi agama (Islam) dan kebangsaan yang serasi, misalnya adanya penghapusan terhadap tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam Sidang BPUPKI 18 Agustus 1945 menjadi indikasi bahwa para tokoh Islam Indonesia mampu bersikap bijaksana dan menghormati konsep negara bangsa yang bersifat kebinekaan, eksitensi negara bangsa, NKRI dan Pancasila, bukanlah

[139] Wibi Aulianto, *Kebangsaan dalam Perspektif Alquran: Islam dan Kebangsaan*,http://www.lppmnuansa.org/2017/02/kebangsaan-dalam-perspektif-alquran.html, diakses 22 Februari 2018.

ancaman bagi Islam, tetapi justru kehadirannya saling melengkapi dan memperkuat. Tidak hanya itu, eksistensi agama (Islam) telah menjadi bagian dari usaha mendirikan dan melahirkan negara bangsa, bahkan merawatnya.[140]

Adapun kebinekaan bagi bangsa Indonesia menjadi keniscayaan yang perlu dijaga karena bangsa Indonesia terbangun dari latarbelakang yang beragam, tetapi prasyarat tegaknya semangat kebangsaan dan penerimaan terhadap kebhinekaan dapat terwujud hanya jika ditopang oleh penegakkan keadilan sosial dan hukum. Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial bisa menjadi pemicu lahirnya konflik dan perpecahan serta suburnya gerakan radikalisme yang dianggap sebagai tawaran surgawi di bumi yang sudah mustahil didapatkan. Dengan demikian, usaha merawat kebhinekaan harus berjalan seirama dengan penegakkan keadilan sosial dan penegakkan hukum. Adapun solusinya adalah paradigma Islam yang membawa rahmat bagi segenap alam semesta (QS: Al Anbiya, ayat 107) yang dibangun dengan beberapa prinsip, yakni *Pertama*, paradigma ijtihad keislaman yang menjawab seluruh persolan melalui prinsip *tawassuth* yang berarti moderat, tidak ekstrem liberal-sekuler atau fundamental-radikal. *Kedua*, paradigma ijtihad keislaman yang menggunakan prinsip *tawazzun* yang berarti seimbang dalam menggunakan kaidah, nas, rasio, dan realitas.*Ketiga*,paradigma ijtihad keislaman yang menggunakan prinsip *tasamuh* yang bermakna berani menjunjung tinggi sikap toleran. Dengan paradigma ijtihad keislaman tersebut akan terwujud tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih humanis, damai, rukun, dan ramah, bisa bergembira dengan perbedaan dan berada dalam kehidupan yang tercukupi.[141]

---

[140]Muhaimin Iskandar, *Sejarah Islam dan Kebangsaan di Indonesia dalam Bingkai Kebhinekaan*, http://dpp.pkb.or.id/content/sejarah-islam-dan-kebangsaan-di-indonesia-dalam-bingkai-kebhinekaan, diakses 22 Februari 2018

[141]Muhaimin Iskandar, *Sejarah Islam dan Kebangsaan di Indonesia dalam Bingkai Kebhinekaan*, http://dpp.pkb.or.id/content/sejarah-islam-dan-kebangsaan-di-indonesia-dalam-bingkai-kebhinekaan, diakses 22 Februari 2018

B. Paradigma Ijtihad Tawazun

Ijtihad sebagai usaha optimal dari seorang mujtahid dalam menggali hukum/syariat Islam dalam merumuskan hukum berdasarkan dalil yang rinci merupakan keniscayaan yang harus dilakukan karena ajaran Islam sebagai ajaran universal harus terus berkembang, sedangkan nas hukum/ajaran Islam sudah final tidak bertambah lagi, sehingga untuk mengembangkan dan menjawab realitas aktual kehidupan duniawi perlu dilakukan ijtihad. Adapun syarat mujathid memiliki kemampuan untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah secara utuh dan bukan urusan ubudiyah. Disamping syarat lainnya yang terdapat dalam sejumlah kitab ushul fiqih.[142]

Ijtihad sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menggali ketentuan ajaran Islam/syariat Islam dengan menggunakan metode istimbath yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah menjadi keniscayaan. Apalagi ajaran al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum yang integral yang mengatur urusan duniawi dan urusan ukhrawi, sehingga antara akidah, syariat dan akhlak menjadi satu kesatuan yang saling berkelindan. Melalui pengamatan alam semesta, kita bisa meyakini bahwa keraturan alam semesta ini merupakan wujud dari ke-Mahakuasa-an Allah swt. Lewat ilmu pengetahuan alam, kita bisa mengamati dan mendalami hukum-hukum fisika dan kimia sertabiologi, seperti hukum proporsi, hukum konservasi, hukumgerak, hukum gravitasi, hukum relativitas. Demikian juga tanpa kita sadari,tubuh mengatur suhu badan, tekanan darah, pencernaandan tugas-tugas lain yang banyaknya. Adapun pusatpengatur tubuh, yakni otak yang mempunyai kemampuan untuk merekam danmenyimpan informasi dibandingkan dengan alat teknologi buatan manusia. Dalam kaitan dengan paradigma ijtihad moderat ini, KH Ali Yafie membangunnya dengan beberapa prinsip: *Pertama*, paradigma

[142] Muhami Munir Muhammad Thahir asy-Syawwaf, *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah* (Cyprus: Asy-Syawwaf li an-Nasyr wa ad-Dirasat, 1993), hlm. 450-451; lihat dan bandingan bahasan buku ini dengan karya Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gu Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba Press, 2013).

ijtihad berlandaskan pada argumentasi realitas empiris sebagaimana praktik ijtihad mashlahah, sehingga kegiatan ijithad ini dibangun untuk mengamati, meneliti, memikirkan dan mempelajari realitas empiris sebagaimana diperintahkan untuk mengamati alam semesta. Kedua, paradigma ijtihad yang berlandaskan pada argumentasi rasional sebagaimana praktik qiyas.[143]

(Menag Tutup Festival Tajug Cirebon)[144]

Islam sebagai agama moderat mengajarkan ijtihad yang moderat yang berlandaskan atas pertimbangan rasional dan empiris

[143]KH Ali Yafie, "Konsep-konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 85-86.

[144]https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220307/menag-tutup-festival-tajug-cirebon-, diakses 26 Oktober 2018.

tersebut. Moderasi Islam itu dapat dilihat dari ajarannya yang selalu memperhatikan kemaslahatan umat manusia secara hakiki, bukan hanya tuntutan pemberlakuan semata terhadap ajarannya. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, ulama sebagai penjaga agama memiliki peran penting dalam membina dan mendidik umat, bahkan juga dalam menjaga stabilitas warga negara, sehingga cepat atau lambat peran ulama walaupun sempat dipandang sebelah mata, tetapi akhirnya peran ulama diakui bukan hanya di Indonesia sebagai pembawa misi Islam *rahmatan lil alamin*, tetapi juga di dunia. Buktinya hingga kini, ada sejumlah negara yang belajar terhadap sistem organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama yang dianggap sukses mengajarkan Islam moderat, sehingga peran-peran agama Islam dapat bersinergi dengan negara yang berpenduduk majemuk ini.

> Pernah ada satu masa di mana ulama-ulama tradisional dipandang sebelah mata. Perannya dalam membangun bangsa tak diperhitungkan bahkan cenderung diabaikan. Tak sedikit yang memandang bahwa ulama tradisional adalah beban pembangunan. Mereka layak menjadi arsip masa lalu dan kurang relavan sebagai modal untuk membangun masa depan. Padahal, sekiranya jujur membaca sejarah, kita akan menjumpai banyak fakta perihal peran signifikan ulama tradisional dalam membangun bangsa. Contoh yang secara mudah kita ambil adalah fenomena Kiai Hasyim Asy'ari. Walau dalam kurun waktu lama kurang mendapat penghormatan dari kalangan luar Nahdlatul Ulama, tak bisa dipungkiri sumbangsih Kiai Hasyim Asy'ari dalam memajukan pendidikan dan membersihkan Indonesia dari onak penjajahan.[145]

[145] "KH. Muhammad Hasyim Asy'ari mendapatkan sebuah kemewahan yang jarang dimiliki para pelajar Islam segenerasinya. Setelah malang melintang belajar di sejumlah pesantren tanah air, Kiai Hasyim pergi jauh melanjutkan studi ke tanah Hijaz. Di Mekah-lah Kiai Hasyim terakses pada sentra ilmu pengetahuan Islam. Ia berguru pada banyak ulama yang ahli di

Perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dalam memajukan fungsi agama sangat diperhitungkan terutama jika dihubungan dengan keterlibatannya dalam gerakan nasional Indonesia. Perjuangan itu tidak lepas dari paradigma ijtihad keislaman Kiai Hasyim Asy'ari yang memiliki paham *Ahlus Sunnah wal Jamaah* yang bertumpu pada cara berfikir *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal*. Dengan paradigma ijtihad *tawassuth* itu, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) hingga sekarang terus konsisten merawat moderatisme Islam sebagai jalan berpikir dan ijtihad untuk membangun wacana keislaman di Indonesia untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil alamin* yang berbasis pada tradisi dan kebudayaan masyarakat

---

berbagai bidang. Termasuk juga berguru pada ulama nusantara yang sudah lebih dulu bermukim di sana. Mula-mula ketika sampai di Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari berguru pada Kiai Mahfudz Termas, ulama Nusantara yang pertama kali mengajar kitab *Shahih al-Bukhori* di Mekah. Kiai Mahfudz memang dikenal sebagai ulama hadits. Secara keilmuan tampaknya Kiai Hasyim Asy'ari banyak dipengaruhi Syaikh Mahfudz. Terbukti ketika kelak pulang ke tanah air, Kiai Hasyim membangun pesantren dengan fokus yang lebih dalam pada pengajaran hadits, sehingga Pesantren Tebuireng dikenal sebagai pesantren hadits. Tak berhenti pada Syaikh Mahfudz, Kiai Hasyim Asy'ari muda juga mendalami fikih. Dalam bidang fikih, Kiai Hasyim dibimbing oleh Kiai Ahmad Khatib. Bahkan, melalui Ahmad Khatib ini terakses pada ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh di Mesir. Namun, walau membaca buku-buku Abduh, Kiai Hasyim tak terjatuh menjadi "abduhis". Tak seperti Abduh, Kiai Hasyim masih menolak pemikiran anti-madzhab. Tapi, Kiai Hasyim pun tak terkungkung dalam satu madzhab. Kiai Hasyim membuka kemungkinan bagi terjadinya perpindahan madzhab, sejauh dilakukan dalam kerangka madzhab fikih yang empat; Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Kiai Hasyim juga belajar pada Kiai Nawawi Banten. Sebagai ulama ensiklopedis, Kiai Hasyim Asy'ari belajar beragam ilmu-ilmu keislaman pada Kiai Nawawi, mulai dari fikih, ushul fikih, tafsir, dan hadits. Tak hanya belajar pada ulama Nusantara, Kiai Hasyim juga belajar pada sejumlah ulama hebat saat itu, seperti Syaikh Syatha dan Syaikh Dagistani. Berguru pada sejumlah ulama ahli itu mengantarkan Kiai Hasyim Asy'ari pada derajat keilmuan yang tinggi. Cara berfikir Kiai Hasyim menjadi sangat khas. Beliau tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun kiri. Ia tak sekeras Kiai Ahmad dalam menolak tarekat. Ia juga bukan penganjur tarekat. Bahkan, dalam kondisi tertentu, ia melarang santrinya mengamalkan tarekat karena khawatir aktivitas tarekatnya mengganggu aktivitas belajarnya. Tentu jika sudah sampai waktunya, Kiai Hasyim Asy'ari tak mengharamkan sekiranya sebagian santrinya hendak mengamalkan tarekat". Lukman Hakim Saifuddin, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017*

Nusantara.[146] Signifikasi pemikiran ijtihad moderat Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri dan tokoh nasional yang memiliki pengaruh hingga kini harus terus dikembangkan. Apalagi melihat dinamika organisasi keagamaan transnasional yang membawa paham radikalisme, bahkan terorisme[147]yang berpotensi menggerogoti Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai agama.[148]

Ideologi radikalisme dan teorisme tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, dalam ajaran Islam perlakuan yang setara dan adil terhadap sesama umat manusia menjadi titik pijak dalam membangun tata kehidupan duniawi, sehingga ajaran Islam melarang adanya tindakan diskriminasi antara sesama umat manusia. Oleh sebab itu, dalam membangun tata kehidupan bernegara. Ajaran Islam juga mengajarkan perlunya perlindungan dan perlakuan yang adil dan setara di antara sesama warga negara. Semua warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Demikian juga Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kedudukan manusia yang sama di hadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketaqwaannya, sehingga sesama anak manusia tidak boleh saling menindas atau saling menjatuhkan, tetapi sebaliknya, mereka harus

---

[146] Lukman Hakim Saifuddin, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017*

[147]Gerakan radikalisme keagamaan transnasional yang sangat mengancam stabilitas dan eksistensi NKRI salah satunya adalah gerakan radikalisme yang dipimpin Hambali. Gerakan radikalisme/terorisme dari hasil perencanaan Hambali –yang didukungan al-Qaeda- telah berhasil melakukan serangkaian aksi pengemboman yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya, misalnya bom Bali I yang teradi pada 12 Oktober 2002, bom Marriot yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003, dan bom kedutaan besar Australia yang terjadi pada tanggal 9 September 2004. As'ad Ali Said, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 252-258.

[148] Lukman Hakim Saifuddin, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari,*Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017

saling mengenal, saling tolong menolong,dan kerjasama dalam membangun kebaikan.[149]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

> Artinya: wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita serta menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di antara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa (Q.S. al-Hujurat, 49:13).

Paradigma ijihad moderat Kiai Hasyim Asy'ari telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam mengawal perjalanan Kemerdekaan RI, bahkan pemikiran politik Kiai Hasyim Asy'ari menjadi rujukan politik sejumlah tokoh politik karena memiliki landasan keislaman yang kuat. Salah satu contoh konkrit ijtihad moderat Kiai Hasyim Asy'ari adalah ketika terjadi terjadi silang pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam mengenai bentuk dan dasar negara, maka Kiai Hasyim memberikan jalan tengah, yakni ia menjelaskan kepada golongan Islam bahwa ajaran Islam tidak pernah memberikan ketentuan rinci mengenai bentuk pemerintahan/negara Islam. Nabi Muhammad tidak pernah memberikan pesan atau perintah untuk membentuk sistem negara/pemerintahan tertentu. Dalam salah satu pidatonya, Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan:[150]

> "Bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan. Ketika yang kita hormati Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana

[149]AbdurrahmanWahid, *Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, Tri Agus Siswowiharjo dkk, (peny), (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 185.

[150] Lukman Hakim Saifuddin, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari* Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017

memilih kepala negara. Jadi, pemilihan kepala negara dan banyak hal lagi mengenai kenegaraan tidak ditentukan, [dan umat Islam] tidak terikat untuk mengikuti suatu sistem. Semua [sistem] dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam pada setiap tempat."[151]

Pidato Kiai Hasyim Asy'ari tersebut sesuai dengan sesuai dengan isi Piagam Madinah yang memiliki pandangan bahwa negara berdasarkan pada jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberantas segala bentuk tindak kejahatan,[152] sehingga yang dituju adalah peran negara dalam menjamin terwujudnya kemaslahatan publik yang hakiki, bukan bentuk negaranya. Hal itu berarti substansi nilai-nilai keislaman yang menjadi tujuan dari adanya negara sebagaimana praktik yang terjadi di Indonesia. Walaupun Indonesia tidak mendasarkan langsung kepada al-Qur'an dan Hadis, tetapi hakikats ila-sila dalam Pancasila sebagai ideologi negara memiliki keselarasan dan kesamaan spirit dengan ajaran Islam. Dengan paradigma ijtihad keislamaan tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari berhasil meyakinkan golongan nasionalis-sekuler, bahwa Indonesia yang majemuk tidak bisa menjadi negara agama. Dengan jalan tengah tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari telah memberikan sumbangan riil terhadap pembentukan konsensus bangsa Indonesia dalam merumuskan konstitusi dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Indonesia selamat dari perpecahan.[153]

---

[151] Lukman Hakim Saifuddin, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari* Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017

[152] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 88.

[153] Lukman Hakim Saifuddin, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari* Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017

> Sikap politik yang diambil Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebabkan NU, dari dulu hingga sekarang, tetap konsisten untuk menjaga Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945-nya. Dalam fatwa jihadnya tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim Asy'ari menegaskan:*(1). Kemerdekaan Indonesia yang diproklmasikan pada tanggal 17 Agustus wajib dipertahankan; (2). Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, harus dijaga dan ditolong*.Fatwa jihad atau biasa disebut resolusi jihad terbukti menjadi faktor penentu kelangsungan hidup Indonesia sebagai negara merdeka. Dampak nyata dari fatwa jihad adalah kemerdekaan Indonesia yang sampai sekarang dinikmati oleh seluruh warga bangsa.[154]

Dalam sejarahnya, pergulatan anntara Islam dan negara memiliki hubungan yang dinamis dan dialektis, para pendiri bangsa berdialog dan berdiskusi dengan sengit, tetapi mereka tetap berada dalam koridor etis dan santun, sehingga antara golongan nasionalis-sekuler dan golongan Islam dicapai kesepakatan untuk melakukan pencabutan Piagam Jakarta dari pembukaan UUD 1945. Kahar Mudzakir, Ki Bagus Hadikusumo, Ahmad Subardjo, Abikusno Tjokrosuyono, Agus Salim, dan KH A Wahid Hasyim yang dengan lapan dada dan bijaksana menerima pencabutan Piagam Jakarta berdasarkan pertimbangan dari masing-masing yang diwakilinya.[155] Sikap dan keputusan mereka merupakan sikap negarawan yang patut dicontoh terutama di saat ini. Para pimpinan golongan agama Islam pada tanggal 18 Agustus 1945 mengambil keputusan yang sangat

---

[154] Lukman Hakim Saifuddin, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari* Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017

[155] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 191-192.

bijaksana dan mengedepankan kepentingan nasional di atas segala-galanya demi menjaga semangat persatuan Indonesia.[156]

Kondisi ini menjadi sangat penting dijadikan contoh ketika menghadapi perkembangan kekinian yang penuh dengan ujaran kebencian dalam pertarungan kontestasi politik nasional.[157] Sikap santun dan berjiwa besar serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang menjadi pegangan utama harus dicontoh generasi masa kini. Sikap inilah yang sesunguhnya juga menjadi kegelisahan Lukman, bagaimana mengajak elemen bangsa untuk mengikuti suri tauladan para pendiri bangsa yang memiliki jiwa santun, toleran, dan bijaksana dalam membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kebijakan Nawacita Presiden Jokowi yang memiliki komitmen untuk menjaga dan membangun toleransi dan kebaragaman dengan "menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan membuat pemerintah tidak absen".[158]

Dalam kerangka menghadirkan negara dalam melindungi masyarakat, Lukman juga berperan aktif dalam menjaga relasi agama dan negara secara seimbang dan menjaga hubungan antara umat beragama tetap dalam jalinan yang toleran dan rukun serta kondusif. Oleh sebab itu, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016, Lukman Hakim Saifuddin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dalam rangka menjaga dan membangun suasana

---

156 Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita…..,* hlm. 22-23.

157 "Bisnis kotor *hate speech* ini mempunyai titik temu dengan kompetisi politik. Ini dibuktikan dengan temuan atas laporan ke pihak kepolisian bahwa kejahatan siber meningkat tajam, terutama menjelang Pilkada 2017. Apa yang telah terjadi di Pilkada DKI Jakarta lalu menunjukkan bahwa speech berbasis agama, suku dan ras (SARA) menjadi wacana politik yang bisa menyeret massa yang luas dan berpotensi menciptakan ketegangan sosial". Eko Sulistyo, *Negara Hadir Melawan 'Hate Speech'*,http://ksp.go.id/negara-hadir-melawan-hate-speech/, diakses 12 September 2017

158 Eko Sulistyo, *Negara Hadir Melawan 'Hate Speech'*,http://ksp.go.id/negara-hadir-melawan-hate-speech/, diakses 12 September 2017

kondusif, kerukunan antara umat beragama dan menjaga keseimbangan hubungan agama dan negara.[159]

(Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang didampingi Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia, KH Ma'ruf Amin, Franz Magnis Suseno, dan Djaya Suprana memberikan penjelasan dalam menghadapi Pilkada Serentak. Dalam pertemuan itu hadir para tokoh agama seperti, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu, di Jakarta)[160]

Lukman sebagai seorang Menteri Agama yang juga tokoh agama moderat memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga dan membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI, sehingga hasil pertemuan dengan para tokoh agama

---

[159]*Pertemuan Dengan Tokoh Agama, Menag : Jangan Gunakan Agama di Pilkada*, http://poskotanews.com/2016/10/14/pertemuan-dengan-tokoh-agama-menag-jangan-gunakan-agama-di-pilkada/, diakses 21 November 2018

[160]*Pertemuan Dengan Tokoh Agama, Menag : Jangan Gunakan Agama di Pilkada*, http://poskotanews.com/2016/10/14/pertemuan-dengan-tokoh-agama-menag-jangan-gunakan-agama-di-pilkada/, diakses 21 November 2018

itu menghasilkan kesepakatan yang salah satunya adalah bahwa para calon pimpinan daerah yang menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 agar tidak menjadikan agama untuk kepentingan yang bertujuan provokatif.Oleh sebab itu, agama seharusnya digunakan untuk kepentingan yang positif,misalnya menjaga kerukunan antara umat beragama, persaudaraan, perdamaian, dan mendukung terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Menurut Lukman, "*Para tokoh agama menghendaki mereka yang menjadi peserta Pilkada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar memahami untuk tidak menggunakan agama yang justru bisa mengancam kerukunan kita, memecah-belah persaudaraan kita dan mengancam disintegrasi bangsa*."[161]

Untuk itu, agama sebagai landasan keyakinan umat beragama harus digunakan untuk hal-hal yang positif, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang merusak kerukunan umat, saling menjelekkan atau mendiskreditkan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Dalam kerangka itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah baik tingkat provinsi kabupaten/kota yang sedang melaksanakan Pilkada serentak harus berperan aktif dalam mendukung program Kementerian Agama tersebut dengan cara mengundang para peserta Pilkada, termasuk tim suksesnya. Demikian juga peran media yang menjadi salah satu pembahasan di dalam pertemuan tokoh agama itu, yakni bagaimana media massa juga memberikan sumbangan positif dalam menjaga dan mewujudkan kerukunan umat beragama dan perdamaian.[162]

Sarasehan ini sebagai langkah konkrit untuk memperkuat relasi agama dan budaya dan sekaligus sebagai usaha menangkal

---

[161]*Pertemuan Dengan Tokoh Agama, Menag : Jangan Gunakan Agama di Pilkada*, http://poskotanews.com/2016/10/14/pertemuan-dengan-tokoh-agama-menag-jangan-gunakan-agama-di-pilkada/, diakses 21 November 2018

[162]*Pertemuan Dengan Tokoh Agama, Menag : Jangan Gunakan Agama di Pilkada*, http://poskotanews.com/2016/10/14/pertemuan-dengan-tokoh-agama-menag-jangan-gunakan-agama-di-pilkada/, diakses 21 November 2018

gerakan infiltrasi budaya asing dan paham transnasional yang banyak mempermasalahkan relasi agama dan budaya di Indonesia yang sesungguhnya sudah terjalin baik sejak lama. Sebagai upaya membangun dialog antara norma-noma agama dengan realitas empiris, maka Kementerian Agama melihat perlunya membangun ruang untuk melakukan dialog antara agamawan, cendekiawan, dan budayawan. Kementerian Agama berharap budayawan, tokoh agama dan cendekiawan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam reaktualisasi relasi budaya dan agama di masa kini, sehingga budaya tetap menjadi wadah untuk diwarnai nilai-nilai agama dan juga bagaimana pemikiran keagamaan dapat mewarnai budaya Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia yang kaya akan akulturasi budaya dan agama dapat dikenalkan kembali pada generasi masa kini dan mendatang.[163]

(Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin bersama Agamawan-Budayawan,Radhar Panca Dahana, Abdullah Muhaimin, Acep Zamzam Noor, Agus Sunyoto, Agus

[163]Khoiron (ed.), *Gelar Sarasehan, Kemenag Bahas Reaktualisasi Relasi Agama dan Budaya*, https://kemenag.go.id/berita/read/509248/gelar-sarasehan--kemenag-bahas-reaktualisasi-relasi-agama-dan-budaya, diakses 21 Nov 2018

Noor, Alissa Wahid, Aloysius Budi Purnomo, Bhante Sri Pannavaro, Fatin Hamama, Jamhari, John Titaley, M Amin Abdullah, M Jadul Maula, Nasirun, Pandita Mpu Jaya Prema, Purwosantoso, Ridwan Saidi, Sudjiwo Agus Hadi (Sudjiwo Tedjo), Wahyu Muryadi, Wisnu Bawa Tenaya, Zakiyuddin Baidlawi ketika menutup sarasehan Reaktualisasi Relasi Agama dan Budaya di Tembi, Sewon, Bantul, Yogyakarta 03/11/2018)[164]

Hasil pertemuan itu diantaranya menyatakan: Pertama, kaum agamawan dan budayawan perlu memahami dan mengatasi disrupsi yang terjadi. *Kedua*, pengamalan agama harus *terintegrasi secara positif, konstruktif, dan produktif dengan praktik-praktik kebudayaan disetiap satuan etnik yang dimiliki bangsa Indonesia. Ketiga, pendidikan umum maupun keagamaan perlu melakukan akselerasi dengan beberapa langkah; (a)* orang tua perlu jadi guru yang pertama dalam mendidik; (b) pendidikan akhlak yang mencerahkan kalbu dengan mengedepankan keteladanan; (c) membangun bahasa agama menghindarkan diri dari bahasa intoleran dan tendensius; (d) mengatasi sikap rendah diri anak-anak didik; (e) menanamkan pemahaman bahwa agama perlu terus didalami, dihayati dan dikontekstualisasi, bukan hal yang instan. *Keempat*,mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa, misalnya *Jujur, Sabar, Bersyukur, Berkesetaraan, Berbhineka (pluralis dan multikulturalis) plus wawasan kebangsaan, Bergotong-royong, bertanggungjawab, Mandiri, Saling mengasihi, Santun (dalam berpolitik, bertutur, bersikap dan berperilaku, Menerima yang menjadi haknya, bukan sebaliknya, Keterbukaan. Kelima, pemerintah juga berperan dalam memelihara, melayani dan juga sekaligus mengoreksi kekeliruannya, bahkan menginiasi untuk melakukan perubahan untuk merumuskan narasi bersama yang bisa*

[164] Ari Nugroho (ed), *Sarasehan Kemenag bersama Tokoh Agama-Budayawan Hasilkan Enam Permufakatan*, http://jogja.tribunnews.com/2018/11/03/sarasehan-kemenag-bersama-tokoh-agama-budayawan-hasilkan-enam-permufakatan?page=3, diakses 21 November 2018.

dijadikan pijakan bersama. Keenam, mendorong lahirnya praktik hidup beragama yang mampu melahirkan iman yang menghasilkan kesalehan spiritual dan sosial.[165]

Berangkat dari paradigma ijtihad keislaman tersebut, kita berkewajiban mempertahankan, merawat, melestarikan dan membangun NKRI, sehingga paradigma ijtihad keislaman yang seperti ini adalah paradigma ijtihad keislaman yang yang paling rasional dalam menyikapi Indonesia sekarang. Kita tidak perlu berpikir untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain seperti ideologi khilafah.Indonesia dengan Pancasila telah terbukti mampu menjadi rumah besar kita semua.[166] Gerakan-gerakan Islam transnasional yang berusaha mengganti Pancasila itu, bukanlah bagian dari umat Islam yang memahami Islam secara kaffah, mereka hanya memahami sebagian ajaran Islam, dan mereka menduga bahwa yang dianggap Islam hakiki itu adalah seperti pembentukan negara khilafah. Padahal, hakikat ajaran Islam adalah bagaimana mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang membawa kemaslahatan hakiki bagi umat manusia. Jadi, yang menjadi tujuan adalah substansi ajaran Islam yang perlu diterapkan.

Kebijakan Lukman tersebut dalam membangun hubungan kemanusiaan atau urusan kebangsaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan keseimbangan dan toleransi dalam beragama dan kerjasama urusan duniawi. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa pada suatu waktu, ada perwakilan Nasrani dari Najran mendatangi Nabi untuk mendiskusikan persoalan yang dihadapinya, lalu mereka hendak menjalankan ibadahnya, Nabi mempersilahkan menjalankan

---

[165] Ari Nugroho (ed), *Sarasehan Kemenag bersama Tokoh Agama-Budayawan Hasilkan Enam Permufakatan*, http://jogja.tribunnews.com/2018/11/03/sarasehan-kemenag-bersama-tokoh-agama-budayawan-hasilkan-enam-permufakatan?page=3, diakses 21 November 2018.

[166] Lukman Hakim Saifuddin, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari,* Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017

ibadahnya di musalah yang berada di rumahnya sendiri. Padahal,mereka berbeda dalam akidah, tetapi hal itu tidak menghalangi untuk bekerjasama dalam urusan yang bisa didiskusikan bersama.[167] Hal itu menunjukkan bahwa hubungan antara agama yang seimbang dapat menjaga kerukunan dan kedamaian.

Demikian juga Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa ideologi Pancasila yang dilahirkan oleh pendiri bangsa merupakan warisan yang luhur dan wajib dilestarikan karena sudah terbukti membawa kemaslahatan yang hakiki bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, sehingga melalui Pancasila, para pendiri bangsa telah menempatkan agama sebagai nilai-nilai universal yang menjadi landasan ideal dalam membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap agama bisa menerjemahkan nilai-nilai universalnya termasuk ajaran Islam *rahmah li al-'alamain* dalam wujud yang hakiki secara kaffah. Setiap anak bangsa dapat menerjemahkan nilai-nilai ajaran agamanya secara seimbang dengan dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.[168]

Dalam penilaian Darmadi, Lukman Hakim Saifuddin memiliki paradigma pemikiran yang mampu mempersatukan perbedaan pandangan yang ada dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan ini dapat memperkuat nalar Islam berlandaskan kebangsaan Indonesia.[169]

C. Paradigma Ijtihad Tawasuth

Secara fitrah manusia merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah swt, karenanya *hifdz al-karâmah al-insâniyyah* (memelihara kehormatan manusia)merupakan tujuan yang qath'i dari tujuan-

[167] Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), hlm.282-283.

[168] Wahid, *Sekedar Mendahului...*, hlm. 139.

[169] Hasil Wawancara Darmadi, Penasehat Gerakan Pemuda Anshor Kota Lhoksumawe, Desember 2018.

tujuan hukum syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah al-Islâmiyyah*).[170] Allah Swt mengemukakan eksistensi kemuliaan manusia sebagai berikut.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

> Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S. al-Isra' [17]: 70)

Untuk menjaga eksistensi kemuliaannya, kita harus memiliki keberanian untuk menjaga dan menegakkannya. Karena itu, dalam tradisi Islam, sifat keberanian merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki umat Islam, yakni *al-syajâ'ah*untuk menegakkan syi'ar-syi'ar (ajaran) Islam dan kebenaran.[171] Dalam konteks kenegaraan, KH M Hasyim Asy'arie yang juga pendiri Nahdlatul Ulama telah meracik titik temu antara konsepsi agama dan negara yang kemudian menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.[172] Adapun tujuan Kemerdekaan RI adalah untuk *melindungi segenap bangsa Indonesia* dari segala bentuk penjajahan dan perlakuan tidak adil sebagaimana tertuang dalam UUD-NRI 1945.[173]

Bangsa sebagai satu kesatuan antara rakyat dan penguasa/negara terbangun dari adanya kesamaan tujuan, bisa karena adanya kesamaan

---

[170]'Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syarî'ah bi Ab'âd Jadîdah* (Beirut : Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2008), hm.98-100.

[171] KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Irsyâd al-Mu'mîn ila sairah Sayyid al-Mursalîn wa Man Tabi'ahu min al-Shahabah wa al-Tabi'în", *Irsyâd al-Sârî fî Jam'i Mushannifât al-Syaikh Hâsyim Asy'arî*, (Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th).

[172] Laporan Utama, "NU Mengembangkan Tugas Keumatan dan Kenegaraan", dalam *Risalah: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 69/X, Februari 2017, hlm. 17 dan 19.

[173] Eko Sulistiyo, *Jokoway...*, hlm. XIII.

agama, budaya, ekonomi, keamanan, etnis, suku, bahasa, dan lainnya. Substansi hidup berbangsa pada dasarnya berangkat dari kesamaan tujuan untuk mencapai cita-cita hidup manusia. Bagaimana dengan eksistensi bangsa Indonesia, kita menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk dari berbagai seginya. Oleh sebab itu, keragamaan itu bisa menjadi potensi positif dan juga sekaligus bisa menjadi potensi negatif.

Salah satu faktor penentu adanya eksistensi bangsa Indonesia tetap langgeng hingga kini karena faktor agama terutama Islam sebagai agama mayoritas yang bercorak moderat dan toleran, sehingga bisa melindungi dan meprotensi potensi-potensi negatif dari adanya keragaman itu. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika Lukman Hakim Saifuddin berpendapat bahwa bahwa "*Islam adalah faktor determinan bagi Indonesia*". Sebab, agama terutama Islam bagi Indonesia adalah ibarat ruh bagi badan. Kenyataannya menunjukkan bahwa bahwa "Indonesia dewasa ini adalah Indonesia yang lebih islami",dan **"**Indonesia adalah bangsa Muslim paling besar di dunia" sebagai konsekuensi rasional dari peran Islam yang berabad-abad dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah Indonesia. Karena itu, paradigma orientalis yang menyangsikan peran penting Islam dalam sistem budaya, sistem politik, dan agama di Indonesia kurang tepat karena faktanya dewasa ini faktor Islam menjadi arus dominan dalam tata kehidupan keindonesiaan yang diakui oleh masyarakat dunia.[174]

Sebagai faktor determinan bagi Indonesia, pendapat tersebut dapat dibenarkan sebab Islam sebagai sebuah agama mampu memberikan sumbangan dan dorong terhadap manusia untuk memperlakukan sesamanya dengan baik dan terhormat sebagaimana diakui Nurcholish Madjid yang dikutip oleh Franz Magnis-suseno mengakui bahwa "Islam adalah agama kemanusiaan terbuka" yang berati bahwa Islam akan mampu menjadi penyangga dan pendorong terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang mengajarkan tata

[174] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

kehidupan berbansga dan bersyarakat yang beradab dan santun. Perlindungan dan penghormatan terhadap manusia dan sesama anak bangsa berarti sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi manusia dijamin oleh regulasi agama maupun negara, sehingga jaminan hak asasi manusia bukan berarti liberalisme atau individualisme, tetapi justru di situ terpancar nilai-nilai solidaritas yang menjadi jiwa dan pribadi hidup bangsa Indonesia.[175]

> Jaminan hak-hak asasi manusia adalah tanda solidaritas bangsa dengan anggota-anggotanya yang paling lemah, yang tidak bisa melawan, yang bisa digeser, digusur, dipukul, ditahan dan dibunuh begitu saja—tetapi dengan memastikan bahwa hak asasi mereka pun tanpa kecuali di hormati, masyarakat membuktikan bahwa ia solider dengan mereka. Jadi hak-hak asasi manusia bukan liberalisme atau indi- vidualisme, melainkan sebaliknya, bukti soli- daritas suatu masyarakat dengan para warga yang paling lemah.[176]

Tidak hanya itu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai ajaran Islam sudah menjadi budaya masyarakat setempat yang berinteraksi secara dialektis-akulturatif. Sistem kekuasaan yang mengedepankan asas keadilan menjadi salah satu indikasi bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi bagian esensial dalam tata kehidupan politik dan kekuasaan di Nusantara, misalnya Aceh mencetak mata uang yang bertuliskan prinsip keadilan hidup berpolitik dan berkuasa, Minangkabau mengajarkan prinsip hidup yang berbasis ajaran syariat Islam dalam tata kehidupan budaya. Walaupun demikian, warna ajaran syariat Islam di wilayah Sumatera ini lebih kuat ketimbang di wilayah Jawa. Hal ini

---

[175]Franz Magnis-Suseno,*Agama, Kebangsaan dan Demokrasi Nurcholish Madjid dan Kemanusiaan*,http://nurcholishmadjid.net/index.php?page=news&action=view&id=68, diakses 19 September 2016

[176]Franz Magnis-Suseno,*Agama, Kebangsaan dan Demokrasi Nurcholish Madjid dan Kemanusiaan*,http://nurcholishmadjid.net/index.php?page=news&action=view&id=68, diakses 19 September 2016

tampak dari simbol-simbol dalam kehidupan budaya dan politik yang digunakan dari istilah-istilah syariat Islam.

> Jauh sebelum Indonesia merdeka, Islam telah menjadi faktor yang dominan. Pengaruh nilai-nilai Islam dalam pemikiran politik atau ketatanegaraan telah dipraktikkan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti tercermin pada tiga nilai universal yakni adil, syara', dan musyawarah. Adil, misalnya sudah ditulis dalam mata uang Aceh pada abad ke-13. Pepatah "raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah" menunjukkan kuatnya konsep adil. Syara' menggantikan kekuasaan mutlak perorangan raja. Di Minangkabau ada ungkapan, "Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah". Sementara musyawarah menjadi praktik di hampir semua kerajaan Islam di Nusantara.[177]

Penyebaran ajaran syariat Islam di wilayah Jawa lebih bersifat lokalistik daripada simboliknya karena sejarah penyebaran syariat Islam mengalami berbagai tantangan terutama dari Hinduisme-Buddhisme, sehingga titik akulturasinya sangat tampak dalam hal ini bisa kita lihat dari sistem kerajaan Jawa yang menganut konsep manunggaling kawula-Gusti yang dalam wujud pimpinan politik atau raja kemudian dipandang sebagai penanggung jawab agama dan wakil Tuhan di muka bumi. Hal ini misalnya tercermin pada gelar Raja Mataram Islam pertama.

> Di Jawa, penetrasi nilai-nilai Islam awalnya menghadapi resistensi kebudayaan dari Hinduisme-Buddhisme yang sudah mapan sebelumnya. Karena itu, nilai syara', adil, dan musyawarah kurang dikenal atau dipraktikkan di kerajaan-kerajaan Jawa. Malahan, di Jawa konsep mistik "manunggaling kawula-Gusti" mendapat bobot politik yang kuat. Dari konsep itu timbullah tatanan politik yang merujuk pada kekuasaan mutlak raja. Pada

---

[177] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

> kerajaan-kerajaan Islam Jawa, konsep ini begitu kuat sehingga Sultan diberi gelar "panatagama" (penanggung jawab bidang agama) atau "khalifatullah" (duta Tuhan) yang merepresentasi konsep "Gusti" (Raja) berhadapan dengan kawula (rakyat). Hal ini misalnya tercermin pada gelar Raja Mataram Islam pertama, Danang Sutawijaya (1587-1601) yakni Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa.[178]

Walaupun pengaruhnya berbeda-beda tingkatannya, tetapi secara substansi, sistem ketatanegaran dalam kerajaan Islam yang berdiri di seluruh Nusantara sejak abad ke-13/15 pada dasarnya menganut nilai-nilai syariat Islam sehingga karya-karya ulama-ulama terkemuka seperti karya Imam al-Ghazali, *nashihatul muluk*, mempengaruhi lahirnya kitab *Bustanus Salatin* karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri.

Karena itu, tidak berlebihan jika Nurcholish Madjid mendeskripsikan bahwa nilai-nilai syariat atau Islam sangat mempengaruhi sistem dan tata kehidupan politik di tanah air karena sejak dari awal jauh sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai Islam sudah menjadi tradisi kehidupan budaya dan politik di dalam kerajaan-kerajaan Nusantara. Hal ini berbeda dengan di Barat, nilai-nilai Islam lebih banyak mempengaruhi terminilogi sains dan teknologi. Sebenarnya, ada pesan yang belum disampaikan oleh Nurcholish Madjid dengan pemikirannya tersebut, yakni bahwa arus kehendak untuk berpolitik bagi kaum Muslim yang begitu tinggi tidak lepas dari budaya berpolitik yang sudah mendarah-daging di nusantara ini yang dianggapnya sebagai sebuah prestasi dan kebanggaan. Ironisnya, tidak jarang kemudian mereka mengejar dengan berbagai cara yang tidak masuk akal lagi dari sisi perhitungan ekonomis. Kondisi yang seperti ini kita yakini diketahui oleh para pemimpin politik saat ini, sehingga wajar kalau ada himbauan untuk generasi muda untuk berpikir yang kreatif dan inovatif, tidak mesti harus semua selalu mengarah ke politik praktis. Namun, ada ruang kerasi bisnis

---

[178] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

yang mana hal ini harus banyak diisi oleh generasi muda untuk membangun ketahanan ekonomi nasional, sebab semakin banyak generasi muda bangsa yang memiliki naluri dan kinerja bisnis, maka semakin kuat ketahanan ekonomi suatu negara itu.

Karena itu, minat dan motivasi untuk inovasi dan kerja bisnis harus terus ditumbuhkan karena hingga dekade terakhir ini masih ada asumsi di sebagian masyarakat bahwa kalau belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang dikenal dengan Aparat Sipil Negara (ASN) belum dianggap bekerja walaupun usahanya sudah sukses. Walaupun asumsi ini, semakin hari, semakin berkurang. Kalau kita telusuri, budaya ini sesungguhnya lahir dari tradisi terutama di Jawa yang mana zaman dahulu mengenal strata, yakni strata tertinggi adalah raja/penguasa, strata kedua adalah abdi dalem/abdi raja, dan strata ketiga adalah petani/pebisnis.

> Meski demikian, hampir semua sistem ketatanegaran yang dianut kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di seluruh Nusantara sejak abad ke-13/15 seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Ternate, dan Bone dipengaruhi dan didasarkan pada ajaran Islam. Kitab *Nashihatul Muluk* karya Imam Ghozali sangat berpengaruh sehingga mengilhami lahirnya kitab *Bustanus Salatin* karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Di Jawa terdapat kitab yang sama, beraksara Jawa, yaitu serat *Tajus Salatin*, selain *Adabus Salatin, Ikhbarul Muluk* dan sebagainya. Semua itu menjadi rujukan para raja dalam menyusun undang-undang dan melaksanakan kebijakan pemerintahan. Pada abad ke 19 Raja Surakarta Mangkunegara IV yang sezaman dengan Ronggowarsito mengarang *Kitab Wedhatama* (Ajaran Luhur) yang dijadikan pelajaran bagi para pangeran calon raja. Selain itu juga ditulis kitab yang sama bernama *Wulangreh*.[179]

[179] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

Interaksi antara budaya dan nilai-nilai syariat Islam kemudian tidak hanya sampai pada tingkatan formal ketatanegaraan, tetapi juga menjadi aturan hukum yang diterapkan dalam tata kehidupan legal formal sebagaimana misalnya di Abad ke-19 Kesultanan Sambas Kalimantan Barat menganut sistem peradilan yang berasaskan Islam. Nilai-nilai syariat Islam tidak hanya terlembaga dalam tata hukum kenegaraan atau peradilan agama, tetapi juga mempengaruhi lahirnya lembaga-lembaga sosial-ekonomi yang bernafaskan syariat Islam.

> Selain membahas ketatanegaraan, beberapa kitab tadi diterjemahkan secara teknis menjadi berbagai hukum dan peraturan kerajaan. Dari sini lalu muncul lembaga peradilan dan *Qodli Qudlot* (Hakim Agung) serta para penghulu yang menangani pelaksanaan hukum dan peradilan. Sampai akhir abad ke-19 Kesultanan Sambas, Kalimantan Barat misalnya masih dijalankan sistem peradilan seperti ini. Sistem politik yang kuat seperti itu pada gilirannya membentuk, apa yang oleh Kuntowijoyo disebut *civic culture* (budaya bernegara). Penetrasi dan pelembagaan nilai-nilai Islam sesungguhnya jauh lebih rumit *(complicated)* seiring dengan proses Islamisasi di Nusantara hingga Indonesia merdeka. Selain berpengaruh pada sistem hukum dan ketatanegaraan, nilai-nilai Islam juga berpengaruh terhadap munculnya lembaga-lembaga sosial Islam *(Islamic social institutions)* seperti wakaf, baitul mal, filantropisme, dan pendidikan Islam yang dimulai dari pesantren, tajug, atau langgar (modifikasi dari sistem pendidikan Hindu-Budha sebelumnya: sanggar, padepokan atau pertapaan), diniyah, surau, meunasah/dayah. Kemudian pada awal abad ke-20 muncul madrasah didirikan berbagai organisasi Islam yang bergabung dalam pergerakan nasional. Lalu hadir pula perguruan tinggi Islam di masa-masa kemerdekaan. Hingga hari ini, jenis dan

bentuk lembaga-lembaga sosial ini mengalami eskalasi dan sofistikasi yang luar biasa.[180]

Dalam perkembangan tata kehidupan berbangsa, nilai-nilai kebangsaan juga tetap menjadi dasar dalam ijtiahad keislaman dan pelembagaan nilai-nilai keislaman hingga kini. Karena itu, setiap sistem hukum nasional dan penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk yang bersumber dari nilai-nilai keislaman tetap harus memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila yang digambarkan berikut:

> 1. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia. 4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. 5. Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[181]

Sistem pelembagaan nilai-nilai ajaran Islam tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa peletakkan ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan perwujudan dari spirit Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

---

[180] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

[181] Nasarudin Umar,"Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional", *Walisongo*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014,hlm. 163.

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis negara merupakan keniscayaan yang harus ditatai sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak disusun harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demikian juga nilai-nilai ajaran Islam sebagai salah satu bahan materi muatan dalam pembentukan hukum nasional perlu didalami dan dikontektualisasikan dengan realitas regulasi hukum nasional di Indonesia.[182]

Selanjutnya, dalam masa-masa perlawanan terhadap kolonial Belanda, ulama atau tokoh agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kerekatan hubungan emosional dan kebersamaan dalam melakukan perjalawan terhadap kolonial Belanda. Persamaan agama, budaya dan bahasa menjadi salah satu ikatan yang mempersatukan. Para ulama memiliki hubungan yang saling terkait dan ada hubungan di antara mereka.

> Proses Islamisasi di Nusantara juga membentuk solidaritas "nasional" dimana seluruh wilayah yang kemudian menjadi "Indonesia" diikat dalam satu kesatuan, sebuah *network*. Jaringan itu terbentuk terutama sesudah ada *diaspora* Islam setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Persamaan agama, budaya dan *lingua franca* (Melayu) menjadikan jaringan agama sebagai proto-nasionalisme. Penyebar Islam di Lombok adalah Sunan Prapen yang berasal dari Giri. Raja Islam pertama di Madura Barat belajar agama dari Sunan Kudus. Banjarmasin mengenal Islam karena hubungannya dengan Demak. Ternate menjadi Islam juga lantaran Giri. Berkat kerajaan Ternate Islam menyebar ke Raja Ampat di Papua. Perkembangan Islam di Makassar dapat ditelusuri karena hubungan dengan Ternate. Syekh Yusuf al-Makassari menjadi guru di Banten, dan dibuang Belanda ke Cape

[182] Nasarudin Umar,"Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional", *Walisongo*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014,hlm. 163.

Town, Afrika Selatan oleh Belanda karena perlawanannya yang menggunakan identitas Islam.[183]

Upaya berjuang untuk meraih Kemerdekaan tidak berjalan sebentar, tetapi melalui proses perlawanan yang panjang. Perlawanan dari para ulama muncul karena adanya perlakuan yang tidak adil terhadap warga masyarakat, sehingga para ulama atau tokoh masyarakat memiliki kesamaan komitmen untuk melawan segala bentuk penindasan dan instabilitas akibat adanya penjajahan dari Belanda. Tidak hanya sema perjuangan Kermedekaan RI, tetapi bahkan pada masa Kemerdekaan RI, para ulama tetap konsisten memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan RI.

> Munculnya rasa kebangsaan (proto-nasionalisme) itulah yang memicu perlawanan dan gelombang pemberontakan dari kerajaan-kerajaan Islam terhadap Belanda yang dinilai mengganggu stabilitas wilayah Nusantara. Karena itu, umat Islam menjadi golongan paling gigih menentang penjajahan. Hampir semua perang besar dan pemberontakan melawan Belanda digerakkan oleh semangat agama dan dikobarkan oleh pemimpin-pemimpin Islam. Perang Paderi (1821-1837) oleh Tuanku Imam Bonjol, Perang Jawa (1825-1830) oleh Pangeran Diponegoro, Perang Sabil Aceh (1873-1904) yang dipimpin Teuku Umar, Panglima Polim dan Cut Nya' Dien; Perang Makassar (1666-1669) dipimpin Sultan Hasanuddin, Perang Banjar (1859-1905) digerakkan oleh Pangeran Antasari. Hingga Resolusi Jihad tahun 1945 yang dipelopori KH. Hasyim Asy'ari dan Bung Tomo adalah perang umat Islam berhadapan dengan penjajah Belanda. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa identitas Islam menjadi nyala api yang mengobarkan perlawanan terhadap penjajah.[184]

---

[183] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

[184] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

Gagasan nasionalisme yang lahir dari agama dalam hal ini terutama Islam menemukan momentumnya pada gerakan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang menjadi identitas dalam perhimpunan, sehingga hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa Islam telah diaktifkan sebagai basis identitas kolektif dan gerakan nasionalisme yang kemudian hal itu berkembang masif bersamaan dengan gelora rasa kebangsaan yang bersatu kemudian berbagai organisasi sosial keagamaan tumbuh dan berkembang seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Tarbiyah Islamiyah, dan lainnya, bahkan mereka kemudian membentuk aliansi dalam memperjuangkan Kemerdekaan RI melalui Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

> Ide tentang agama sebagai proto (gerakan)-nasionalisme ini menemukan momentum kembali pada gerakan modernisme Islam di Indonesia, diwakili SDI (Sarekat Dagang Islam) yang berdiri tahun 1911 oleh Kiai Haji Samanhudi. Menurut Yudi Latif (2005), untuk pertama kalinya kata "Islam" secara eksplisit digunakan sebagai nama sebuah perhimpunan. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam telah diaktifkan sebagai **basis identitas kolektif** dan sebagai ideologi bagi proto-nasionalis. Tidak lama setelah itu gerakan ini dilanjutkan oleh Sarekat Islam yang secara massif menyusun kekuatan kolektif berbasis Islam mengedepankan pemberdayaan umat pada pendidikan, ekonomi, budaya, politik dan identitas kebangsaan. Tokoh penggerak SI seperti Haji Omar Said Tjokroaminoto, Abdul Muis, dan Agus Salim berasal dari kalangan santri dan intelegensia awal yang mendapat pendidikan modern. HOS Tjokroaminoto adalah keturunan Kiai Kasan Besari, pendiri Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo yang terkenal itu.[185]

[185] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

Seluruh energi perjuangan para ulama atau tokoh masyarakat telah digunakan untuk memperjuangkan Kemerdekaan RI dan telah membuahkan hasil, yakni Kemerdekaan RI. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi nilai-nilai Islam sangat mempengaruhi dan terus melembaga bahkan hingga kini, sehingga Islam mempengaruhi tata kehidupan ekonomi, sistem politik, hingga prilaku Muslim. Dengan kata lain, "*nilai-nilai Islam bersenyawa dengan budaya bangsa Indonesia*".[186]

> Pasca Indonesia merdeka, pelembagaan nilai-nilai Islam mengalami sofistifikasi kembali dengan kehadiran Kementerian Agama 3 Januari 1946 dalam struktur birokrasi Negara Indonesia. Kementerian ini mewadahi kepentingan agama-agama, meskipun agama Islam mendapat tempat yang dominan. Melalui Kementerian inilah pelembagaan nilai-nilai Islam semakin kokoh, dengan varian seperti lembaga pendidikan, peradilan agama, zakat dan wakaf, perkawinan, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial Islam, penyelenggaraan haji dan umroh, hingga akomodasi berbagai simpul dan simbol umat Islam Indonesia seperti Masjid Istiqlal, Baitul Qur'an, Majelis Ulama Indonesia, dan Lajnah Percetakan Al-Qur'an.[187]

Pada era tahun 1980-an, relasi agama dan negara memiliki hubungan yang erat yang ditandai tidak hanya sekadar fungsi ideologis, tetapi sudah melembaga menjadi institusi kenegaraan yang berperan melayani publik sebagai salah satu bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana berkembangnya penyempurnaan regulasi pendidikan Islam yang kemudian sejajar dengan pendidikan umum, seperti lembaga pendidikan Islam (madrasah, diniyah dan pesantren) yang mengalami penyempurnaan melalui UU no 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diperkuat dengan UU no 20/2003 dan

---

[186] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

[187] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

UU No 12 tahun 2012. Kelembagaan lainnya yang juga mengalami perkembangan misalnya Majlis Ta'lim.[188]

> Kelembagaan Islam lain yang juga mengalami perkembangan fenomenal adalah majelis ta'lim. Di Indonesia, majelis ta'lim kelihatannya merupakan perkembangan lebih lanjut dari 'pengajian' yang berlangsung di masjid, langgar, dan musalla di masa lalu. Namun dalam tiga dasawarsa terakhir ini, majelis ta'lim melewati batas-batas tradisionalnya. Jika pengajian di masjid atau langgar memiliki anggota atau jamaah yang sangat longgar, majelis ta'lim cenderung memiliki anggota/jamaah tetap. Lebih jauh, jika pada awal tahun 1970-an majelis ta'lim identik dengan lapisan masyarakat bawah yang tradisional, sekarang majelis ta'lim dapat ditemui di lingkungan elit. Azyumardi Azra berkesimpulan bahwa majelis ta'lim mempunyai peranan penting dalam proses peningkatan pemahaman dan pengamalan Islam di kalangan muslim/ah dewasa (*adult learning*) yang tak terjangkau oleh lembaga-lembaga pendidikan formal Islam.[189]

Hasil kreasi budaya Islam juga menjadi bagian dari akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi masyarakat Nusantara yang mana hingga kini terus berkembang, bahkan kini muncul seni, spiritualitas, mode pakaian,bahkan jenis-jenis usaha syari'ah seperti perbankan syariah yang berkembang masif saat ini.

Adanya akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan budaya setempat senada dengan pemikiran M Amin Abdullah yang mengemukakan bahwa dalam memahami perkembangan pemikiran Islam di berbagai daerah dan wilayah di dunia yang sangat berbeda-beda sesuai dengan konteks masing-masing tersebut seharusnya tidak hanya menggunakan corak pendekatan lama, pendekatan

---

[188] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

[189] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

tekstual, tetapi harus berani keluar dari paradigma ijtihad tekstual ke paradigma ijtihad kontekstual. Dalam hal mengkaji dan mencermati pemikiran keislaman-kontekstual, diperlukan masukan dan sumbangan dari cara pandang keilmuan lain seperti ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagaimana yang dilakukan Marshall G. S. Hodgson dalam bukunya *The Venture of Islam* , yang membaca dan memahami paradigma keislaman dalam dalam lintasan sejarah yang panjang dengan menggunakan berbagai paradigma ijtihad keilmuan sebagaimana juga dilakukan para ilmuwan Muslim seperti Nurcholish Madjid dalam upayanya mengembangkan pemikiran Islam Indonesia. Dari hasil kajian Marshall Hodgson dibedakan tiga paradigma Islam, yaitu:fenomena Islam sebagai doktrin, fenomena doktrin ituketika bergerak dalam pergulatan hidup masyarakat-kultural sehingga mewujudkan diri dalam konteks sosial tertentu, dan ketika Islam menjadi sebuah fenomena "dunia Islam" yang bersifat politis dalam lembaga-lembaga kenegaraan.[190] Paradigma ijtihad Islam tersebut menandakan bahwa nilai-nilai Islam selalu berkembang dan dinamis sesuai dengan realitas empiris hidup manusia sehingga ijtihad menjadi keniscayaan dalam pemikiran dan implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan empiris manusia sebagaimana Islam tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

> Lembaga lain yang tak kalah penting bagi penetrasi nilai-nilai keislaman yang membumi di Indonesia adalah munculnya spiritualitas atau seni Islam, mode pakaian muslim, dan bank syariah. Seni Islam menginspirasi sastrawan-sastrawan dan pemusik Muslim menciptakan *genre* karya sastra-profetik yang khas seperti Taufiq Ismail, Danarto, Abdul Hadi WM, Hamid Jabbar, Sutardji Chalzoum Bachri, Kuntowijoyo, Emha Ainun Nadjib, D. Zawawi Imron, Ajip Rosidi, dan Mustofa Bisri.

[190] M Amin Abdullah, *Sumbangan Nurcholish Madjid Atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, http://nurcholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64 diakses 19 September 2016

> Sementara pemusik seperti Trio Bimbo, Rhoma Irama, Dwiki Darmawan, dan banyak lagi meramaikan blantika musik Islam. Mode busana muslim juga menampakkan gejala yang sama, bahkan lebih revolusioner. Saat ini busana muslim sudah menjadi budaya popular di Indonesia, dalam arti sudah dipakai dan sudah diterima oleh kebanyakan orang Indonesia. Bahkan busana jenis ini sudah menjadi komoditas. Para desainer Muslim mulai beralih ke busana-busana muslim dan menampilkan hasil kreasi mereka dalam berbagai perhelatan *fashion show* yang diadakan di berbagai tempat bergengsi.[191]

Paradigma ijtihad *tawasuth*Lukman Hakim Saifuddin tersebut mengajarkan nilai-nilai Islam yang tegak di antara dua ekstrim kanan dan kiri,[192] sehingga masyarakat Muslim dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan kaffah mulai dari tradisi beragama, berpolitik, berekonomi, berbusana, dan lainnya.Adapun paradigma ijtihad moderasi Lukman Hakim Saifuddin itu dibangun berlandaskan dua ciri dasar, *Pertama*, paradigma pemahaman keislaman yang menggambarkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal sebagai makhluk yang paling mulia *(QS. Al-Isra: 70) dan (QS. Al-Baqarah: 34)* dan hadis Nabi yang intinya menyatakan bahwa segenap anak adam derajatnya sama kecuali ketaqwaannya di hadapan Allah swt yang membedakan. Ciri kedua adalah paradigma pemahaman keislaman yang memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap eksistensi bangsa dan negara, sehingga di samping sebagai seorang beragama, juga menjadi warga negara Indonesia yang sejati.[193]

---

[191] Lukman Hakim Saifuddin, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

[192] Umat Islam tidak boleh radikal, tetapi harus bersikap moderat dan toleran. Hasil Wawancara dengan Ahmad Mutahar, Ketua Yayasan Baiturrahman Jember Jawa Timur, November 2018

[193] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Pelatihan Bela Negara "Bela Negara Pendidikan Agama Islam dalam Menjaga*

Dalam tataran empiris, pengajaran budaya moderasi menjadi modal dasar dalam membangun cita-cita hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Budaya moderasi dalam beragama akan mampu melahirkan sikap saling menghargai dan menunjung tinggi harkat dan martabat sesama anak bangsa. Sebagai anak bangsa, kita harus memiliki komitmen beragama dan berbangsa yang kokoh, sehingga ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an harus menjadi karakter yang menyatu. Dalam bahasa Bung Karno dengan pengetahuan multi kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan geopolitik, maka kita akan memiliki pertahanan yang kokoh dalam menghadapi berbagai rintangan.[194]

Dalam kerangka mendukung terwujudnya kemandirian di bidang ekonomi, melalui kebijakan Kementerian Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin juga kemudian mengeluarkan kebijakan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai keragaman etik, daerah, dan kekhasan lokal (multikultural), serta kebijakan pembukaan pondok pesantren di daerah-daerah 3T dan perbatasan yang bertujuan membuka akses layanan pendidikan Islam pada masyarakat. Di samping itu, adanya pertukaran guru dari Jawa ke luar Jawa, serta pemerataan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).[195]

Moderasi keislaman itu adalah pemahaman keislaman yang menghargai dan menjunjung tinggi terhadap bangsa dan

---

Negara Kesatuan Republik Indonesia" Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 26 Mei 2017.

[194]Soekarno, "Pertahanan Nasional dapat Berhasil Maksimal Jika Berdasarkan Geopolitik, Pidato Presiden Soekarno pada Peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965", *Bung Karno Setialah kepada Sumbermu*, (Jakarta: Penerbit Naraprana, 2015), hlm. 101; Lukman Hakim Saifuddin, *"Sambutan Menteri Agama RI Pada Pelatihan Bela Negara"Bela Negara Pendidikan Agama Islam dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia"*Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 26 Mei 2017.

[195]Hadi Rahman dkk, *Lukman Hakim Saifuddin: Memimping Kementerian Agama Periode Oktober 2014-Desember 2015*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, 2016), hlm.68-69.

> negara. Di samping sebagai seorang muslim (yang menganut agama Islam), kita juga merupakan warga negara Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan terpatri dalam diri kita masing-masing. Saya adalah seorang Lukman Hakim Saifuddin, yang di samping sebagai seorang muslim yang wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, saya juga adalah warga negara Indonesia, yang wajib menjunjung tinggi semua peraturan, nilai-nilai dan komitmen kebangsaan yang berlaku di Indonesia ini. Oleh karenanya, antara keislaman dan keindonesiaan bagi kita tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keislaman dan keindonesiaan merupakan sesuatu yang memang dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Antara keislaman dan keindonesiaan itu bagaikan dua sisi mata uang logam; dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Itulah diri kita, yakni sebagai seorang muslim dan sekaligus warga negara Indonesia.[196]

Paradigma pendidikan Islam yang mengajarkan moderasi hidup merupakan bagian dari usaha menerjemahkan revolusi mental Jokowi yang dibangun untuk mempertegas karakter pribadi dan jadi diri bangsa Indonesia yang lahir dari realitas kemajemukan sesuai dengan amanat Trisakti Soekarno. Oleh sebab itu, paradigma pendidikan Islam yang relevan di Indonesia adalah paradigma pendidikan yang mampu mencetak alumnus yang berbudaya dan beradab, serta mampu menegakkan nilai-nilai moral luhur.[197]

---

[196] Lukman Hakim Saifuddin, *"Sambutan Menteri Agama RI Pada Pelatihan Bela Negara "Bela Negara Pendidikan Agama Islam dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia"* Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 26 Mei 2017.

[197] *Nawa Cita*, https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita diakses 30 November 2018

D. Pradigma Ijtihad Tasamuh

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dalam kebhinekaan, sehingga negara harus mampu mengayomi dan melindungi warga yang beragam dari segala seginya. Dalam kebhinekaan itulah, prinsip ajaran agama Islam yang mengajarkan toleransi hidup beragama sangatlah tepat ditumbuhkembangkan di Indonesia untuk mendukung pembangunan hidup berbangsa dan bernegara.[198]

Dalam konteks Islam, kebhinekaan merupakan sunnatullah. Islam juga mengakui eksistensi kebhinekaan atau pluralitas sebagai diterangkan dalam norma-norma agama Islam, yakni (a) adanya pengawasan dan pengimbangan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):51 yang intinya bahwa agama Islam mengajarkan agar umat manusia saling menahan diri untuk tidak saling menghegemoni atau menguasasi secara tidak benar satu dengan lainnya.[199](b) kehendak Allah menjadikan adanya perbedaan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Maidah (5):48 yang pada intinya jika Allah swt menghendaki niscaya semuanya dijadikan satu umat tanpa adanya perbedaan, tetapi Ia menjadikan adanya perbedaan itu sebagai ujian di antara kamu sekalian. Walaupuna adanya perbedaan, tetapi agama-agama pada dasarnya memiliki esensi yang sama, misalnya dalam hal perlindungan nilai-nilai kemanusiaan(Q.S.Ibrahim (14): 4). Dengan demikian, adanya perbedaan itu secara akidah merupakan realitas yang terbangun dari kehendak Allah swt (Q.S. 5:48) untuk mewujudkan kompetisi dalam berbuat kebajikan. Menurut Budi Munawar Rahman, setiap umat beragama memiliki wijhah (titik "orientasi", tempat mengarahkan

---

198 "Agama Islam itu agama toleran. Karena itu, Negara Republik Indonesia pun toleran, berdasarkan Pancasila, yang semua agama ada tempat di negara Republik Indonesia". Soekarno, "*Negara, Amanat Tuhan kepada Kita, Amanat Ketika Menerima Gelar Pengayom Agung Muhammadiyah Istana Bogor, 25 September 1965*", dalam R Soemarno, *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm. 364-366.

199M. Yusuf Wibisono, "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam", *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm. 14.

diri), yang disimbolkan dengan tempat suci, waktu suci, dan hari suci yang dalam bahasa Mircea Eliade dikenal dengan "Gagasan tentang Yang Suci", sehingga dengan konsepsi menandakan bahwa dalam agama-agama itu ada perbedaan, juga sekaligus ada persamaan.Adapun perbedaan itu juga dapat terjadi karena adanya perbedaan budaya lokal (Q.S. (14) Ibrahim:4). Adanya perbedaan atau keragaman itu bukan untuk menetapkan keberan mutlak dengan menafikan kelompok lainnya, tetapi justru keragaman itu menjadi pemeluk agama menjadi berjiwa besar dan mau mengakui bahwa kebenaran mutlak milik Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan (QS.2:113). (c)Allah menjadikan perbedaan atau keragamaan itu sebagai wahana untuk melakukan dialog, sehingga umat manusia dapat mengambil pelajaran dari adanya keberagaman itu dan mencari titik temu untuk membangun kebersamaan dalam pembangunan (Q.S. AnNahl:125) dan (QS.Al-Baqarah (2): 113). Kegiatan dialog antar agama atau golongan yang berbeda dalam kerangka spirit "kebhinekaan", juga dapat menangkis sahwat pemaksaan terhadap pihak lainnya. Dengan demikian, klaim kebenaran (*truth claim*) suatu agama atau golongan dapat dibenarkan selama tidak mengasikan kelompok atau hak-hak pihak lainnya. (d)Allah swt memberikan kebebasan kepada umat untuk berbuat dengan tanggung jawab. (Q.S.Al-Baqarah: 148). Islam mengajarkan adanya kebebasan dalam berbuat asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Demikian juga dalam urusan agama, Islam tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu (Q.S. Al-Baqarah (2): 256). Dalam Islam, peran dan fungsi kenabian bertujuan memberikan ruang kebebasan bagi umat manusia dari segala tindak kedlaliman (Q.S. 14:4). Oleh sebab itu, ajaran Islam memberikan petunjuk untuk kebenaran, membawa kabar gembira dan peringatan (Q.S. Fatir (35):24), dan Islam sebagai agama universal selalu berkembang sesuai dengan dinamika kemaslahatan umat manusia (Q.S.Ibrahim (14): 4).[200]

[200]M. Yusuf Wibisono, "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam

Dalam pembahasan kebhinekaan ini, konsepsi *hifdz al-din* (memelihara agama) yang berhubungan dengan hukuman bagi orang yang murtad dari agama yang benar (*al-din al-haqq*) sebagaimana dikemukakan Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Jika paradigma fikih ini yang digunakan, maka tidak mungkin bisa membangun pluralitas hidup beragama karena adanya pembatasan kebebasan beragama. Oleh sebab itu, konsepsi yang tepat bagi "fikih kebhinekaan" pengembangan dari Ibnu 'Asyur dan ulama fikih kontemporer yang mengemukakan "*huryiyah al-i'tiqad*" (kebebasan keyakinan) atau "*hurriyah al-'aqidah*" (kebebasan akidah). Pemikiran fikih tersebut berdasarkan surat al-Baqarah ayat 256 yang artinya: "*Tidak ada paksaan dalam beragama.*" Dengan ayat ini, kita dapat memahami bahwa orang yang tidak boleh dipaksa dalam beragama, berarti tidak boleh dipaksa dalam setiap urusan dari urusan-urusan agama, dan itu bukan hanya berlaku dalam urusan agama saja, tetapi juga urusan lainnya.[201] Dengan konsepsi kebebasan keyakinan tersebut, maka kebhinekaan hidup beragama akan dapat terwujud dengan kondusif dan dinamis.

Paradigma ijtihad Islam kebhinekaan merupakan personifikasi dari upaya membangun paradigma ijtihad Islam yang mampu mendealetikakan antara paradigma ijtihad fundamentalis dan tradisionalis-konservatif sehingga paradigma ijtihad ini berusaha mengkritisi paradigma ijtihad Islam yang sudah berkembang sebelumnya yang *out of date*. Paradigma ijtihad Islam kebhinekaan itu dibangun untuk mengkritisi kecenderungan paradigma fundamentalisme yang memiliki kecenderungan puritan dalam melihat ke belakang pada posisi awal pemikiran Islam dalam periode salafi itu sebagai kebangkitan (*al-nahdhah)*, sedangkan pada sisi lain juga mengkritisi paradigma tradisionalisme-konservatif

---

Perspektif Islam", *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya,* Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm. 15-17.

[201] Jasir 'Audah, *Maqashid al-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadiin*, (Beirut: Maktabah al-Tauzi' fi al-'alami al-'Arabi, 2011), hlm. 62-63.

yang dapat melahirkan pemikiran keislaman yang stagnan-ekslusif.[202]

Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan bahwa "*konsep fiqh kebhinekaan adalah bagian integral dari konsep fiqh secara umum*. Secara bahasa, "fiqh" bermakna "faham" atau "tahu". Secara istilah, fiqh bermakna "ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dali tafsil (terperinci jelas)". Karena itu, ia menyatakan bahwa sebagai kerja ilmiah atau ijtihad, fikih harus menggunakan metode berpikir yang dapat menghasilkan kebenaran. Produk ijtihad harus rasional dan realistis. Di samping menggunakan metode *istinbath* (deduksi) yang sudah lama dikenal untuk hal-hal yang ada ketentuan nashnya, yang dikenal dengan "nalar bayani", juga ada metode induksi melalui *maslahah*, sedangkan dasar pemikirannya adalah bahwa setiap maslahah (mu'tabarah) dipastikan selalu ada kebaikan dan kebenaran di balik hukum-hukum Allah yang termuat dalam al-Quran, baik perintah maupun larangan. Karena itu, metode maslahah itu menjadi inti hukum Islam/fikih, sehingga dapat digeneralisir untuk menentukan hukum-hukum Islam untuk hal-hal yang tidak terdapat ketentuan nashnya (*fiima la nashsha fiha*). Adapun term fiqh kebhinekaan, terdiri dari dua kata yang tersusun secara *idafahbayaniyyah* (kata kedua/*mudaf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertama/*mudaf*).[203]

> Dengan demikian, kata kebhinekaan merupakan penjelasan fiqh dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fiqh tersebut. Secara istilahi, fiqh kebhinnekaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku sosial manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok

---

[202]M. Dawam Rahardjo,*Gerakan Islam Kultural Paramadina: Fundamentalisme Agama dan Masa Depan Keislaman dan Keindonesiaan,* http://nurcholishmadjid.net/index.php?page=news&action=view&id=62, diakses 19 September 2016.

[203] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan,* Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

yang ditetapkan oleh ulama atau ahli yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan umat. Apa saja isu-isu yang diangkat, nilai-nilai atau norma-norma kebhinekaan yang relevan untuk dieksplorasi, perspektif apa yang diadopsi, serta apa langkah-langkah yang perlu dilakukan, untuk merumuskan fiqh kebhinnekaan,, merupakan tema-tema penting yang perlu dibahas. Dengan mendasarkan pada "maslahat umat" sebagaimana diisyaratkan dalam kaidah "Tasharrufu al-imam manuthun bi al-maslahah" yang menjadi *backup* istinbat, maka fiqh kebhinekaan akan menjadi benteng ketahanan paham kebangsaan kita, yang disadari bahwa paham kebangsaan Indonesia adalah konsep yang dinamis yang terus-menerus menyempurnakan diri dengan berbagai tantangannya, sesuai kaidah "Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah" (hukum dapat berubah dengan perubahan zaman dan tempat).[204]

Pemikiran Islam kebhinekaan ini sesungguhnya adalah untuk menjawab masalah-masalah isu aktual umat dan bangsa yang beragam dari berbagai aspeknya. Karenanya, keberagaman atau kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini harus dirawat dan disi dengan pembangunan. Kita harus mampu menjaga dan merawat kebhinekaan terutama ketika kita menghadapi arus budaya global yang bisa menggerus kearifan budaya bangsa Indonesia yang menganut tradisi toleransi, rukun dan harmoni. Berbagai kasus konflik yang terjadi di sejumlah daerah misalnya di Nanggroe Aceh Darussalam, Poso, Ambon, Maluku, dan Kalimantan menjadi pelajaran berharga bahwa betapa kerukunan, keharmonisan, toleransi dan keamanan merupakan sesuatu yang sangat mahal dan patut dijaga dengan konsisten. Sebab, tanpa ada

[204] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan*, Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

nilai-nilai kearifan tersebut, kita akan sulit untuk melakukan pembangunan apa pun di negeri ini. M Amin Abdullah, guru besar UIN Sunan Kalijaga, juga menyoroti kasus-kasus konflik yang bermotif agama dan politik-ekonomi di sejumlah tempat dan negara menjadi pelajaran yang berharga agar kita selalu menjaganya dengan menanamkan paham moderasi dan toleransi. Nurcholish Madjid mengisinya dengan selogan *kalimatun sawa'* sebagai solusi dalam menjawab kebhinekaan, Abdurrahman Wahid menawarkan pribumisasi Islam. Semua konsep dari ilmuwan dan tokoh Muslim tersebut pada dasarnya hendak meletakkan nilai-nilai Islam universal sebagai titik pijak dalam membangun kebhinekaan dalam hidup beragama dan berbangsa di dalam wadah NKRI walaupun tantangan kita luar biasa.

> Luar biasa tantangannya, namun demikian indah jika kita menjalaninya. Maka eksplorasi atas fiqh kebhinekaan ini merupakan sebuah perjalanan intelektual yang dapat meyakinkan kita semua. Bahwa di balik kebhinekaan kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa senyata-nyatanya di bumi Indonesia. Bayangkanlah fakta fantastis ini. Indonesia memiliki 17.504 buah pulau. Jumlah penduduknya mencapai 253,60 juta jiwa. Urutan ke-4 negara berpenduduk besar setelah China, India dan Amerika Serikat. Alam kita sungguh sangat kaya; tetapi lebih kaya lagi jika melihat banyaknya budaya, agama, bahasa, dan sukunya. Tercatat kita mempunyai 1.128 suku bangsa, dengan konsep hidup dan gaya hidup yang berbeda-beda. Ini luar biasa! Rasnya berbeda-beda, lingkungan geografis berbeda-beda, latar belakang sejarah, perkembangan daerah dan kemampuan adaptasi masyarakatnya pun berbeda-beda. Bahkan memiliki agama dan kepercayaan yang juga berbeda-beda.[205]

[205] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan,* Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

Kebhinekaan sudah merupakan takqir Tuhan yang tidak bisa kita nafikan. Karena itu, kita harus mampu mempertahankan dan mengisi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1945 yang memiliki semboyan *bhineka tunggal ika*. Yang artinya: berbeda-beda tetapi tetap satu. *Unity in diversity*. Bagaimana cara mengisinya? Kita harus mampu menggalang hidup bersama dan membangun kejayaan Indonesia dengan melakukan reaktualisasi nilai-nilai kebhinekaan di era kontemporer. Dengan tantangan yang makin kompleks, kita memerlukan konsep kepemimpinan dan kemasyarakatan yang responsif dengan fakta kebhinekaan yang makin tajam untuk menghindari terjadinya disorientasi baru paham kebhinekaan yang dapat melahirkan gugatan terhadap keberlangsungan *nation-state* Indonesia. Karena itu, *power of diversity* ini harus dibentuk dalam konfigurasi kebangsaan yang lebih mempesona bagi pemantapan posisi Indonesia, bagi rakyatnya sendiri maupun dalam percaturan dunia Internasional.[206]

Konsep kebangsaan harus diinternalisasi bagi anak bangsa agar pengalaman hidup berbangsa bisa dirasakan secara empiris, bukan hanya sekadar pengetahuan, sehingga ada proses interaksi yang konstruktif dalam kemajemukan hidup. Kita juga akan semakin bijaksana menemukan solusi-solusi atas masalah-masalah konflik setelah mendapat masukan dan pemikiran dari kasus-kasus empiris yang pernah terjadi di lapangan. Kita akan mendapatkan titik pijak yang bisa mempertemukan dari kebhinekaan yang kita alami sebagai sebuah potensi untuk membangun kemajuan dan kejayaan bangsa ini.

> Interaksi sosial dalam masyarakat yang majemuk membutuhkan jembatan yang dapat mempertemukan perbedaan-perbedaan untuk menghindari terjadinya konflik.

[206] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan,* Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

> Apakah terkait dengan etnosentrisme, *misunderstanding of culture values*, stereotip, keagamaan, ideologi, dan lain-lain. Sesungguhnya kita dapat menemukan deskripsi detail tentang solusi konflik yang akurat berdasarkan telaah terhadap kasus-kasus yang telah terjadi. Kita bisa membuat peta masalahnya dan memilih solusinya. Sehingga kita tidak menyentuh area sensitif kecuali dengan pendekatan yang positif.[207]

Pemikiran Islam kebhinekaan ini akan menjawab masalah-masalah aktual masyarakat Muslim dalam kehidupan yang majemuk dengan senantiasa tetap berpijak pada nilai-nilai fundamental Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun persoalan kebhinekaan kita sangat kompleks, tetapi dengan adanya paradigma kontektualisasi ini, akan memberikan ruang fleksibilitas yang memadai.

Halaqah Fiqh Kebhinekaan yang dilaksanakan Maarif Institute, Jakarta, ini merupakan salah satu bagian dari upaya mengembangkan wacana ijtihad fikih dalam dalam perspektif dan ruang lingkup yang diperluas. Kontekstualisasi ini penting dengan sudut pandang kebhinekaan karena di kalangan umat Islam masih berkembang pemahaman bahwa fikih itu hanya berurusan dengan hukum-hukum Tuhan, sehingga fikih menjadi melangit, tidak membumi, isu-isu sosial, seperti masalah kebhinekaan belum berkembang dengan memadai. Sementara itu, masyarakat Indonesia memiliki tingkat kerentanan untuk dilanda konflik sebagaimana kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di seumlah daerah seperti kasus Ambon, Poso, dan NAD. Dengan fikih kebhinekaan, kita berharap akan muncul wacana progresif hukum-hukum fikih yang mampu memberikan kontribusi dalam membangun persatuan dan

---

[207] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan,* Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

kesatuan bangsa, keutuhan NKRI dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berdaulat, maju dan mandiri.[208]

> Pemerintah sangat mengapresiasi positif terhadap semua usaha membangun komitmen kebangsaan, kebhinekaan, termasuk yang dilakukan melalui kajian-kajian bernuasa fiqh. Kita memberikan penghargaan yang tinggi terhadap gagasan-gagasan bernuasa fiqh yang pernah mengemuka sebelum ini. Kita mengenal kajian fiqh dengan menggunakan beberapa strategi seperti konstekstualisasi, desakralisasi, atau reinterpretasi agama. Gerakan ini menunjukkan kepedulian fiqh terhadap berbagai persoalan bangsa, yang diakui cukup efektif untuk membendung fenomena konservatisme, atau radikalisme dari kelompok Islam politik yang mengusung paham-paham berbahaya.Menurut hemat saya, istilah fiqh kebhinekaan berkonotasi sebagai fiqh ala Indonesia. Fiqh ini mengadaptasi *local wisdom*, system kultural dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia dari berbagai suku, agama dan ras. Jangkauannya pun luas dari Sabang sampai Merauke. Misi utamanya adalah upaya merentangkan ide pokok tentang tali persatuan dan kesatuan bangsa bagi seluruh komponen bangsa yang besar ini. Oleh karena itu, merumuskan fiqh kebhinekaan ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat.[209]

Paradigma Islam (fikih) kebhinekaan sebagai salah satu instrumen dalam membangun kerekatan hubungan keumatan dan kemasyarakatan menjadi pintu masuk untuk menghadirkan wacana Islam yang toleran, moderat dan membumi, sehingga nilai-nilai budaya masyarakat yang majemuk dapat terkamodir dengan baik

---

[208] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan,* Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

[209] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan,* Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

dan selektif. Kondisi ini juga diakui oleh berbagai kalangan bahwa paradigma ijtihad keberagamaan bangsa Indonesia termasuk ijtihad keislaman sejak awal hingga kini tetap menuju pada penguatan dan pematangan rasa nasionalisme Indonesia sehingga berbagai kalangan sedang mencari titik persamaan walaupun berada dalam perbedaan, sehingga perbedaan itu bukan dianggap sebagai rintangan tetapi justru dianggap sebagai kekayaan budaya bangsa yang bisa mendukung kemajuan hidup bangsa yang majemuk.

> Kebangkitan Islam Indonesia sejak permulaan abad ke-20 merupakan bagian dari kebangkitan nasional. Jadi sejak semula orang-orang Muhammadiyah dan NU tidak hanya merasa Muslim, melainkan juga Indonesia. Begitu pula, bahwa Kristi- anitas, Protestan dan Katolik, diterima begitu baik di pangkuan bangsa tanpa dipersoal- kan kaitannya dengan penjajah itu sama saja karena mereka sejak tahun 1920-an aktif terli- bat dalam gerakan kemerdekaan. Pak Kasimo bisa dekat dengan Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara karena sama- sama mau membangun Indonesia yang adil, makmur dan bebas dari penjajah (dan curiga sama Komunis). Islam mainstream Indonesia merupakan pendukung amat kunci terhadap kesatuan internal Indonesia, jadi terhadap segi kebhinekaannya, karena mereka sekaligus nasionalis. Keberakaran agama-agama dalam kebangsaan Indonesia adalah dasar stabilitas masyarakat sipil kita.[210]

Dalam membangun pemikiran Islam kebhinekaan, Lukman Hakim Saifuddin menyusunnya berdasarkan pada konsepsi masalahah. Dengan konsepsi maslahah, maka segala persoalan

[210]Franz Magnis-Suseno,*Agama, Kebangsaan dan Demokrasi Nurcholish Madjid dan Kemanusiaan*,http://nurcholishmadjid.net/index.php?page=news&action=view&id=68, diakses 19 September 2016

hidup manusia termasuk masalah kemajemukan hidup yang sedang dihadapi dapat diatasi dengannya. Sebab, substansi dan fleksibilitas Islam terdapat dalam paradigma maslahah dalam terminologi fiqh.

> Menurut hemat saya, Fiqh kebhinekaan seperti itu bisa dibangun di atas dasar konsep mashlahah. Konsep ini dahulu digunakan oleh imam al-Syatibi untuk merumuskan konsep *maqashid al-syari'ah* yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Menurut beliau, tujuan pemberlakuan syari'ah adalah mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (al-aql), dan harta (al-mal) yang sering disebut sebagai *al-kulliyat al-khamsah.* Jadi maslahah merupakan basis atau dasar ijtihad bagi masyarakat modern.[211]

Dalam kajian ini, ada hal baru yang ditawarkan Lukman Hakim Saifuddin dari rumusan Imam al-Syatibi,[212] yakni *hifdz al-ummah* memelihara eksistensi umat atau masyarakat. Konsepsi *hifdz al-ummah* ini dikenal dengan *hifdz al-mujtama'* (memelihara eksistensi masyarakat) dalam bahasa 'Abd al-Majîd al-Najjâr. Eksistensi umat atau masyarakat yang baik menjadi pondasi bagi kebaikan hubungan antar person, person dengan masyarakat, person dengan negara, dan person dalam rumah tangga. Konstruksi hidup masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan "*al-kiyân al-ijtimâ'i*" (eksistensi masyarakat).[213]Dengan *hifdz al-ummah,* Lukman Hakim Saifuddin pada dasarnya hendak meletakkan dasar-dasar

---

[211] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan,* Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

[212] Abû Ishâq al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* Jilid I, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997).

[213] 'Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syarî'ah bi Ab'âd Jadîdah* (Beirut : Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2008), hm.157-158.

keharmonisan dan kerjasama hidup beragama untuk membangun kemajuan dan kejayaan hidup bangsa.

> Meskipun dalam rumusan di atas tidak disinggung fiqh kebhinnekaan (atau kita sebut saja *hifdz al-ummah*/perlindungan umat) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*, namun terdapat beberapa penjelasan al-Qur'an maupun hadist yang menerangkan pentingnya memelihara kebhinnekaan. Karena itu, *hifdz al-ummah* dapat dijadikan sebagai variabel bagi terlaksananya *al-kulliyat al-khamsah* tersebut. Meski, apakah *hifdz al-ummah* bisa dimasukkan dalam maqasid syariah sehingga menjadi *al-kulliyat al-sittah* atau tidak, tetapi satu hal pasti bahwa *al-kulliyat al-khamsah* itu tidak akan mungkin terlaksana dengan baik apabila *hifdz al-ummah* (misalnya dalam bentuk perlindungan umat beragama) diabaikan.[214]

Paradigma ijtihad tasamuh Lukman Hakim Saifuddin tersebut pada dasarnya bertujuan membangun tata kehidupan umat beragama sesuai dengan regulasi hukum agama dalam bingkai hukum negara, sehingga dalam hal pendirian rumah ibadah hingga rambu-rambu penyiaran agama misalnya perlu ditentukan aturan dan syarat-syaratnya, karena asumsinya bahwa setiap kebebasan yang bertabrakan dengan hak-hak lainya akan melanggar hak asasi.Dengan regulasi tersebut, kebebasan (antar) umat beragama dapat terjamin eksistensinya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dalam tataran praktis, paradigma ijtihad tasamuh itu bertujuan membangun wacana keagamaan yang mampu membangun hubungan yang dinamis dan harmonis antara agama, sehingga setiap pemeluk agama di negeri ini dapat menjalankan ajarannya dengan baik dalam koridor hukum yang berlaku.

---

[214] Lukman Hakim saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan*, Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

BAB IV
PARADIGMA ISLAM KEBANGSAAN
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

A. Paradigma Relasi Agama dan Negara

Dalam relasi agama dan negara, ada beberapa kecenderungan, yaitu *Pertama*, negara berdiri atas dasar agama, sehingga agama menjadi aspirasi dalam hidup bernegara, ada kesatuan hubungan antara otoritas negara dan agama. Negara dan pemegang otoritas negara bekerja berdasarkan norma agama tertentu. Dalam paradigma negara agama itu bisa jadi warga negara wajib menganut agama tertentu atau bisa juga diberikan kebebasan warganya sesuai dengan keyakinannya. *Kedua*, agama menjadi inspirasi dalam hidup bernegara, sebagai spirit dalam hidup bernegara, dalam paradigma relasi ini, agama tidak secara legal formal menyerap norma agama tetapi nilai-nilai agama menjadi inspirasi dalam pembangunan hukum nasional. Semua pemeluk agama memiliki jaminan hidup yang bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. *Ketiga*, negara sekuler yang merupakan paradigma hidup bernegara yang memisahkan urusannya dari urusan agama, sehingga ada pemisahan otoritas negara dan agama, atau secara ekstrem, negara tidak mau mengurus agama dan demikian juga agama tidak berkaitan dengan negara. Lalu Indonesia berada pada model yang mana? Dalam pandangan ini, Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan paradigma kedua, yaitu agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut agama tertentu, tetapi negara berdasar kepada nilai-nilai keagamaan, dan negara memberijaminan kebebasan beragama bagi warganya.[215] Sebagai bangsa multireligius dan multikultural, dengan paradigma kedua itu, kemudian disepakati ideologi Pancasila sebagai kesepakatan bersama atau *kalimatun sawa'* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[215]Hasyim Asy'ari,"Relasi Negara dan Agama di Indonesia", *RechtsVinding Online: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, hlm. 1-2.

Namun demikian, derasnya arus budaya globalisasidan informasi kemudian mempengaruhi wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perilaku anak bangsa kemudian mengalami degradasi dan kurang banggga sebagai anak bangsa,bahkan kurang bangga dengan ideologi Pancasila.[216] Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian para pemuka agama dan tokoh-tokoh nasional karena hal ini menjadi indikasi kendornya rasa kebangsaan yang bisa memicu turunnya kedaulatan hidup berbangsa. Sementara itu, kedaulatan bangsa merupakan idealisme dari para pendiri bangsa. Kedaulatan bangsa ini secara eksplisit dikemukakan oleh Soekarno sebagai landasan untuk membangun Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni berdaulat dalam bidang politik, berkepribadian dalam budaya dan mandiri dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, spirit nasionalisme Soekarno adalah laksana satu kancah, kancah ketidakpuasan, (nasionalisme negatif), kancah ikhtiar terhadap frustasi-frustasi, dan juga satu kancah usaha kedinamisan dari ikhtiar bangsa kembali kembali pada kepribadian bangsanya, baik politik,budaya maupun ekonomi.[217]

Kepribadian bangsa Indonesia ini merujuk pada ideologi Pancasila yang mana menurut Yusril Ihza Mahendra memiliki ciri-ciri menyeluruh, tidak berpihak kepada golongan tertentu, bahkan ideologi Pancasila dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas kemajemukan kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi idealismenya. Ciri keutuhan ideologi Pancasila adalah esensinya yang menjadi prinsip dasar dalam hidup bersama dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dari berbagai elemen bangsa yang multikultural atau multireligius. Menurut ideologi Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada prinsip

[216] Dalam perkembangan dekade terakhir, ada sejumlah organisasi yang menganggap Pancasila sebagai berhala, sehingga ormas tersebut dilarang di Indonesia, bahkan jauh sebelumnya di sejumlah negara sudah dilarang.

[217]Soekarno, "Negara Islam dan Cita-cita Islam", Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953, dalam dalam R Soemarno, *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm. 161-163.

moralitas Ketuhanan sebagai kausa prima yang menciptakan alam seisinya termasuk makhluk manusia, sehingga sebagai makhluk Tuhan harus berperilaku adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan nilai-nilai musyawarah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[218]

Kurangnya rasa kebangaan sebagai anak bangsa tersebut juga terjadi akibat adanya gerakan reformasi di Indonesia. Walaupun diakui atau tidak, era reformasi di Indonesia juga telah memberikan sumbangan positif dalam membangun survival bangsa Indonesia. Namun demikian, ada beberapa sisi negatif di antaranya kesalahan paradigma berpikir dalam memaknai reformasi, sehingga reformasi itu dimaknai hanya sebagai perubahan (*change*). Lupa bahwa sesungguhnya gerakan reformasi itu sebagai suatu proses, yang dalam proses tersebut selain harus dilakukan perubahan juga harus dipertahankan suatu keberlanjutan. Implikasinya, masa-masa pasca reformasi, kita jarang selaki mendengar istilah-istilah seperti stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan, nasioanalisme, bahkan istilah Pancasila sering dianggap usang. Realitas inilah yang kita maksud sebagai fenomena "kesalahan berpikir" yang tanpa disadari banyak dialami oleh masyarakat kita pada masa reformasi sekarang ini.[219]

Adanya persoalan bangsa yang terjadi di masa Orde Baru seolah-olah adalah masalah Pancasila. Padahal, Pancasila adalah nilai dasar normatif yang masih abstrak, sehingga perlu kita jabarkan dalam tataran instrumental, yakni penerjemahan dalam hukum positif, dan juga dalam tataran operasional, yakni

---

[218] Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2015), hlm.172-173.

[219] Idjang Tjarsono, "Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas" *Jurnal Transnasional*, Volume 4, Nomor 2, Februari 2013, hlm. 887-888.

pelaksanaan obyektif oleh institusi serta penyelenggara negara dan pelaksanaan subyektif, yakni pelaksanaan oleh warga negara.[220]

Sebagai falsafah negara, Pancasila telah menjadi pemersatu bangsa dari masyarakat yang majemuk, telah menjadi kesepakatan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia, dan juga telah menjadi pengarah hidup bangsa dan rakyat Indonesia dalam membangun kesejahteraan umum.[221] Oleh sebab itu, adanya gugatan dari kalangan radikal dan ekstrim keagamaan terhadap falsafah Pancasila tidak bisa dibenarkan.

Dalam menjawab anomali berpikir bangsa tersebut, Lukman menggelorakan kembali semangat nasionalisme atau kebangsaannya dengan berusaha meletakkan nilai-nilai keislaman sebagai dasar filosofisnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila sebagai bagian dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan upaya instrumental dengan mengeluarkan sejumlah regulasi penerjemahan dalam hukum positif serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.

---

[220] Idjang Tjarsono, "Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas" *Jurnal Transnasional*, Volume 4, Nomor 2, Februari 2013, hlm. 888.

[221] Abdullah Taufik,"Refleksi atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi", *Jurnal Universum*, Volume 9 Nomor 1 Januari 2015, hlm. 53.

(Menteri Agama menutup Pertemuan dengan Pimpinan Induk Organisasi Gereja, Ketua Sinode dalam Rangka Deradikalisasi, di Jakarta, Jumat, 26/10/2018)[222]

Dalam tataran operasional, Lukman memberikan teladan dalam memberikan penguatan semangat kebangsaan dengan merawat dan membina kebhinekaan terutama dalam hal agama. Dalam kegiatan tersebut, Lukman mengharapkan para tokoh agama Kristen untuk terus memberikan pemahaman pada umat tentang esensi ajaran agama, yakni menjaga harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi spirit dalam kehidupan berbangsa.[223]

---

[222]Khoiron (ed), *Menag Tutup Konsultasi Pimpinan Induk Organisasi Gereja*, https://kemenag.go.id/berita/read/509193/menag-tutup-konsultasi-pimpinan-induk-organisasi-gereja 26 Oktober 2018.

[223] Khoiron (ed), *Menag Tutup Konsultasi Pimpinan Induk Organisasi Gereja*, https://kemenag.go.id/berita/read/509193/menag-tutup-konsultasi-pimpinan-induk-organisasi-gereja 26 Oktober 2018.

Dalam tataran aplikatif, sesuai dengan Visi Pemerintahan Jokowi-JK, yakni *Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong*, yang mana hal ini juga merupakan spirit dari Trisakti Bung Karno, maka bangunan paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin jika ditelisik pada dasarnya tidak lepas lima nilai-nilai budaya Kementerian Agama; *Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladan*.Hal itu juga penerjemahan dari dari visi dan misi Kementerian Agama RI yang dibangunnya, yakni: Visi: *Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin*; Misi;*1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa*.[224]

B. Paradigma Kedaulatan Bangsa

Sebagai bangsa yang religius, pemurnian agama Islam itu penting untuk membersihkan agama Islam dari segala bentuk khurafat dan bid'ah. Sebab, Soekarno mengemukakan bahwa sesuatu agama hanyalah kuat jika ia punya mind tidak dikotorkan oleh khurafat-khurafat yang tidak benar atau bid'ah-bid'ah. Soekarno melihat bahwa ibadah tidak hanya shalat atau puasa saja tetapi juga membersihkan paku atau beling pecah di jalan yang bisa melukai orang juga ibadah. Oleh sebab itu, ibadah adalah segala perbuatan yang berarti penyembahan dan kebaktian kepada Allah swt. Mendirikan dan menyelamatkan negara adalah ibadah karena negara adalah amanat Allah Swt kepada kita. Menyusun dan

[224] Lukman Hakim Saifuddin, *Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI*,https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/uploads/2016/09/5_nilai_budaya_kemenag_compressed.pdf, diakses 30 November 2018.

menyelamatkan bangsa adalah ibadah karena bangsa adalah amanat Allah swt kepada kita. Mempersatukan dan memakmurkan tanah air adalah amanat Allah swt kepada kita karena tanah air adalah amanat Allah swt kepada kita.[225]

Soekarno mengemukakan bahwa "*nasionalisme hidup kembali pada kemerdekaan, hidup pada kedaulatan bangsa*" kembali kepada pribadi, sehingga ketika perasaan dari masing-masing bersatu dalam satu perasaan penderitaan bangsa untuk membangun kedaulatan bangsa yang dijalankan dengan cara musyawarah sebagai cara yang paling bijaksana dalam menyampaikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan, sehingga demokrasi kita dengan kebijaksanaan atau persaudaraan yang memuaskan segala pihak dalam mencapai konsensus berbangsa dan bernegara.[226]

1. Paradigma Konsensus Dasar Berbangsa

Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa umat Islam di seluruh Tanah Air harus bersama-sama melindungi Bangsa dan Negara dari semua bentuk radikalisme dan terorisme, sehingga umat beragama yang berada dalam jalan yang salah dalam berdakwah dan menyiarkan Agama Islam harus diberi penyadaran dan pemahaman yang utuh dan otentik tentang ajaran Islam.[227] Adanya kelompok-kelompok radikal yang memiliki pemikiran dan pemahaman keislaman radikal dan ekstrimis perlu diberikan pemahaman dan orienatasi keislaman yang berwawasan kebhinekaan, sehingga mereka memiliki pemahaman keislaman yang utuh dan otentik.

---

[225] Seokarno, "*Negara, Amanat Tuhan kepada Kita, Amanat Ketika Menerima Gelar Pengayom Agung Muhammadiyah Istana Bogor, 25 September 1965*", dalam R Soemarno, *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm. 364-365.

[226] Soekarno, "Negara Islam dan Cita-cita Islam", Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953, dalam R Soemarno, *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm. 161-171.

[227] *Kita Bangun Islam Yang Tebarkan Perdamaian*, http://ksp.go.id/kita-bangun-islam-yang-tebarkan-perdamaian/, diakses 14 September 2017

Sosialisasi paham kebangsaan menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan terutama terhadap elemen terdidik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu elemen pelayan publik yang berbasis nilai-nilai religius. Sebab, nilai-nilai religius memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh dan daya juang dalam mempertahankan sebuah ideologi. Immanuel Kant menyebutkan bahwa agama memiliki daya dorong yang kuat untuk membangun dan menata kehidupan umat manusia menjadi lebih militan. Oleh sebab itu, kita menilai sangat tepat sekali nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan mampu mendukung dan menopang penguatan nasionalisme umat dan bangsa.

> Saya (Lukman, pen) mengapresiasi kegiatan yang menghadirkan lebih dari 300 peserta ini sebagai wujud tanggung jawab kalangan ASN di lingkungan Kementerian Agama terhadap penguatan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti apa Indonesia kita sepuluh, dua puluh, lima puluh, bahkan 100 tahun yang akan datang antara lain tergantung pada upaya kita bersama.[228]

Sosialisasi nilai-nilai luhur dan budaya bangsa memiliki peran penting dalam memupuk dan memperkokoh jiwa dan nasionalisme dari sebuah bangsa. Demikian juga nilai-nilai khas keagamaan yang lahir dari budaya luhur bangsa juga memiliki peran penting dalam memperkokoh keimanan dan nasionalisme sekaligus dari sebuah bangsa. Teori inilah yang dibangun oleh kaum fundamentalis dan radikalis keagamaan trans-nasional yang sedang diterapkan kepada umat dan bangsa Indonesia, sehingga kaum fundamentalis dan radikalis keagamaan trans-nasional tersebut saat ini sedang gencar membuat jargon bid'ah dan mengkafirkan golongan keagamaan Islam di luar mereka yang nota bene sangat akrab dengan budaya nasional, misalnya Islam Nusantara dianggap

[228] Lukman Hakim Saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Serang, 3 Mei 2017.

bid'ah dan kafir oleh mereka. Di samping itu, kaum fundamentalis dan radikalis keagamaan trans-nasional juga gencar menyerang simbol tokoh yang dianggap panutan sebagai salah satu cara menghilangkan citra dan kharismanya, bahkan supaya umat kehilangan hubungan emosional dan kecintaan kepada tokoh panutannya, misalnya serangan terhadap KH Said Aqiel Siraj yang dianggap liberal. Oleh sebab itu, kaum fundamentalis dan radikalis keagamaan trans-nasional terus berusaha melepaskan umat dan bangsa dari tradisi keimanannya yang khas, tradisi budayanya yang khas, dan dari tokoh panutannya, sedangkan cara yang digunakan adalah dengan menyerang dan mendeskriditkan tradisi keimanan, budaya dan tokoh panutannya. Bahkan mereka menghendaki budaya umat dan bangsa kita akan diajak untuk mengikuti tradisi budaya Timur Tengah yang belum jelas itu, baik tipe ideal beragama, berbudaya maupun bernegaranya.

> George Orwell, seorang novelis dan seniman besar Inggris pernah menulis, *"Cara paling efektif untuk menghancurkan sebuah masyarakat adalah dengan membuat mereka lupa akan sejarah bangsa mereka."* Dalam kaitan itulah, kesadaran terhadap sejarah lahir dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dimiliki oleh semua elemen bangsa. Selain itu, kita semua harus bisa menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya paham atau ideologi yang bertentangan atau anti Pancasila dan NKRI, dan juga dari bahaya sekularisme, liberalisme, neo-komunisme, kapitalisme dan sebagainya yang merusak nilai-nilai kehidupan bangsa yang Pancasilais.[229]

Ancaman hidup berbangsa dan bernegara yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam kondisi yang sangat membahayakan sehingga umat Islam sebagai mayoritas warga

[229] Lukman Hakim Saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Serang, 3 Mei 2017.

negara seharusnya mengambil peran penting dalam upaya menanamkan dan mensosialisasikannilai-nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi *Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* Dalam konteks ini, Lukman Hakim Saifuddin memandang penting hal itu karena mengingat besarnya ancaman disintegrasi dan perpecahan bangsa, baik dari dalam maupun dari luar.[230]

> Indonesia adalah bangsa dan negara besaryang terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya dan agama. Keragaman itu, bila tidak dikelola dengan baik bisa menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa yang telah menjadi konsensus semenjak proklamasi kemerdekaan negara ini dikumandangkan pada tahun 1945.[231]

Sosialisasi Empat Pilar atau Empat Konsensus Dasar Bernegara dilaksanakan untuk menyebarluaskan norma-norma baru yang terkandung dalam Perubahan UUD 1945. Adapun sosialisasi itu dilakukan dalam ruang lingkup materi empat pilar kehidupan bangsa, yakni, **Pancasila** sebagai landasan ideologi, etika moral serta alat pemersatu bangsa, sehingga Pancasila harus menjadi landasan filosofis dalam perumusan tata kehidupan sosial, politik, hukum, pendidikan dan ekonomi, sedangkan **UUD Tahun 1945** menjadi landasan konstitusionalnya. Adapun **NKRI** menjadi konsensus yang harus dipertahankan oleh segenap elemen bangsa Indonesia; dan **Bhinneka Tunggal Ika** sebagai kekayaan bangsa dan modal untuk bersatu.[232]

---

[230] Lukman Hakim Saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Serang, 3 Mei 2017.

[231] Lukman Hakim Saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Serang, 3 Mei 2017.

[232] Lukman Hakim Saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Serang, 3 Mei 2017.

> Empat pilar tersebut merupakan rukun negara, penyangga tegaknya negara dan berfungsi sebagai landasan dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera sesuai cita-cita para pendiri sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan dan misi bernegara perlu dipahami bersama dan dilaksanakan. Tujuan dan misi bernegara wajib dijalankan oleh pemerintah yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[233]

Pemberian pemahaman terhadap konstitusi sangat penting agar kita tidak terjebak pada mistifikasi dan dogmatisasi Pancasila sebagaimana terjadi pada masa lalu yang mana Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara, oleh pemerintah Orde Baru diredusir sebagai pedoman perilaku individual atau budi pekerti manusia sebagai pribadi.[234]

Adanya upaya pendalaman dan sosialisasi konsensus hidup berbangsa tersebut menjadi landasan dalam membangun pemahaman Islam yang otentik, yakni pemahaman Islam yang tidak hanya lahir dari ruang kosong, tetapi pemahaman Islam yang lahir dari realitas empiris umat Islam di Indonesia sehingga selalu relevan dan aktual dengan kebutuhan empiris umat Islam di Indonesia. Gerakan ini merupakan upaya pergeseran paradigma dari paradigma Islam ekslusif yang selalu disuarakan kelompok fundamentalis/ tradisional-konservatif menjadi paradigma Islam kebangsaan

---

[233] Lukman Hakim Saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Serang, 3 Mei 2017.

[234] Lukman Hakim Saifuddin,*Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Serang, 3 Mei 2017.

sebagai paradigma ijtihad Islam otentik yang memiliki spirit akomodatif terhadap setiap tatangan hidup umat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jika kita hendak menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam tata kehidupan berbangsa, maka wujudnya sudah berbentuk paradigma objektifikasi Islam yang cenderung akomodatif dan otentik -meminjam bahasa Kuntowijo-, bukan paradigma eksternalisasi Islam yang cenderung formalistik dan tidak otentik.

(Pembukaan Pesparawi XII ditandai dengan alat musik tradisional Kalimantan Barat yakni Kangkuang oleh Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menag Lukman Hakim, Ketua Umum Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional XII Karolin Margret Natasa, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury dan pejabat Pemprov Kalbar, 2018).[235]

[235]*Menag Lukman Hadiri Persparawi Tahun 2018 di Pontianak*, https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220222/menag-lukman-hadiri-persparawi-tahun-2018-di-pontianak, diakses 21 November 2018.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) adalah wujud aktualisasi semangat pembangunan nasional di bidang pembinaan mental spiritual sebagai bagian dari upaya memperkokoh ketahanan spiritual umat dalam menghadapi era modernisasi dan globalisasi. Kegiatan ini menjadi simbol dalam memperkuat warisan budaya konsensus bangsa Indonesia yang dilandasi rasa dan sikap kemajemukan. Pemikiran itu disampaikan Lukman pada saat memberi sambutan dihelat Pesparawi ke XII 2018 di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 bulan 07 tahun 2018).[236]

2. Paradigma Birokrasi-Religius

Dalam bahasa Weber, legitimasi birokrasi berlandaskan beberapa jenis; legitimasi tradisional berlandaskan atas keramatnya tradisi turun-temurun, legitimasi kharismatis berlandaskan ketundukan pada sosok yang dianggap suci, kepahlawanan, atau ciri istimewa, dan legitimasi rasional berlandaskan pada keabsahan hukum yang membuat pemegang otoritas memiliki hak dan kewenangan memerintah, sehingga otoritas bukan tertuju pada person tetapi pada aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan. Jadi pemegang otoritas tunduk pada aturan impersonal, yakni melalui organ administratif yang disebut dengan birokrasi. Menurut Weber, birokrasi modern bukan miliki si pemangku otoritas, juga bukan miliki pribadi pegawai, dan tidak melayani kepentingan pribadi, sehingga perlu ada pemisahan antara urusan pribadi dan urusan resmi. Legitimasi bukan terutama berada pada di mata rakyat, tetapi lebih penting berada pada keabsahan pemangku otoritas di mata anggota staf dan pegawai administrasi. Pemerintahan berlandaskan pada kinerja birokrasi, sehingga efektivitas pemerintahan sangat ditentukan oleh legitimasi otoritas

[236]*Menag Lukman Hadiri Persparawi Tahun 2018 di Pontianak*, https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220222/menag-lukman-hadiri-persparawi-tahun-201.8-di-pontianak, diakses 21 November 2018.

penguasa di mata staf birokrasi. Birokrasi modern bekerja di atas landasan "tata kelola rana spesialisasi" yang diatur dalam struktur organisasi berciri hirarkis yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan teknis, yang direkrut dengan ujian kompetensi yang kompetitif menerima gaji dan pensiun di hari tua. Kinerja mereka berjenjang mulai dari jabatan paling rendah ke atas dengan sistem promisi jabatan. Kinerja birokrasi modern bertumpu pada prinsip non diskriminasi, universal, objektif, spesialisasi, aturan konsisten dan dapat diperhitungkan. Oleh sebab itu, birokrasi modern menjadi poros demokratisasi masyarakat.[237]

Dalam kerangka membangun paradigma biroraksi mdoern, Presiden RI Pertama, Ir Soekarno, menyatakan bahwa dalam membangun sistem pemerintahan Indonesia, kita harus selalu berjalan di atas jalan yang di ridlai Allah swt sampai akhir zaman agar negara ini tetap tegak dan "*bendera merah putih ini tetap berkibar"*. "*Oleh sebab itulah, saya selalu minta kepada seluruh rakyat Indonesia supaya kita tetap berjalan di atas jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala*".[238] Ini berarti bahwa nilai modern yang hendak disampaikan bahwa nilai-nilai Islam mengajarkan rasionalitas dan legalitas sehingga nilai-nilai Islam juga dapat menjadi legitimasi dalam membangun paradigma birorkasi-reiligius yang modern, yakni sistem birokrasi yang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) sebagai wujud pelaksanaan ajaran Islam yang diridlai Allah swt. Ini yang dikenal oleh Soekarno dengan bahasa bahwa Islam memiliki cita-cita negara atau birokrasi dan memiliki cita-cita kehidupan rohani/spiritual.[239]

---

[237] B Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 247 -251 dan 452.

[238] Soekarno, "Agama Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan", Amanat pada Kongres Muhammadiyah Bandung, 24 Juli 1965, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm 349.

[239] Soekarno, "Negara Nasional dan Cita-cita Islam, Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953", dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm146.

Adapun sistem pemerintahan yang berada di jalan ridla Allah swt adalah sebuah sistem pemerintahan yang bekerja untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sistem pemerintahan yang melayani kekuasaan. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo tidak memiliki jalan lain, kecuali harus kembali menghidupkan partisipasi rakyat dalam mendukung pemerintahannya dengan cara memberikan layanan prima kepada rakyat dan memenuhi kepentingan rakyat.[240]Dalam hal ini, ada pergeseran pradigma sistem birokrasi elitis yang melayani kepentingan kekuasaan menjadi sistem birokrasi populis yang melayani kepentingan rakyat, yakni sistem pemerintahan yang sesuai *maqâshid al-syarî'ah.*

Dalam hal ini, untuk mencapai ridla Allah swt adalah dengan membangun sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, yakni sistem pemerintahan yang melayani kepentingan publik (*al-hajah al-'ammah*) yang dikenal dengan *al-mashlahah al-'ammah* (kesejahteraan umum). Adapun cara membangun kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK adalah dengan mengubah paradigma birokrasi dari "melayani kekuasaan" menjadi "melayani publik". Karena itu, pemerintahan ini harus bekerja keras untuk mengubah paradigma birokrasi lama menjadi paradigma baru yang melayani publik dengan gerakan "revolusi mental"[241]

Salah satu kementerian lembaga yang menjalankan fungsi birokrasi layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan adalah Kementerian Agama yang sudah berdiri sejak berdiri pada 3 Januari 1946, yang telah memberi makna dan arti bagi tegaknya sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*. "*Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh almarhum Prof. Dr. H.M. Rasjidi sebagai*

---

[240] Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti: Amanat Konstitusi untuk Menyejahterakan Rakyat*, (Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017)

[241] Eko Sulistiyo, *Jokoway: Cara Memahami Kepemimpinan Jokowi*, (Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017), hlm. XIII.

Menteri Agama RI Pertama telah menorehkan peran yang strategis dalam membina, melindungi dan melayani kehidupan beragama".[242]

> "Mimpi" Kementerian Agama adalah menciptakan kondisi agar setiap umat beragama di negeri ini dapat menikmati kemerdekaan beribadah dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing dalam suasana yang rukun, damai dan saling menghormati satu sama lain. Kementerian Agama memandang setiap organisasi keagamaan, tokoh agama, dan umat beragama, sebagai mitra dalam membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan bukanlah pendekatan kekuasaan, melainkan pendekatan pelayanan.[243]

Dalam rangka mengawal sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*, Kementerian Agama melakukannya dengan memberikan pendekayan pelayanan, bukan kekuasaan. Layanan pembangunan kerukunan hidup beragama, pendidikan keagamaan dan ibadah haji-umrah serta layana dasar keagamaannya lainnya menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Agama yang terus-menerus dilakukan perbaikan layanannya sesuai dengan paradigma pemerintahan Jokowi-JK, yakni birokrasi yang melayani kepentingan publik (rakyat), bukan melayani kekuasaan.

> Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa dan pemerintahan negara Indonesia, Kementerian Agama tumbuh dan berkembang menyertai gelombang perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Kementerian Agama berperan dalam menjalin persatuan bangsa dan melaksanakan pembangunan kehidupan beragama. Dalam makna yang lebih luas, wajah Kementerian Agama pada

---

[242]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Tasyakurandan Pagelaran71Tahun Kementerian Agama RI Jakarta*, 20 Januari 2017.

[243]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Tasyakurandan Pagelaran71Tahun Kementerian Agama RI Jakarta*, 20 Januari 2017.

> hakikatnya merupakan wajah umat beragama di tanah air kita. Dalam kaitan itu, saya ingin mengutip ungkapan mantan Menteri Agama almarhum Bapak H.Munawir Sjadzali, MA yang menggambarkan aparatur Kementerian Agama sebagai orang yang mengenakan baju putih, sedikit saja kena noda dan kotoran akan jelas terlihat bekasnya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi maksud ungkapan tersebut karena sudah jelas dan terang.Hari Amal Bakti Kementerian Agama adalah momentum kolektif untuk melakukan muhasabah atau introspeksi terhadap tugas dan fungsi yang kita jalankan dalam dimensi kekinian dan kedisinian. Manusia yang arif adalah yang bisa mengambil pelajaran terbaik dari masa lalu dan mampu menjawab tantangan masa kini serta penuh percaya diri menghadapi tantangan masa depan.[244]

Sistem birokrasi yang melayani merupakan bagian dari perbaikan dan layanan sistem birokasi yang menjadi komitmen Kementerian Agama. Dengan sistem tersebut, berbagai capaian prestasi Kementerian Agama terus meningkat mulai dari transformasi kelembagaan madrasah, pendidikan tinggi keagamaan, pembinaan pesantren, serta tingkat kerukunan umat beragama yang terus membaik. Karena itu, "fikih birokrasi" yang hendak dibangun Lukman Hakim Saifuddin adalah regulasi birokrasi yang berintegritas, bertanggung jawab, profesional, inovatif, dan mengajarkan keteladanan dengan dengan senantiasa *"memelihara silaturrahim, kebersamaan dan membangun sikap saling percaya dalam mengelola kehidupan beragama yang majemuk di negara kita ini, menanggulangi pergeseran nilai-nilai akhlak dan moral di tengah masyarakat, sertamemperkuat ketahanan masyarakat kita di*

[244]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Tasyakurandan Pagelaran71Tahun Kementerian Agama RI Jakarta*, 20 Januari 2017.

tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang berimbas pada kehidupan beragama".[245]

> Banyak prestasi dan kemajuan yang dicapai di berbagai bidang dan lingkup fungsi Kementerian Agama secara berkesinambungan. Dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan, lompatan kemajuan yang kita capai cukup signifikan, terutama transformasi pendidikan Islam mulai dari jenjang pendidikan madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan begitupun peran Kementerian Agama dalam pembinaan pendidikan pesantren. Dalam penyelenggaraan ibadah haji telah terjadi perubahan yang menggembirakan baik menyangkut pelayanan dalam negeri maupun pelayanan luar negeri. Menyangkut kerukunan antarumat beragama, antara lain tercermin dari tetap terkendalinya dalam koridor hukum setiap konflik sosial berlatar-belakang isu agama. Selain itu, kita boleh berbangga bahwa reformasi birokrasi telah berjalan di Kementerian Agama dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.[246]

Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta berorientasi pada layanan masyarakat, maka kita harus terus saling mendukung dan bekerjasama bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,mitra kerja, dan s*takeholder* pembangunan bidang agama untuk menjawab masalah-masalah aktual bangsa dan isu-isu agama yang semakin kompleks. Karena itu, kita harus mampu memantapkan iman dan takwa serta menjiwai nilai-nilai, tradisi, dan budaya kerja

---

[245]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Tasyakurandan Pagelaran 71 Tahun Kementerian Agama RI Jakarta*, 20 Januari 2017.

[246]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Tasyakuran dan Pagelaran 71 Tahun Kementerian Agama RI Jakarta*, 20 Januari 2017.

Kementerian Agama sebagai pegangan dan obor penerang bagi seluruh aparatur Kementerian Agama dalam menjalankan tugas.[247]Dengan demikian, budaya birokasi yang melayani telah dijalankan oleh Kementerian Agama yang mana hal ini salah satunya tampak dari "*Tema peringatan Hari Amal Bakti Ke 71 Kementerian Agama tahun 2017, yaitu "Lebih Dekat Melayani Umat"*. Paradigma Islam birokrasi yang hendak dibangun di sini adalah paradigma kerja yang terus membangun, memelihara dan memperbaiki reputasi Kementerian Agama sebagai simbol moral pemerintah.[248] Sebagai kelanjutan dari budaya melayani, maka kita harus mampu membawa misi perdamaian dalam kehidupan bangsa yang majemuk ini sebagaimana menjadi tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama 2018, yakni "*tebarkan perdamaian*".

[247]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Tasyakurandan Pagelaran71Tahun Kementerian Agama RI Jakarta*, 20 Januari 2017.

[248]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Tasyakurandan Pagelaran71Tahun Kementerian Agama RI Jakarta*, 20 Januari 2017.

(Pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Katolik Tingkat Nasional" mengusung tema 'Tebarkan Kedamaian Merawat Kebangsaan' di hotel Merlyn Park Jakarta, 13 September 2018)[249]

Dalam hal ini, Lukman Hakim Saifuddin hendak membangun paradigma biokrasi dari elitis menjadi pradigma birokrasi yang merakyat alias melayani kepada rakyat sesuai dengan spirit pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Itulah paradigma birokrasi yang otentik, yakni selalu responsif dan cepat-tuntas dalam melayani dan mengayomi rakyat. Oleh sebab itu, lima budaya kerja yang diprogramkan oleh Lukman Haki Saifuddin pada dasarnya adalah upaya konkrit dalam membangun paradigma birokrasi pemerintahan yang melayani.

[249]https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220262/-pertemuan-tokoh-agama-dan-tokoh-masyarakat-katolik-tingkat-nasional, diakses 26 oktober 2018

Sistem birokrasi yang hendak dibangun Lukman Hakim Saifuddin adalah sistem birokrasi yang menjadikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama senantiasa berusaha menambah wawasan (*soft skill*),mengembangkan keterampilan (*hard skill*) dan siap-siaga dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Sistem birokrasi yang hendak dibangun tidak boleh ada ego sektoral, sektarianisme, dan sejenisnya di lingkungan kerja Kementerian Agama. Seluruh aparatur sipil negara harus menjadi agamawan dan sekaligus negarawan yang menjadikan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan sikap yang luhur itu yang juga menjadi keinginan Jokowi, dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa cepat menjawab perubahan sosial dan teknologi informasi, sehingga seluruh ASN Kemenag RI mampu menjadi pelayan publik yang andal.[250]

Pentingnya menghilangkan ego sektoral dan menjaga hubungan komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja Kementerian Agama adalah sangat penting karena hal itu dapat mendukung terwujudnya sistem kepemimpinan/manajemen birorkasi yang baik dan sekaligus menghindari kegagalan manajemen birokrasi. Hal ini sesuai dengan pemikiran Haridas Suppiah dkk yang mengungkapkan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan kepemimpinan/manajemen, yakni:*over or under confidence of leaders feeling of know all or unsure of themselves, approaching leadership with the wrong expectation, lack of right*

[250]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

skill set training, ignoring the importance of relationship building and failing to listen to subordinates thinking that they know all.[251]

Dalam penilaian Darmadi, Lukman Hakim Saifuddin gaya kepimpinan yang berjiwa nasionalis yang sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena keragaman agama dan lainnya, sehingga ia bisa merangkul semua elemen anak bangsa yang berbeda-beda dan mampu memberikan solusi dalam membangun budaya kerja Kementerian Agama yang efektif dan efesien.[252] Bahkan M Adib Abdusshomad mengemukakan bahwa Lukman Hakim Saifuddin hendak menjadikan Islam rahmatan lil alamin sebagai DNA Pegawai Kementerian Agama,[253] sehingga budaya kerja Kementerian Agama dapat berjalan efektif dan efesien berdasarkan lima budaya kerja.[254]

Dengan menggunakan teorinya Haridas Suppiah dkk dalam karyanya yang berjudul "Transforming Leadership Performance - Breaking Comfort-Zone Barriers", *Educational Leader (Pemimpin Pendidikan)*, Volume 6, 2018, maka kita dapat menyebutkan bahwa program manajemen birokrasi Kementerian Agama RI telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan adanya komunikasi yang lancar, tiadanya ego sektoral dan adanya sistem komunikasi yang baik dan lancar di lingkungan kerja. Indikatornya adalah publik kini semakin menilai positif kinerja Kementerian Agama.[255]

---

[251]Haridas Suppiah, Suresh Kumar P. Govind, dan Yan Piaw Chua, "Transforming Leadership Performance - Breaking Comfort-Zone Barriers", *Educational Leader (Pemimpin Pendidikan)*, Volume 6, 2018, hlm. 65. (64-89)

[252] Hasil Wawancara Darmadi, Penasehat Gerakan Pemuda Anshor Kota Lhoksumawe, Desember 2018.

[253] Hasil Wawancara dengan M Adib Abdusshomad, PNS Kementerian Agama RI, Desember 2018.

[254]Hasil Wawancara dengan Abdul Muis, PNS Kementerian Agama RI, Juli 2018.

[255]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

> Sebagian besar program telah mulai memenuhi harapan sehingga kinerja kita dianggap cukup baik dalam sejumlah survei. Indeks kepuasan jemaah haji terus naik, indeks kerukunan umat beragama juga masih tinggi, dan indeks reformasi birokrasi kita naik peringkat dari CC menjadi B –yang berimplikasi naiknya tunjangan kinerja dari 40 menjadi 60 persen. Beberapa waktu lalu, kita juga mendapatkan sejumlah penghargaan seperti; penghargaan dari Presiden sebagai Penyedia Layanan BLU dengan Akses Terjangkau, dan Penghargaan dari Kemenkeu sebagai Kementerian dengan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dalam APBN. Selain itu Kementerian Agama juga mendapatkan penghargaan ganda terkait ekonomi syariah, yaitu sebagai Pemrakarsa Proyek Infrastruktur Berbiaya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Investor Utama Sukuk Negara Domestik.[256]

Dengan hasil kinerja yang positif itu, Lukman Hakim Saifuddin terus berusaha secara *istiqomah* (konsisten) dalam jalur yang baik dan sekaligus membenahi catatan-catatan negatif yang tersisa. Oleh sebab itu, kata "Bersih Melayani" —yang merupakan tema HAB tahun lalu— tetap dipertahankan, sehingga kita harus benar-benar bersih tanpa menyisakan sedikit pun noda dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara adil, fair dan santun. Untuk itu, dengan motto "Lebih Dekat Melayani Umat", kita harus berusaha lebih peka dalam mendeteksi aspirasi masyarakat, lebih sigap membereskan masalah, dan lebih cekatan memenuhi

---

[256]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

kebutuhan umat. Dengan moto itu, Kemenag RI mulai membangun Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).[257]

> Berbagai langkah baik tidak akan berjalan mulus tanpa sinergitas dan kebulatan hati. Saya berharap, 5 Nilai Budaya Kerja makin dijiwai dalam sanubari setiap kita, serta dilengkapi dengan semangat kerja sama yang apik. Insyaallah, hasilnya akan nampak nyata dan jadi berkah bagi kita semua. Inilah sesungguhnya hakikat dari bekerja dengan berlandaskan agama.Sebagai ASN Kementerian Agama – yang kerap dinilai punya keunggulan religiusitas dibanding ASN instansi lain— kita dituntut mengoptimalkan energi spiritual sebagai landasan kerja profesional. Sesuai kalimat "Ikhlas Beramal" pada logo Kementerian Agama, pengabdian pada masyarakat dan negara harus senantiasa diniatkan sebagai ibadah yang tulus. Artinya, selalu sadar bahwa kerja kita bukan saja dinilai oleh manusia, tapi juga diperhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.[258]

Dalam sistem birokrasi, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kinerja kita tidak hanya disandarkan pada nilai-nilai duniawi, tetapi juga perlu disandarkan pada nilai-nilai ukhrawi. Dalam menjawa hubungan agama dan bangsa di Negara Indonesia, kita harus mampu menampilkan nilai-nilai universal (kebaikan) ajaran agama yang diharapkan menjadi obor penerang dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Sistem birokrasi-religius dibangun untuk menepis anggapan bahwa "*kemajuan sebuah instansi atau pemerintahan tak ada relevansinya dengan agama. Justru sebaliknya, reformasi birokrasi yang*

[257]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

[258]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

berorientasi pada tingginya peradaban masyarakat sesungguhnya adalah perwujudan nilai-nilai agama".[259] Oleh sebab itu, sistem birorkasi-religius Lukman Hakim Saifuddin itu membedakan dengan sistem birokrasi sekuler yang hanya berlandaskan unsur-unsur rasional-material, tidak ada unsur rohani-spiritualnya. Itulah sistem kerja Lukman Hakim Saifuddin yang hendak membangun sistem birokrasi berdasarkan lima budaya kerja, sehingga dalam setiap kesempatan selalu ditegaskan terutama ketika acara pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, sehingga lima budaya kerja itu bukan hanya menjadi wacana, tetapi menjadi perilaku/budaya kerja yang empiris.

[259]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

(Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melantik sejumlah pejabat eselon IIdi lingkungan Kementerian Agama. Prosesi pelantikan digelar di kantorKemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, 13/11/2018).[260]

(Hadir menjadi saksi dalam penandatanganan berita acara sumpah jabatan, Dirjen Pendidikan Islam, Kamarudin Amin,dan Dirjen PHU, Nizar).[261]

---

[260] *Menag Lantik 12 Pejabat Eselon II*, https://kemenag.go.id/berita/read/509331/menag-lantik-12-pejabat-eselon-ii, diakses 21 November 2018

[261] *Menag Lantik 12 Pejabat Eselon II*, https://kemenag.go.id/berita/read/509331/menag-lantik-12-pejabat-eselon-ii, diakses 21 November 2018

Dalam acara tersebut, Lukman meminta para pejabat yang dilantik tetap menjaga profesionalitas, integritas dan inovasi serta mampu merefleksikannya di lingkungan kerja masing-masing. Lukman percaya bahwa para pejabat yang baru dilantik akan mampu mengemban dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Apa yang menjadi gagasan Lukman mengenai lima budaya kerja di Kementerian Agama terus ditekankan dan diperintahkan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknnya. Lukman menyatakan:[262]

> "Tentu ucapan selamat ini disertai dengan harapan agar kita betul-betul mampu menjalankan fungsi dan tugas di bidang masing-masing. Saya selalu menekankan bahwa integritas, profesionalitas dan inovasi haruslah senantiasa mampu kita wujudkan tidak hanya terinternalisasi pada diri masing-masing namun juga termanifestasikan pada lingkungan kerja."[263]

Dengan integritas dan profesionalitas yang senantiasa dijalankan dan ditegakkan pada lingkungan kerja serta inovasi yang diwujudkan, maka kita akan mampu bekerja dengan penuh tangung jawab dan memberikan keteladanan.[264]

Segenap pejabat Kemenag diharapkan menjadi pimpinan di lingkungan masing-masing yang menampilkan sikap keteladanan, memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bidang tugas dan fungsinya, dan menguasai bidang dan kemampuan yang baik sehingga mampu menyampaikan pesan-pesansecara lugas, jelas dan tidak multitafsir, tidak menimpulkan kesalahpahaman di

---

[262] *Menag Lantik 12 Pejabat Eselon II*, https://kemenag.go.id/berita/read/509331/menag-lantik-12-pejabat-eselon-ii, diakses 21 November 2018

[263] *Menag Lantik 12 Pejabat Eselon II*, https://kemenag.go.id/berita/read/509331/menag-lantik-12-pejabat-eselon-ii, diakses 21 November 2018

[264] *Menag Lantik 12 Pejabat Eselon II*, https://kemenag.go.id/berita/read/509331/menag-lantik-12-pejabat-eselon-ii, diakses 21 November 2018

masyarakat. Sebagai seorang birokrat, kita berada di kementerian yang menyadang agama dan dituntut kepekaaan untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan penuh kearifan.[265]

Keandalan itu dibangun dengan mengedepankan pembangunan budaya kerja yang berbasis integritas, yakni budaya kerja yang menghendaki apa yang menjadi tata nilai-nilai atau aturan itulah yang seharusnya diamalkan. Oleh sebab itu, pembangunan budaya integritas. Pembangunan budaya integritas itu perlu dilakukan oleh Lukman untuk menjawab problem moralitas birokrasi yang sangat rendah, sehingga terjadi perilaku korupsi di kalangan aparatur sipil negara. Sebab, kasus-kasus korupsi sangat marak sekali di Indonesia, sehingga hal itulah yang menjadi motivasi Lukman dalam membangun budaya birokrasi bersih yang melayani sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa kejahatan korupsi merupakan tindak yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akibatnya dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat.[266]Dengan demikian, perilaku korupsi

---

[265] "Berikut pejabat eselon II yang dilantik Menag:1.Lutfi Hamid sebagai Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2.Juraidi sebagai Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam. 3 Agus Salim sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam. 4.Janus Pangaribuan sebagai Direktur Urusan Agama Kristen Ditjen Bimas Kristen. 5.Saifuddin sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama. 6.Iwan Zulhami sebagai Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara. 7.Khoerudin sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama (AAK) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. 8.Abdurahman sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Intan lampung. 9.Ahmad Supardi sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau. 10.Ferimeldi sebagai Kepala Biro AUAK UIN Surakarta. 11.Andar Gultom sebagai Kepala Biro AUAK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. 12.Sunarso sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak". *Menag Lantik 12 Pejabat Eselon II*, https://kemenag.go.id/berita/read/509331/menag-lantik-12-pejabat-eselon-ii, diakses 21 November 2018

[266]Abdullah Taufik, "Refleksi atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi", *Jurnal Universum*, Volume 9 Nomor 1 Januari 2015, hlm. 51.

merupakan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan karena dapat menimbulkan kerugian negara, merusak demokrasi.[267]

C. Paradigma Kepribadian Bangsa

Bangsa Indonesia memiliki ciri kepribadian dan identitas. Identitas bangsa Indonesia telah disepakati adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia menjadi konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi. Kebudayaan bangsa Indonesia terwujud melalui proses inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat Indonesia dapat berkembang secara dinamis dan progresif melalui beberapa saluran jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan *self expression*. Disamping itu, kebudayaan bangsa Indonesia juga terwujud melalui proses akulturasi, yakni terjadinya perubahan besar karena adanya kontak antarkebudayaan yang berlangsung lama, baik berbentuk substitusi, sinkretisme, adisi, Orijinasi maupun rejeksi. Pancasila sebagai identitas bangsa atau jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun pemerintahan di Indonesia, misalnya dalam kehidupan beragama, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, Aceh, budaya Toraja dan Papua, budaya masyarakat Bali.[268] Berbagai keragaman budaya itu terakomodir dalam wadah NKRI yang harus dijaga dan dipertahankan keutuhannya terutama dengan memperkokoh kerukunan umat beragama.[269]

Sementara itu, kepribadian bangsa Indonesia terpatri dalam Pancasila, yakni nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan

---

[267] B Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 452.

[268] Ristekdikti, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* , Cet I (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016), hlm. 61-63.

[269] Hasil Wawancara dengan Syamsuddin, PengurusMES Bengkulu, Juli 2018.

tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa lainnya. Kepribadian itu mengacu pada hal yang unik dan khas. Setiap pribadi mencerminkan keadaan sendiri. Bagi bangsa Indonesia, kelima sila dari Pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa karena digali dari nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia sendiri yang sudah terlaksana secara simultan. Walaupun ada proses akulturasi dan inkulturasi, tetapi kepribadian bangsa Indonesia sendiri juga sudah terbentuk sejak lama, sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lainnya yang menampakkan keunggulan peradaban pada waktu itu.[270] Oleh sebab itu, pemberdayaan bangsa juga bagian dari upaya merevitalisasi nilai-nilai luhur bangsa di masa lalu untuk dikontektualisasikan di masa kini dan masa mendatang.

1. Paradigma Pemberdayaan Bangsa

Dalam pemikiran Jasir ‘Audah sebagaimana mengutip pemikiran Imam al-Juwaini menyebutkan bahwa kepentingan publik (*al-hajah al-‘ammah*) merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan hukum fikih.[271] Salah satu aspek kepentingan publik yang sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan dan mensejahterahkan umat adalah pendidikan keislaman (*hifdz al-din*) dan keilmuan umum (*hifdz al-‘aql*) yang diperlukan untuk memberdayakan umat, karena dengan ilmu itu, inovasi dan kemajuan akan tercapai baik dalam bidang agama, budaya, politik maupun ekonomi. Pemberdayaan umat untuk mencerdaskan dan menyejahterakannya merupakan bagian dari

[270] Ristekdikti, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* , Cet I (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016), hlm. 61-63.

[271] Imam al-Gahzali telah menjadikan *maqashid al-Syari’ah* sebagai dasar pembangunan hukum-hukum fikih. Jasir ‘Audah, *Maqashid al-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadiin*, (Beirut: Maktabah al-Tauzi’ fi al-‘alami al-‘Arabi, 2011), hlm. 46 dan 48.

amanah UUD-NRI 1945, yakni *memajukan kesejahteraan umum* dan *mencerdaskan kehidupan bangsa*.[272]

Salah itu organisasi sosial keagamaan yang memiliki konsistensi dalam pemberdayaan demi kemajuan umat dan masyarakat adalah Nahdlatul Ulama (NU) walaupun perjalanan naik turun dalam percaturan politik nasional. Sebagai organisasi sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia telah berperan aktif dalam berjuang dan mempertahankan NKRI serta mengisinya dengan pembangunan. Sebagai salah satu doktrin praktis hidup beragama Islam, fikih memberikan rambu-rambu praktis dalam menjalani hidup bermasyarakat dan berbangsa.

> Nahdhatul Ulama sudah hampir memasuki usia 100 tahun atau satu abad. Ia berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, NU tak didirikan oleh Indonesia. Tapi, justru NU lah yang ikut membidani lahirnya Indonesia. Tokoh-tokoh NU terlibat dalam pembuatan konsep cetak biru Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, NU pun melibatkan diri dalam proses-proses pembangunan. NU berkali-kali ganti baju mengikuti derap langkah dan dinamika bayi bernama Indonesia. NU pernah menjadi organisasi sosial kemasyarakatan, menjadi sub-ordinat partai politik Islam Masyumi lalu keluar menjadi partai politik secara penuh dan mandiri, kemudian berfusi dalam partai Islam PPP, selanjutya kembali menjadi organisasi sosial kemasyarakatan. Di era reformasi, NU membidani lahirnya partai politik yang dimaksudkan sebagai saluran politik warga NU. Namun, dalam perkembangannya, dengan berbagai alasan, sebagian warga NU mendirikan sejumlah partai politik yang terpisah dengan partai politik bentukan NU.[273]

---

[272] Eko Sulistiyo, *Jokoway...*, hlm. XIII.

[273] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

Dinamika perjalanan organisasi NU begitu dinamis, jauh dari kesan statis. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo Jawa Timur menjadi salah satu saksi sejarah dinamika perjalanan NU. Di pesantren ini, puluhan tahun lalu Nahdhatul Ulama mengambil dua keputusan monumental. *Pertama*, Nahdhatul Ulama menyatakan penerimaan secara terbuka terhadap Pancasila sebagai dasar bernegara bukan dasar beragama ketika banyak umat Islam masih ragu antara menerima dan menolak Pancasila.[274]

> Nahdhatul Ulama dengan mantap mendeklarasikan penerimaannya, tanpa ada keraguan. KH Achmad Siddiq, salah seorang Rais Am PBNU, pernah menyatakan bahwa "Pancasila dan agama adalah dua hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain". Pendapat ini diamini oleh banyak kiai dan pengasuh pesantren lain. Namun, sejumlah kiai memberi argumen tambahan bahwa "Pancasila adalah ideologi dan ideologi bukanlah agama. Pancasila tidak boleh dijadikan agama. Islam adalah agama dan bukannya ideologi. Agama diciptakan oleh Allah, sedangkan ideologi dibuat oleh manusia". Pernyataan Kiai Achmad Siddiq itu merupakan kesimpulan dari diskusinya dengan para kiai sepuh lain seperti Kiai As'ad Syamsul Arifin, KH Mahrus Ali (Lirboyo Kediri), dan Kiai Ali Maksum (Krapyak).[275]

Sejak saat itu, NU tidak lagi membuka diskusi mengenai dasar lain selain Pancasila. Hal ini bukan saja karena Pancasila telah teruji dalam sejarah, tetapi juga mengandung unsur-unsur dan nilai-nilai yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia.

---

[274] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

[275] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

Apalagi Indonesia tidak hanya dihuni umat Islam, tetapi juga umat agama lain, sehingga Indonesia menjadi sangat plural, baik dari sudut etnis, suku, agama maupun keyakinan. Karena itu, Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang sangat relevan di Indonesia.[276]

Keputusan yang sangat penting yang kedua adalah kesepakatan para ulama/kiai NU untuk kembali kepada Khittah NU sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah ijtima'iyah*). Kembalinya NU ke khittah 1926 bukanlah terjadi secara tiba-tiba, tetapi keputusan ini merupakan keputusan hukum (fikih) yang memiliki landasan kuat dari sisi penguatan dan pengembangan peran NU dalam memberdayakan umat dan rakyat. Setelah NU terlibat dalam politik praktis, kiai-kiai dan tokoh NU yang seharusnya berkiprah untuk memberikan layanan dakwah keumatan dan kemasyarakatan mengalami penurunan karena terlalu sibuk dengan politik praktis. Kerja-kerja pemberdayaan umat dan masyarakat menjadi terbengkalai. Keputusan kiai-kiai tersebut terbukti memberikan sumbangan penting dalam meningkatkan peran NU dalam memberdayakan umat dan masyarakat dalam ruang yang lebih luas dalam berbagai bidang kehidupan, bukan hanya mengurusi pencalonan DPR atau jabatan politis lainnya.

> *Kedua,* 33 tahun lalu para kiai yang tergabung dalam organisasi Nahdhatul Ulama berkumpul di pesantren ini mengikrarkan pendapat yang sama tentang pentingnya NU kembali ke khittahnya sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah ijtima'iyah*). Keputusan kembali ke Khittah 1926 ini tentu tak diambil secara tiba-tiba. Kembali ke Khittah 1926 merupakan kesimpulan dari refleksi panjang para kiai setelah puluhan tahun NU menjelma menjadi partai politik. Betapa para pengurus NU dan para kiai pesantren terperangkap dalam perebutan politik kekuasaan sembari

[276] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

melupakan tugas pokok untuk menggerakkan politik kerakyatan. Saat itu, demikian KH Muchit Muzadi, energi NU terkuras hanya untuk mengurusi orang-orang yang mau menjadi anggota DPR. Sementara kerja-kerja pemberdayaan masyarakat bawah terus terbengkalai.Begitu NU kembali ke Khittah 1926, maka duet kepemimpinan baru NU yang terpilih dalam muktamar NU ke 27 di Situbondo (KH Achmad Siddiq dan KH Abdurrahman Wahid) segera melakukan reorganisasi dan reorientasi NU. Bersama Kiai Achmad Siddiq, Gus Dur menggerakkan kerja-kerja pemberdayaan dan mendinamisasi pemikiran. Gus Dur melakukan kaderisasi secara sistematis bersama tokoh-tokoh muda NU lain.[277]

Dengan kembali ke Khittah 1926, NU lalu lebih banyak berbuat dan bekerja untuk kepentingan pemberdayaan umat dan masyarakat, misalnya lahir berbagai kajian keislaman ala ahlus sunnah wal jamaah, Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), *Lajnah Ta'lif wan Nasyr*,serta lembaga-lembaga yang bekerja dalam pemberdayaan bagi kaum yang rentan atas perlakuan tidak adil.

> Dengan Kembali ke Khittah 1926, maka: [1]. energi besar NU bisa difungsikan untuk bidang sosial kemasyarakatan yang sudah lama tak menjadi perhatian. NU tak terlilit soal-soal politik kepartaian. Sekiranya NU bicara politik, maka itu terkait dengan politik kerakyatan bukan politik kekuasaan. [2]. NU bisa membenahi lembaga pendidikan termasuk pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah yang dikelola warga NU. Lalu apa yang terjadi? Setelah 33 tahun kembali ke Khittah 1926, NU panen sumber daya manusia yang luar biasa. Kini mungkin NU

[277] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

> memiliki ratusan bahkan ribuan doktor, tak hanya di bidang *Islamic studies* melainkan juga ilmu-ilmu *non Islamic studies*.[278]

Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa keputusan NU untuk Kembali ke Khittah 1926 merupakan keputusan yang memiliki kebenaran historis dan aktual untuk senantiasa diterapkan dalam tata kehidupan umat dan bangsa yang majemuk ini. Dengan keputusan itu, warga NU kemudian menjadi lebih mandiri baik secara intelektual maupun politik karena mereka menempu perjuangan politik melalui jalur-jalur yang rasional dan konstitusional dengan mengandalkan kemampuan dan potensi dirinya.

> Tentu sebagaimana diketahui bahwa Kembali ke Khittah 1926 bukan merupakan larangan bagi warga NU untuk berjuang melalui partai politik. Kembali ke Khittah 1926 hanya ingin menegaskan bahwa sekiranya warga NU hendak berpolitik praktis, maka ia harus menggunakan saluran partai politik. Dengan perkataan lain, warga NU tak boleh menjadikan organisasi NU sebagai kendaraan politik.[279]

Keputusan kiai-kiai yang sangat bijak dan tepat dalam mengarahkan gerak langkah NU perlu dirawat dan dilestarikan agar peran NU semakin membumi dan merakyat. Tentu saja sebagai pewaris yang baik, kita harus senantiasa melakukan kontekstualisasi sesuai dengan kepentingan ruang dan waktu yang dibutuhkan umat. Secara global, pelaksanaan spirit Khittah NU 1926 di jiwa Lukman Hakim Saifuddin dapat dilihat dalam garis perjuangannya yang selalu hendak menempatkan agama sebagai pemandu nilai-nilai

---

[278] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

[279] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

luhur dan universal dalam mewujudkan kemaslahatan umat, tetap konsisten menempatkan agama tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sesuai dengan spirit itu, Lukman Hakim Saifuddin juga melakukan langkah-langkah konkrit dalam menjaga agama agar tetap dalam posisi yang suci dari pengaruh luar agama, misalnya musyawaah dan dialog. Kebijakan-kebijakan yang diprogramkan oleh Lukman Hakim Saifuddin sangat dekat dengan kebutuhan umat dan masyarakat, misalnya dalam masalah menjaga netralitas agama dalam politik praktis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga melakukan hal yang sama.

(Tokoh agama berkumpul di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, 27/10/2016)[280]

[280]*Jangan Gunakan Agama Untuk Kepentingan Pilkada*, http://poskotanews.com/2016/10/28/jangan-gunakan-agama-untuk-kepentingan-pilkada/, diakses 21 November 2018.

Dalam menyikapi Pilkada 2017, Ketua PBNU, Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa para pimpinan tokoh agama di Indonesia tetap berkomitmen menjaga bangsa Indonesia dalam suasana yang damai, aman, tertib. Semua tokoh agama menyepakati perlunya menjalankan sistem demokrasi yang baik, berakhlak dan tenang, damai, aman dan nyaman. Demikian juga Sekjen PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), Pendeta Komar Gultom, berharap para tokoh agama tidak menjadikan agama sebagai alat kepentingan sesaat dalam proses pilkada. Oleh sebab itu, para tokoh agama dan calon pimpinan daerah tidak boleh campuradukkan, apalagi mengurangi nilai-nilai agama hanya demi meraih kepentingan sesaat. Dengan demikian, yang menjadi komitmen utama seharusnya adalah membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Komitmen untuk membangun perdamaian bangsa juga hadir dari Sekjen Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Antonius Subianto, yang berharap bahwa pemerintah dan tokoh agama perlu tetap menjaga netral dengan cara demikian, maka proses yang baik tentu diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Intinya, perlu ada keteladanan dalam menyuarakan perdamaian.[281]

Dalam konteks ini, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan perlunya mengembalikan peran dan fungsi agama yang otentik, sehingga perlu ada pergeseran peran dan fungsi ormas keagamaan, yakni bagaimana agama berperan dan berfungsi untuk memberdayakan umat dan tanpa ada pembatas sebagaimana dalam sistem politik yang selalu ada pembatas dan penggolongan berdasarkan kepentingan, sedangkan agama termasuk ormas keagamaan bergerak dan bekerja di atas semua golongan dan kelompok untuk membangun kemaslahatan umat beragama secara keseluruhan.

[281] *Jangan Gunakan Agama Untuk Kepentingan Pilkada*, http://poskotanews.com/2016/10/28/jangan-gunakan-agama-untuk-kepentingan-pilkada/, diakses 21 November 2018

(Presiden tiba di tempat acara Majlis Ulama Indonesia (MUI) dijemput oleh Menteri Agama dan Ketua Umum MUI pada Tasyakur Milad ke-43 MUI di Jakarta)[282]

Sebagai seorang tokoh agama, Lukman Hakim Saifuddin memiliki jiwa dan pandangan yang inklusif terhadap semua aliran keagamaan. Lukman meyakini bahwa semua ajaran agama pasti memiliki nilai-nilai yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia, sehingga nilai-nilai universal ini yang hendaknya dijadikan pijakan dasar dalam membangun kerjasama kemanusiaan dan kebangsaan. Sikap dan pandangan iklusif Lukman tidak lepas dari profilnya sebagai tokoh agama yang berlatar belakang NU yang memiliki komtimen terhadap penerimaan Pancasila sebagai ideologi yang sejalan dengan agama Islam dan kedua-duanya harus dijadikan

[282]https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220203/menag-dampingi-presiden-joko-widodo-pada-tasyakur-milad-ke-43-mui, diakses 21 November 2018

landasan untuk membangun umat dan bangsa, tidak boleh dipilih salah satu. Keduanya merupakan dua sisi mata uang yang saling terkait yang menjadi landasan dalam pemberdayaan umat dan bangsa di Indonesia.[283]

(Pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Katolik Tingkat Nasional" mengusung tema 'Tebarkan Kedamaian Merawat Kebangsaan' di hotel Merlyn Park Jakarta, 13 September 2018)[284]

Sikap dan pandangan inklusif –misalnya melalui pertemuan antara agama atau tokoh agama- tentu saja sesuai dengan spirit ajaran al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber utama ajaran Islam sebagaimana diakui bahwa praktik hidup beragama Islam di

[283] Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

[284] https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220262/-pertemuan-tokoh-agama-dan-tokoh-masyarakat-katolik-tingkat-nasional, diakses 26 oktober 2018

Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai moderasi dan demokrasi. Itulah karakter keberagamaan umat Islam Indonesia yang menjadi modal dasar dalam membangun dan memberdayakan umat yang majemuk. Hal itu juga diakui dan disampaikan oleh M Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, pada acara Musabaqah Hafalan Quran dan Hadist Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alusu'ud Tingkat Nasional ke-7 dan ASEAN dan Pasifik ke-6 di Istana Wakil Presiden, pada tanggal 26 Maret 2015.[285]

> Quran dan hadits, lanjut Wapres, diharapkan juga dapat menjaga Islam dari hal-hal yang bersifat radikal, ekstrim dan brutal, seperti yang terjadi di banyak negara yang mayoritas Islam saat ini, seperti Afganistan, Pakistan, Irak, Suriah, Libya, Mesir dan sebagainya. "Menghancurkan, menewaskan, membunuh begitu banyak umat Islam yang tidak berdosa".....Lebih jauh Wapres mencermati konflik yang terjadi di beberapa negara tersebut, diakibatkan oleh adanya faktor internal, seperti pemimpin yang zalim di masa lalu. Kemudian Wapres menyebut faktor itulah yang menyebabkan terjadinya pelemahan terhadap suatu negara, sehingga akhirnya dapat diintervensi pihak dari luar. "Dengan mudah ajaran-ajaran radikal, dapat dipahami dan dilaksanakan, di masyarakat yang susah akibat kezaliman yang terjadi dari dalam maupun dari luar."[286]

Spirit pemberdayaan umat termasuk umat Islam untuk mengamalkan substansi ajaran agama sangat tampak dari kegiatan tersebut sebagaimana disampaikan M Jusuf Kalla yang menegaskan

---

[285] *Wapres: Quran dan Hadist Mendorong Terciptanya Tatanan Kehidupan Moderat dan Demokratis, http://jusufkalla.info/archives/2015/03/26/wapres-quran-dan-hadist-mendorong-terciptanya-tatanan-kehidupan-moderat-dan-demokratis/ diakses 26 Maret 2017*

[286] *Wapres: Quran dan Hadist Mendorong Terciptanya Tatanan Kehidupan Moderat dan Demokratis, http://jusufkalla.info/archives/2015/03/26/wapres-quran-dan-hadist-mendorong-terciptanya-tatanan-kehidupan-moderat-dan-demokratis/ diakses 26 Maret 2017*

bahwa ajaran-ajaran universal (agama) Islam harus dibebaskan dari ideologi radikal yang menjadi virus, sehingga umat Islam harus dibangun kesejahteraannya bukan hanya dari sisi paham keagamaan, tetapi juga dari sisi kesejahteraan ekonomi. Inilah yang kita lihat sisi lebih dari Lukman yang memiliki pandangan tidak hanya berorientasi murni agama dalam menyelesaikan urusan keagamaan, tetapi juga unsur-unsur lainnya yang terkait juga menjadi perhatian sebagai satu kesatuan yang perlu diselesaikan. Paradigma pemberdayaan umat itu sepaham dengan pemikiran M Jusuf Kalla yang menghendaki bagaimana negara (dalam hal ini sistem birokrasi pemerintahan) harus kuat secara ekonomi, politik dan juga menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Jika hal itu kuat, maka umat beragama tidak akan mudah dirasuki virus radikalisme. Apalagi spirit ukhuwah dijadikan media untuk membangun kebersamaan baik intern umat beragama maupun antara umat beragama, tentu hal itu akan menjadi amunisi yang kuat dalam mengakselerasi pemberdayaan umat.[287]

Dalam konteks ini, Lukman Hakim Saifuddin juga menata sistem birokrasi yang mampu membangun budaya kerja dan mampu mendorong kemajuan bagi masyarakat, yakni birokrasi yang melayani sebagai ganti dari sistem birokrasi yang elitis sesuai dengan spirit pemerintahan Jokowi-JK.[288]

2. Paradigma Kerukunan Bangsa

Dalam dekade terakhir, Indonesia sering mengalami konflik di kalangan sesama anak bangsa, misalnya konflik di Ambon, Kalimantan, Situbondo Jatim dan lainnya. Kondisi ini sangat memperihatinkan karena ajaran agama termasuk Islam tidak

[287] *Wapres: Quran dan Hadist Mendorong Terciptanya Tatanan Kehidupan Moderat dan Demokratis, http://jusufkalla.info/archives/2015/03/26/wapres-quran-dan-hadist-mendorong-terciptanya-tatanan-kehidupan-moderat-dan-demokratis/ diakses 26 Maret 2017*

[288] Hasil Wawancara dengan Rohimin, Ketua MUI Propinsi Bengkulu, Agustus 2018.

mengajarkan konflik/pertengkaran, tetapi ajaran agama justru mengajarkan perdamaian dan kerukunan. Oleh sebab itu, adanya konflik terutama yang bernuansa agama sebagaimana yang pernah terjadi di Ambon merupakan pelajaran yang tidak boleh terulang kembali di masa kini dan mendatang. Apalagi di tengah persaiangan global yang penuh tantangan, maka semua anak bangsa harus bersatu padu dalam perbedaan untuk saling mendukung dan memperkuat untuk memajukan bangsa dan negara. Apalagi Indonesia saat ini sering dijadikan salah satu contoh dalam mengelola kemajemukan karena kerukunan umat dan bangsa berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala konflik tersebut. Hal ini menjadi tatangan pemerintah terutama Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi paling besar dalam masalah bidang keagamaan atau kerukunan umat beragama.[289] Oleh sebab itu, dalam membangun kerukunan beragama perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

[289] "Terlebih di tengah perkembangan dan dinamika kehidupan global saat ini, semakin banyak negara yang menjadikan Indonesia sebagai panutan dalam mengelola kemajemukan dengan tetap mempertahankan kerukunan". *Amalkan Ajaran Alquran dalam Kehidupan Berbangsa*, http://ksp.go.id/amalkan-ajaran-alquran-dalam-kehidupan-berbangsa/, diakses 9 September 2017.

(Menteri Agama RI bersama Presiden RI dalam acara silaturahmi dengan para peserta musabaqah Hafalan Alquran dan Hadits Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su'ud Tingkat ASEAN dan Pasifik ke-8 di Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 4 Mei 2017)[290]

Dalam upaya mencapai kerukunan bangsa ini sebagai bangsa yang beragama, maka dibangun dari kerukunan umat beragama, Zaini Muhtarom membagi tiga tingkatan dialog: *Pertama,* dialog yang dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama dalam membangun saling pengenalan dan pengetahuan untuk membangun penghargaan dan penghormatan sesama pemeluk agama. *Kedua,*dialog yang dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama untuk mengenali perbedaan masing-masing agama yang dipeluknya untuk mencari titik persamaan (*kalimatun sawa'*) atau persamaan. *Ketiga,*dialog yang dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama

[290]*Amalkan Ajaran Alquran dalam Kehidupan Berbangsa*, http://ksp.go.id/amalkan-ajaran-alquran-dalam-kehidupan-berbangsa/, diakses 9 September 2017.

untuk mengkaji dan mendalami ajaran-ajaran agama yang belum dikenali sebelum terjadinya dialog, sehingga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan terbangun komitmen dan kerjasama dalam mambangun kerukunan beragama.[291]Karena itu, kerukunan umat beragama yang hendak dibangun di sini bukanlah kerukunan umat beragama yang pasif (yang berarti rukun karena keadaan terpaksa di dunia yang plural), tetapi kerukunan umat beragama yang aktif (yang berarti rukun karena memang lahir dari kehendak dan keinginan yang tulus bukan karena terpaksa).[292]

> Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa acara deklarasi gerakan cinta kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh sekitar 1200 pemuka lintas agama di Provinsi Sumatera Barat merupakan inisiasi mulia yang patut diapresiasi. Apalagi dalam ajaran Islam, kerukunan beragama merupakan norma yang harus dijalankan, sehinggaIslam memberikan ruang kebebasan berakidah dan beragama bagi umat manusia, dan tidak membenarkan adanya pemaksaan dalam beragama.
>
> Dalam pandangan saya, Sumatera Baratmemiliki potensi besar dalam pengembangan budaya damai, toleransi, dan kerukunan umat beragama. Satu dan lain hal, bahkan dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. Di sini ada pranata budaya yang sangat kuat dipegangi masyarakat, dan sejalan dengan semangat kerukunan yang terus kita pelihara. Di Sumatera Barat, menurut kajian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, terdapat sejumlah potensi kerukunan yang dapat terus

---

[291] Zaini Muhtarom, "Bagaimana Mencermati Suatu Dialog", dalam Adurrahman dkk, "Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H. A. Mukti Ali, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 483.

[292] Haryatmoko, "Pluralisme De Jure, Kritik Ideology", dalam M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam*, (Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm. 38; M. Amin Abdullah, "Kebebasan Beragama Atau Dialog Antaragama 50 Tahun Hak Asasi Manusia', dalam *Jurnal Filsafat dan Teologi*, no. 11, Tahun 1998, hlm. 57; Ridwan Lubis, "Upaya memperoleh Bentuk-bentuk Kerukunan Hidup Beragama Untuk Meningkatkan Ketahanan Msyarakat", dalam Mursyid Ali (ed.), *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-agama*, (Jakarta: Balitbang Agama, 1999-2000), hlm. 122.

dipelihara, direvitalisasi, dikreasikan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Di dalam masyarakat Minang, misalnya, ada idiom *"dimana bumi dipijak di sinan langik dijunjuang",* atau dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Prinsipnya, kita harus pandai beradaptasi dalam bermasyarakat dimana saja berada, tanpa memandang suku dan agama. Ada juga budaya Minang *"lamak di awak, katuju di urang"*, yang artinya, enak bagi kita, orang juga senang, yang mencerminkan sikap kebersamaan dalam bermasyarakat. Ada juga budaya *rambiari*, *julo-julo,* dan *badon cek*, yang mencerminkan sikap kebersamaan dan gotong-royong. Di sini juga ada sejumlah kearifan lokal (*local wisdoms*) yang sangat mendukung kerukunan. Misalnya ada istilah *"tungku tigo sajarangan",* atautiga pilar yang memusyawarahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, yakni: ninik mamak, alim ulama' dan cerdik pandai.[293]

Kerukunan umat beragama itu merupakan modal sosial yang sangat berharga yang harus kita lestraikan karena dengan modal sosial tersebut, kita dapat hidup rukun dan damai dalam menjalankan ibadah dan pembangunan nasional. Apalagi dengan adanya regulasi yang mengatur dalam membangun kerukunan umat beragama menambah semakin kuatnya tatanan hidup beragama yang rukun dan harmonis. Apalagi Lukman Haki Saifuddin juga memiliki kemampuan yang mumpuni dalam merajuk dan mencari titik temu antara umat beragama, dan relasi antara agama dan negara, sehingga hal ini akan mampu membangun relasi dan sinergi yang baik dalam membangun kehidupan beragama yang rukun dalam wadah NKRI.[294]

---

[293]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

[294]Hasil Wawacara dengan M Abzar, Pengurus DDI Kalimatan Timur, November 2018.

(Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mewakili Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Besar ke-8 Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), di GBI Mawar Saron, Jakarta, 13 November 2018)[295]

Sebagai wujud nyata dalam merawat dan melestarikan modal sosial berupa kemajemukan umat beragama yang tetap dalam hidup rukun dan damai, maka Lukman mengajak umat kristiani untuk mengedepankan moderasi beragama. Ia menyatakan: "saya ingin mengajak kita semua lebih mengedepankan moderasi beragama, bukan moderasi agama." Menurutnya, semua Agama pasti moderat. "Agama hadir dalam upaya menjaga, melindungi hak hidup masyarakat, serta untuk melindungi hajat hidup manusia," sehingga

[295]*Menag Buka Musyawarah Besar ke-8 Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI),*https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220327/menag-buka-musyawarah-besar-ke-8-persekutuan-gereja-gereja-pantekosta-indonesia--pgpi-, diakses 21 November 2018

kita sebagai pemeluk agama hendaknya menjalankannya sesuai dengan tujuan utama lahirnya agama ke dunia.[296]

> Selain modal sosial (*social capital*) yang sangat kaya itu, ada peran-peran Pemerintah Daerah, dan termasuk di dalamnya Kementerian Agama wilayah serta Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB, dalam memelihara kerukunan dan menyelesaikan kasus-kasus keagamaan. Demikian halnya, sejumlah regulasi di bidang kerukunan, seperti PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, juga memiliki peranan sangat penting. Yang disebut terakhir ini, merupakan sebentuk kearifan baru yang melengkapi dan merespon perkembangan dinamika masyarakat. Keduanya, yakni regulasi sosial berupa modal sosial masyarakat, dan regulasi negara berupa peraturan PBM, dsb., berperan secara bersamaan dan komplementatif dalam masyarakat yang majemuk dewasa ini.[297]

[296]*Menag Buka Musyawarah Besar ke-8 Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI),*https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220327/menag-buka-musyawarah-besar-ke-8-persekutuan-gereja-gereja-pantekosta-indonesia--pgpi-, diakses 21 November 2018

[297]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

(Menag Lukman Hakim saat memberi arahan pada Rakornas FKUB dan Konferensi Nasional ke IV Asosiasi FKUB Indonesia di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), 07/09/2018).[298]

Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pada tahun depan, Kementerian Agama telah menyusun program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan wawasan bagi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Indonesia khususnya dalam manajemen konflik keagamaan. Program ini tentunya untuk menjaga dan merawat kerukunan umat beragama yang sudah berjalan dengan baik di Indonesia sejak zaman dahulu.[299]

> Kerukunan umat beragama yang sudah terbangun di (Sumatera Barat khususnya dan) Indonesia pada umumnya merupakan pencapaian yang harus terus kita jaga dan lestarikan

[298] *Menag Hadiri Rakornas FKUB dan Konferensi Nasional ke IV*, https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220252/menag-hadiri-rakornas-fkub-dan-konferensi-nasional-ke-iv, diakses 21 November 2018

[299] *Menag Hadiri Rakornas FKUB dan Konferensi Nasional ke IV*, https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220252/menag-hadiri-rakornas-fkub-dan-konferensi-nasional-ke-iv, diakses 21 November 2018

sesuai dengan dinamika perkembangan zaman karena kerukunan yang terbangun saat ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang final, tetapi harus dimaknai secara dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Apalgi faktor non-agama terkadang dapat menyumbangkan munculnya konflik antara agama, sehingga kondisi ini harus menjadi pelajaran dan kewaspadaan kita bersama.

Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi, khususnya kepada para tokoh/pemuka agama, para pengurus FKUB, tokoh masyarakat, dan jajaran pemerintahan, serta umumnya warga masyarakat Sumatera Barat, yang sejauh ini telah dengan baik memelihara kerukunan umat beragama. Semoga pencapaian kedamaian dan ketentraman ini tidak menjadikan kita terlena, karena suasana kerukunan umat beragama sejatinya adalah kondisi yang sangat dinamis, sangat cepat mudah berubah dan bahkan terpengaruh hal-hal non keagamaan. Karenanya kita harus senantiasa waspada dan terus menerus dengan sadar mengupayakan terwujudnya kerukunan tersebut.[300]

Kerukunan beragama menghadapi tantangan yang semakin hari, semakin berat, karena kehidupan masyarakat yang majemuk dari segala seginya berada dalam pusaran kehidupan global yang bisa menggerus kearifan budaya bangsa dan juga momentum politik dengan adanya penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2018. Karena itu, kehadiran fikih kerukunan beragama berusaha membangun paham keilmuan moderat yang mendukung suasana keamanan dan ketenteraman yang kondusif serta menangkal segala bentuk paham radikal. Dalam hal ini, para ulama perlu melakukan langkah-langkah berikut.

[300]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

pertama, hendaknya para tokoh agama turut berperan menjaga kondusivitas keamanan dan ketentraman masyarakat, dalam lingkup tugasnya, dengan bersinergi bersama anasir lain di pemerintahan maupun di masyarakat. ***Kedua***, jaga netralitas kelembagaan ormas keagamaan, termasuk FKUB, dalam dinamika perpolitikan di level manapun. Jaga kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama dan lembaga keagamaan dengan memerankan sikap-sikap di atas kepentingan semua pihak, imparsial, dan menghindari sikap-sikap partisan. Dan ***ketiga***, kiranya para tokoh agama senantiasa turut serta dalam berbagai upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menjaga kebhinnekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[301]

Latarbelakang pentingnya fikih kerukunan beragama karena kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi masalah-masalah yang berat karena adanya teknologi informasi, baik di media cetak, media elektronik, maupun media online. Berbagai informasi hoaxs dan fitnah yang tersebar di berbagai media tersebut juga menjadi bagian dari kerja yang harus dibendung dan dibasmi oleh fikih kerukunan beragama untuk menjaga dan melestarikan kedamaian, ketenteraman dan keamanan masyarakat/bangsa dari segala bentuk gangguan.

Dalam kaitan perkembangan baru dewasa ini, saya perlu tegaskan, bahwa kondisi kerukunan beragama dewasa ini mendapat tantangan cukup besar dari kecanggihan teknologi informasi, media sosial dengan beragam jenisnya. Ketika terjadi suatu kasus keagamaan di suatu tempat, misalnya, maka dalam hitungan detik informasinya akan viral cepat tersebar ke berbagai penjuru. Berbagai pihak akan mendapat beritanya dari berita *online* atau media sosial. Seiring dengan itu, berita tidak

[301]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

> valid atau *hoax* juga ikut berseliweran memanaskan situasi atau bahkan memprovokasi dan mengaburkan realitas sesungguhnya. Dalam konteks ini, saya berharap segenap tokoh agama, ormas keagamaan, dan pengurus FKUB, bersama aparat Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, lebih sigap dan bersinergi dalam mengantisipasi hal-hal serupa ini. Jalin komunikasi lebih intensif, buat grup-grup media sosial beranggotakan lintas instansi yang dapat membantu memperlancar komunikasi dan koordinasi upaya pemeliharaan kerukunan. Kami di pusat pun melakukan hal itu. Ketika ada info awalan atau desas-desus yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, secara cepat, sigap, *real time*, kami saling membagi informasi dan mengupayakan solusi penanganannya termasuk member penjelasan dan rasa aman bagi masyarakat.[302]

Kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia berada dalam kondisi normal dan harmonis. Walaupun masih ada friksi dan gesekan di sejumlah tempat, tetapi hal itu bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik dan damai. Keberadaan masyarakat beragama yang majemuk, tetapi masih tetap rukun dan harmonis ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat kedewasaan dalam beragama, kebebasan menjalankan agama terjaga, sehingga walaupun ada arus budaya global yang membawa misi radikal dan keras, tetapi hal itu tidak mempengaruhi eksistensi masyarakat Indonesia pada umumnya. Walaupun tentu saja kondisi arus global dari gerakan keagamaan radikal yang mulai menyebar dan meluas ini harus segera dibendung dan diatasi karena hal itu merupakan penyakit yang harus diatasi bersama.

> Tidak kita pungkiri ada beberapa kasus intoleransi yang di-*blow up* media, tapi kita juga tidak boleh memungkiri terus terpeliharanya praktik-praktik bertoleransi masyarakat kita. Ada

[302]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

banyak *local wisdoms*, ada praktik-praktik kerjasama atau gotong royong warga, dan ada penggerak kerukunan seperti FKUB. Maka tak heran jika hasil survei nasional kerukunan umat beragama oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengonfirmasi kondisi kerukunan itu. Temuan kajian empirik ini menunjukkan bahwa rerata nasional kerukunan umat beragama di Indonesia pada 2015 berada pada poin 75,36 dalam rentang angka 1-100, yang berarti berada pada kondisi kerukunan tinggi. Bahkan pada tahun 2016 meningkat tipis ke poin 75,47. Hal ini tentu perlu kita syukuri.[303]

(Menag mengharapkan Pemuda Khonghucu memberikan sumbangsih dan kontribusi pada negara dan bangsa, Kongres I PAKIN digelar 9-11 Sepetember 2018di Jakarta)[304]

[303]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

[304]https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220255/buka-kongres-i-pakin--menag-imbau-pemuda-khonghucu-terus-berkontribusi-untuk-bangsa, diakses 26 Oktober 2018.

Walaupun hal itu diakui sebagai kajian yang positifistik, tetapi gambaran kuantitatif itu setidaknya memberikan potret peta pemikiran dan perilaku beragama di masing-masing wilayah/propinsi di Indonesia. Hasil survey ini juga menjadi cermin dalam dalam merumuskan program-program kerja yang hendak dirumuskan di masa-masa mendatang.[305]Nilai-nilai agama dapat menjadi landasan dan pedoman dalam membangun tata kehidupan umat beragama yang majemuk, sehingga nilai-nilai agama dan regulasi hukum negara saling melengkapi, bukan saling menafikan, misalnya menurut Abdullahi Ahmed AN-Na'im dalam hubungan antara hukum Islam dan hukum negara menjadi saling melengkapi, bukan saling bermusuhan yang destruktif, (*for Islamic Law and state law to be complementary, instead of being in mutually destructive confict*).[306]

[305]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

[306]AbdullahiAhmedAn-Na'im, "TheCompatibilityDialectic:MediatingtheLegitimate Coexistenceof IslamicLawandStateLaw", The Modern Law Review, Volume 73 January 2010 No 1, hlm. 4; lihat web resmi http://aannaim.law.emory.edu/.

(Menag menghadiri Peringatan Asadha Mahapuja 2562 BE tahun 2018 di pelataran Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah).[307]

Kerukunan hidup beragama yang sudah berjalan tidak boleh melupakan realitas historis kita, tetapi kita harus berusaha dan waspada atas berbagai tantangan yang semakin hari, semakin berat. Kenapa hal ini harus diantisipasi? Sebab, kondisi kerukunan beragama yang sedang dijalani bangsa Indonesia ini dapat berubah dengan cepat akibat adanya badai gerakan radikalisme dan fanatisme. Karena itu, kita sebagai anak bangsa harus mampu membangun paradigma kerukunan hidup beragama yang lebih handal dan solutif atas beragam masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, terutama beragam ancaman fitnah

[307]https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220194/hadiri-asadha-mahapuja-2562-be--menag--kitab-suci-adalah-sumber-gagasan-dan-inspirasi, diakses 26 Oktober 2018.

melalui informasi online, elektronik maupun cetak.Signifikansi kerukunan umat beragama harus terus dipupuk dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan kerjasama yang kondusif dan kontributif bagi bangsa. Hal itu digambarkan oleh Lukman dalam puisi berikut.

Dari Agam ke Pariaman
Ke Payakumbuh lalu Pasaman
Mensyukuri keberagaman
Kita pertumbuh kebersamaan
Ke Solok kita pun pergi
Berhimpun dalam nagari
Perkokoh upaya sinergi
Kerukunan terus lestari.[308]

Dalam kerangka itu, Lukman menegaskan perlunya kita bersama-sama untuk membina dan membimbing umat dalam menjaga kemakmuran, toleransi dan kerukunan hidup beragama. Kita juga pernu meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas, toleransi, dan kerukunan bagi umat. Para pokoh agama perlu membina dan memakmurkan umat agar umat menjadi dewasa dalam beragama, sejahterah dalam hidup, serta bersinergi dalam membangun tata kehidupan umat di segala lini. Akhirnya, *kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama kita semua* dalam membangun kerukunan umat beragama akan menjadi modal dasar dalam membangun stabilitas sosial dan pembangunan nasional yang menjadi harapan dan tujuan kita semua.[309]Demikian juga kebijakan Lukman selalu mengedepankan sikap inklusifitas dan kebersamaan dalam membangun umat dan bangsa, sehingga komitmen kerjasama antara umat beragama dalam memajukan bangsa dan negara menjadi titik tekannya, walaupun tentu saja dalam bidang akidah tidak bisa campur aduk, tetapi ada nilai-nilai universal yang semua agama memilikinya yang bisa digunakan untuk

[308]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017
[309]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

kepentingan pembangunan nasional. Hal ini juga menjadi penegaskan pemerintahan Jokowi dalam membangun toleransi dan kerukunan (antar) umat beragama.

(Menag mendampingi Presiden saat membuka Pertemuan Pembinaan Pimpinan Sinode (Induk Organisasi Gereja) dan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, 24/10/2018)[310]

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kerukunan, persaudaraan, dan persatuan adalah aset terbesar bangsa ini yang harus menjadi perhatian dan harus dijaga eksistensinya. Menurutnya, "*persatuan kerukunan dan persaudaraan itu aset terbesar bangsa kita, jangan gara-*

[310]*Didampingi Menag, Presiden Jokowi Meresmikan Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Seluruh Indonesia*,https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220309/didampingi-menag--presiden-jokowi-meresmikan-pertemuan-pimpinan-gereja-dan-rektor-ketua-perguruan-tinggi-keagamaan-kristen-seluruh-indonesia , diakses 21 November 2018

gara pilihanbupati, walikota, gubernur, presiden(persatuan, persaudaran dan kerukunan) menjadi dikalahkan, rugi besar terlalu besar ongkos sosial politiknya".[311]

Sebagai aset bangsa yang terbesar, otentisitas kerukunan bangsa harus diwujudkan dengan baik dan tulus dengan didasari oleh nilai-nilai agama (Islam) yang berwawasan kebhinekaan. Oleh sebab itu, perlu ada pergeseran paradigma pembangunan kerukunan (antar) umat beragama dari sekedar formalitas menjadi subantatif, sehingga suasana kerukunan umat beragama yang menjadi harapan dan tujuan seluruh elemen bangsa dapat terwujud dengan tulus dan pembangunan bangsa semakin mantap serta pesat.

D. Paradigma Kemandirian Bangsa

1.Paradigma Pendidikan Bangsa

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang asli yang lahir dari budaya Indonesia. Secara historis-empiris, pesantren yang lahir dari budaya masyarakat Indonesia telah berkiprah secara faktual dalam mendidik dan mencetak generasi bangsa Indonesia yang Islami dan memiliki jiwa nasionalisme yang kokoh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pejuang Kemerdekaan RI juga banyak lahir dari warga/alumnus pesantren bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi para penjajah dan juga dalam mempertahankan Kemerdekaan RI. Secara keilmuan, pesantren menjadi pusat pendidikan keilmuan Islam dalam membangun karakter generasi bangsa Indonesia yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam, kehalusan budi pekerti, dan semangat nasionalisme. Oleh sebab itu, pada era penjajahan, pesantren menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap eksistensi kolonial Belanda. Pada era Kemerdekaan RI antara tahun 1959

[311] *Didampingi Menag, Presiden Jokowi Meresmikan Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Seluruh Indonesia*,https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220309/didampingi-menag--presiden-jokowi-meresmikan-pertemuan-pimpinan-gereja-dan-rektor-ketua-perguruan-tinggi-keagamaan-kristen-seluruh-indonesia, diakses 21 November 2018

sampai 1965, pesantren menjadi salah satu pusat perjuangan dalam mempertahankan NKRI dari segala bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Sementara itu, pada era Orde Baru, pesantren telah berperan aktif dalam mendidik anak bangsa dalam rangka membangun sumber daya manusia sebagai bagian dari program pembangunan nasional yang seutuhnya. Pesantren mendidik generasi bangsa bukan hanya dengan bekal ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi juga ilmu-ilmu sains yang berguna dalam melakukan perubahan sosial politik (*political and social change*), sehingga alumnus pesantren diharapkan mampu berkiprah dalam memajukan kesejahteraan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) bagi rakyat Indonesia.[312]

Pembangunan kesejahteraan umum tentu saja sesuai dengan prinsip dari sila kelima Pancasila, yakni "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sehingga prinsip tersebut mencerminkan bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Prinsip hidup bangsa Indonesia menempatkan masyarakat sebagai tempat hidup dan berkembangnya individu, sedangkan individualitas dikembangkan seiring dengan sosialitas.[313] Pendidikan dan pemebelajaran ilmu agama Islam ersebut menjadi basis bagi pembangunan dan pengembangan ilmu-ilmu sains. Oleh sebab itu, pendidikan pesantren yang pada awalnya sering dianggap oleh masyarakat Indonesia hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam lambat laun kemudian berubah persepsi dan pandangannya, karena secara faktual, pendidikan pesantren terus berkembang dan bertransformasi menjadi pusat pendidikan yang tidak hanya

---

[312] Dakir & Umiarso, "Pesantren Dan Perubahan Sosial: Optimalisasi Modal Sosial Bagi Kemajuan Masyarakat", *Jurnal Al-A'raf*, Volume XIV, Nomor 1, Januari – Juni 201, 11.

[313]Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2012), hlm. 78-79.

mengajarkan ilmu agama Islam secara normatif, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu empiris kekinian.[314]

Perkembangan dekade terakhir peran pesantren tersebut telah menguatkan teori pemikiran Nurcholish Madjid dalam karyanya *Bilik-Bilik Pesantren*, Terbitan Dian Rakyat, Jakartayang sejak lama sudah mengakui bahwa pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan Islam yang asli lahir dari budaya bangsa Indonesia yang secara historis dan empiris telah memberikan sumbangan terhadap dinamika peradaban ilmu pengetahuan agama Islam bagi masyarakay Indonesia yang juga telah menjadi bekal pada zaman penjajahan dahulu sebagai spirit perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, pesantren pada dasarnya bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam yang murni untuk kepentingan *ibadah mahdla* tetapi juga ilmu-ilmu sains yang dapat berguna untuk memajukan peradaban masyarakat Indonesia sebagai bagian dari *ibadah ghairu mahdla*.[315]

Secara historis, dinamika pendidikan pesantren terus bergulir seiring dengan perguliran tuntutan zaman, misalnya Pesantren Rejoso Jombang Jawa Timur tidak hanya menyelenggarakan pendidikan Madrasah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Pendidikan Guru Agama (PGA), tetapi juga menyelenggarakan pendidikan sekolah umum, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), dan Universitas Darul Ulum. Eksistensi lembaga pendidikan formal di pesantren tersebut menunjukkan bahwa pesantren menjadi pusat pendidikan yang inklusif-dinamis terhadap dinamika kebutuhan hidup masyaraka Indonesia. Paradigma inklusif pendidikan pesantren itu terbukti dengan jalinan kerjasama yang tidak hanya terbangun ke bawah untuk kepentingan melayani masyarakat, tetapi juga membangun jalinan kerjasama

[314] Mohamad Yusuf dan Carl Sterkens, "Analysing The State's Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Volume 53, Nomor 1, 2015, hlm. 126-129.

[315] Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren,* (Jakarta: Dian Rakyat) hlm. 26-30.

dengan kepentingan politik nasional, seperti keterbukaan pesantren Rejoso atas kehadiran pejabat negara, Presiden yang sudah pernah berkunjung ke Pondok Rejoso, bahkan walaupun kepada Sudomo, seorang Kristen juga terbuka dalam membangun *ukhuwah basyariah* dan *ukhuwah watahniyah*.[316]

Senada dengan prinsip pendidikan pesantren tersebut, Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang secara konsistensi mengajarkan nilai-nilai pendidikan dan perjuangan untuk memajukan kesejahteraan umum (baca: *al-mashlahah al-ammah*), sehingga nilai-nilai universal yang mendukungnya menjadi perhatian pendidikan pesantren seperti pembinaan nilai-nilai ketulusan, kesantunan, kerukunan, moderasi, toleransi, dan kerjasama.[317]

Jika ada lembaga pendidikan pesantren mengajarkan paham radikalisme, maka itu pada dasarnya bukanlah lembaga pendidikan pesantren, tetapi "organisasi-mirip-pesantren" yang berusaha merusak lembaga pendidikan (pondok) pesantren. Lembaga pendidikan pesantren yang asli lahir dari budaya Indonesia tentu saja tetap mengajarkan nilai-nilai moderasi, toleransi dan keseimbangan, sehingga visi *Rahmatan lil Alamin* dari ajaran Islam yang selalu hendak menebarkan perdamaian dan akhlakul karimah tetap terpatri. Lembaga pendidikan pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam secara komprehensif akan menjadi bekal para santri untuk menangkal paham radikal dan ekstrim. Pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa "ada hubungan yang signifikan antara penguasaan ilmu keagamaan dengan penghindaran tindakan kekerasan atas nama agama. Artinya, semakin mendalam pengetahuan keagamaan seseorang, maka seseorang semakin

---

[316] Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Dian Rakyat) hlm. 83-87.

[317] Lukman Hakim Saifuddin, *Amanat Menteri Agama Ri Sebagai Pembina UpacaraPada Acara Penutupan Perkemahan Jambore Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah*, Karanganyar, 26 Februari 2016

menghindar untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama".[318]

Jika kita menelusuri wacana keagamaan Islam radikal,hal itu pada dasarnya lahir dari paradigma keilmuan Islam yang dangkal dan adanya kepentingan pihak luar Islam yang hendak merusak Islam dari dalam, sehingga kita harus membekali diri dan umat Islam dengan bekal pemahaman keagamaan Islam yang komprehensif terutama dalam menghadapi era global yang cukup kuat tekanannya terhadap sosialisasi paham keagamaan radikal. Dengan menggunakan kerangka berpikir Tadjoer Ridjal Baidoeri dalam karyanya yang berjudul "Ragam Reaksi Akulturatif Masuknya Ide-ide Baru dalam Dunia Pesantren", *Makalah*, 2009, kajian ini mengemukakan paradigma multikultural dinamis[319] dalam upaya melahirkan wacana pendidikan (pesantren) Islam multikutlural.

Mengapa pendidikan multikutural itu penting? Dalam karya yang berjudul, *An Introduction to Multicultural Education*,terbitan Allyn and Bacon, Boston, 1993, James A Banks sebagai perintis pendidikan multikultural mengemukakan bahwa adanya sebagian sistem pendidikan yang mengedepankan penguasaan kompetensi berpikir, bukan pada apa yang perlu dipikirkan. Implikasi sistem pendidikan multikultural ini pada dasasarnya berusaha mendidik peserta didik untuk bisa memahami jenis pengetahuan dalam kerangka ruang kehidupan manusia yang majemuk, sehingga . Dari

---

[318]Lukman Hakim Saifuddin, *Amanat Menteri Agama RI Sebagai Pembina Upacara Pada Acara Penutupan Perkemahan Jambore Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah*, Karanganyar, 26 Februari 2016.

[319]*Dalam paradigma multikultural, ada dua orientasi, yaitu Pertama, multikultural statis yang memiliki pandangan bahwa keragaman merupakan realitas yang fragmentatif. Kedua, paradigma multikultural dinamis yang memiliki pandangan bahwa keragaman budaya memiliki hubungan yang saling terkait, sehingga ada proses interkulturalitas yang meleburkan wacana-wacana fregmentatif menjadi identitas kolektif yang saling melengkapi dan dinamis walaupun ada perbedaan, seperti anggota tubuh walaupun berbeda-beda tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dan menopang untuk keutuhan satu jiwa.* Moh Dahlan, "Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2012, hlm. 4.

proses pendidikan itu, peserta didik diajak untuk menerima berbagai perbedaan dalam memahami ilmu dinamika pengetahuan. Demikian juga Cherry A McGee Banks (ed.), dalam karyanya yang berjudul *Handbook of Research on Multicultural Education*, 2nd Edition. San Jossey Bass, Fransisco, 2001, mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah sistem pendidikan yang mengajarkan rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan ilmu pengetahuan yang bisa membekali pemahaman kepada peserta didik dalam keragaman budaya dan etnis sebagai realitas hidup pribadi dan sosial. Oleh sebab itu, paradigma pendidikan multikultural pada dasarnya bertujuan melakukan pembaruan sistem pendidikan dari ekslusif kepada inklusif.[320]

Secara global, pendidikan multikultural telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan rekomendasi UNESCO, Oktober 1994 di Jenewa yang mengemukakan bahwa (a) pendidikan harus mampu melahirkan pemahaman dan kesadaran peserta didik dalam menerima kebhinekaan hidup pribadi dan sosial; (b) pendidikan harus mampu mewujudkan konvergensi gagasan dalam memperkuat perdamaian, persaudaraan dan solidaritas; (c) pendidikan harus mampu membangun kesadaran dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik-konflik; dan (d) pendidikan harus mampu melahirkan peserta didik yang memiliki sikap yang toleran dan tulus dalam hidup yang majemuk.[321]

Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian di sini adalah paradigma pendidikan agama Islam yang dapat menjadi salah satu pendekatan *soft-power* dalam upaya menangkal paham radikalisme dan sekaligus memperkuat paham nasionalisme. Salah unsur yang memiliki peran penting dalam perjuangan dan mempertahankan nasionalisme bagi Kemerdekaan RI adalah ulama dari pesantren

---

[320] Muh Sain Hanafy, "Pendidikan Multikultural dan Dinamika Ruang Kebangsaan", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 123-124.

[321] Jiyanto dan Amirul Eko Efendi, *Implementasi Pendidikan Multikultural di Madrasah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, hlm. 29-30.

yang tekun dan istiqamah mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat. Melalui Resolusi Jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari yang menyatakan "wajib hukumnya bagi pemeluk umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI", maka warga masyarakat Muslim berbondong-bondong untuk keluar berperang melawan penjajah yang berusaha mengganggu Kemerdekaan RI yang sudah diraihnya pada 17 Agustus 1945.[322]

Inilah alasan pentingnya pendidikan Islam multikultural dalam ajaran Islam.[323]Apalagi jika kita melihat fenomena konflik beragama yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Ambon dan Poso, belum lagi perbedaan etnik tertentu yang terjadi di Kalimantan Barat.[324] Secara global, kita juga perlu mengantisipasi gerakan radikalisme transnasional, misalnya jaringan Hambali yang telah melakukan tindakan teror bom di sejumlah tempat di Indonesia.[325] Kondisi itu sesungguhnya berbeda dengan karakter beragama dari bangsa Indonesia yang cinta damai dan toleran.

Hasil kajian Mujammil Qomarmengemukakan bahwa Islam sebagai agama fitrah tidak bisa lepas dari realitas empiris yang dialami pemeluknya, sehingga tradisi penyampaian misi keagamaan dan beragama Islam akan memiliki variasi yang sangat beragam walaupun sama-sama berdasarkan pada sumber yang sama dari al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga Islam yang berada dalam

---

322 Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI pada Pelatihan Bela Negara "Bela Negara Pendidikan Agama Islam dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia" Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 26 Mei 2017.

323 Sapendi, "Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Pendidikan Tanpa Kekerasan, *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, hlm. 89.

324 Sapendi, "Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Pendidikan Tanpa Kekerasan, *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, hlm. 89.

325 Tindakan teror bom telah dirancang dan dilakukan Hambali bersama al-Qaeda yang kemudian ditindalanjuti oleh orang dekatnya, misalnya bom Bali I, bom Marriot, bom Kedutaan Besar Australia, bom Bali II, dan bom Marriot-Rizt Carlton. As'ad Ali Said, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 258.

kawasan regional tidak akan bisa juga lepas dari pengaruh tradisi regional itu.

> Memang Islam regional tidak mungkin mampu mensterilkan dari pengaruh suatu kawasan (region) tertentu. Machasin menyatakan bahwa tidak ada satu agama pun yang mampu melepaskan diri dari tradisi panjang yang diwujudkan masyarakat pemeluknya. Islam yang dipahami dan dipraktikkan orang Jawa berlainan dengan Islam yang dipahami dan dihayati oleh orang-orang Sunda. Dalam skala yang lebih makro lagi, Islam yang dihayati orang-orang Timur Tengah, dalam batas tertentu, berbeda dengan Islam yang dihayati bangsa Indonesia. Dengan begitu, Muslim masing-masing daerah memiliki pemahaman dan penghayatan Islam yang khas sehingga beragam dan tidak bisa dipaksakan menjadi satu pemahaman dan satu penghayatan. Justru keragaman pemahaman dan penghayatan Islam ini sebagai suatu kekayaan kultural yang berarti.[326]

Dalam kawasan geografis dengan mengambil contoh Islam Nusantara, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa fakta geografis sangat penting dalam memahami dan menjelaskan islamisasi di kawasan Nusantara. Letak geografis Nusantara yang berada jauh dari kawasan Arab menjadi penyebab dalam proses penyampaikan misi keisalaman sangat berbeda dengan proses penyampaian misi keisalaman di kawasan-kawasan lainbaik di Timur Tengah, Afrika Utara maupun Asia Selatan. Proses penyampaian misi keisalaman (pendidikan keagamaan Islam) di wilayah Nusantara dilakukan oleh para penyebar agama Islam melalui saran budaya dan adat yang berkembang dan berlaku di masyarakat Nusantara sehingga wajah Islam Nusantara mencerminkan budaya Islam yang ramah dan damai, bukan Islam yang marah dan radikal. Kondisi ini berbeda

[326] Mujamil Qomar, "Ragam Identitas Islam di Indonesia dari Perspektif Kawasan",*Epistemé*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015,hlm. 323.

dengan proses penyampaian misi keislaman di kawasan Timur Tengah yang menggunakan sarana kekuasaan atau pendekatan militer berupa penaklukan sehingga wajah Islam yang ditampilkan mencitrakan keras, marah dan radikal.[327]

Hasil kajian Mujamil Qomar dan Azyumardi Azra memiliki landasan teoritik yang kuat jika kita membaca hasil penelitian T.W. Arnold dalam karyanya yang berjudul *The Preaching of Islam A History of the Propagation of the Muslim Faith*yang menyatakan bahwa karakter umat Islam di Indonesia menerima ajaran-ajaranagama Islam dengan cara damai dan melalui kesadaran, bukan dengan cara kekuasaan atau kekerasan, sehingga cara beragama yang ramah dan damai itu menjadi jati diri umat Islam Indonesia.[328]

Dalam karyanya, *Kyai dan Perubahan Sosial,* terbitan P3M, Jakarta, 1987, Hiroko Horikoshi menjelaskan bahwa kiai pesantren telah berhasil membangun tradisi berpikir dan bekerja yang inovatif dalam melakukan perubahan sosial dan telah berhasil merubah budaya masyarakat yang materialistik menjadi religius dengan tetap memiliki etos kerja yang tinggi dalam bidang bisnis dan kerja-kerja sosial.[329]Paradigma pembelajaran atau pendidikan yang inovatif dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat juga dilakukan di wilayah Asia seperti Malaysia, Thailand, Philippina Korea, Jepang, dan Hong Kong yang telah mengembangkan sistem pembelajaran inovatif yang berbasis hasil untuk mewujudkan lulusan yang kompetitif dan kebertahanan dalam menghadapi masa depan masyarakat dan ekonomi global.[330]

---

[327] Mujamil Qomar, "Ragam Identitas Islam di Indonesia dari Perspektif Kawasan",*Epistemé*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015,hlm. 323.

[328] T.W. Arnold, *The Preaching of Islam A History of the Propagation of the Muslim Faith*, Second Edition Revised And Enlarged, (London: Constable & Company Ltd, 1913), hlm. 161; As'ad Ali Said, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 258..

[329] Dakir & Umiarso, "Pesantren dan Perubahan Sosial: Optimalisasi Modal Sosial Bagi Kemajuan Masyarakat", *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XIV, No. 1, Januari – Juni 2017, hlm. 11.

[330] Cameron Richards, "Towards a Restoration of the Humanities in the Future University: Asia's Opportunity", *Kemanusiaan,* Volume 18, Nomor 2, (2011), hlm. 32.

Dalam kerangka paradigma pembelajaran dan pendidikan Islam, Lukman Hakim Saifuddin merumuskan pemikiran dan kebijakan pendidikan Islam yang berorientasi pada *output* dan *outcome* yang kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek spiritual dan rasional dalam muatan pembelajarannya. Paradigma pendidikan Islam yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat tentu saja harus inklusif terhadap realitas kemajemukan masyarakat Indonesia, sehingga peserta didik dari lingkungan pendidikan Islam dapat menjadi pengusung gerakan *Islam rahmatan lil alamin, Islam yang cinta damai dan toleran, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, sebagaimana telah diwariskan oleh para founding fathers pondok pesantren di masa silam*".Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dalam dunia pesantrentidak hanya mampu membangun tradisi belajar *tafaqquh fi al-din*, tetapi juga mampu membangun tradisi keilmuan yang dapat melahirkan *kader intelektual dan cendekiawan muslim yang profesional dan berintegritas dan benteng pertahanan Islam Rahmatan lil Alamain*.[331]

Berangkat dari realitas tersebut, pesantren pada dasarnya memiliki peran besar dalam pembangunan tradisi belajar keilmuan Islam dan membangun kemajuan umat dan bangsa yang religius dan profesional, sehingga wajar jika Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan hari santri tersebut menunjukkan bahwa santri yang lahir dari dunia pendidikan Islam/pesantren lamat laun diakui kontribusinya dalam membangun kemajuan umat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam konteks kekinian, kita juag perlu melakukan redifinisi terhadap terminologi santri, sehingga santri itu seharusnya tidak hanya seseorang yang belajar agama di pondok pesantren Muhammadiyah atau Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama saja, tetapi juga perlu diperluas terhadap mereka yang memiliki komitmen dan

[331] Lukman Hakim Saifuddin, *Amanat Menteri Agama RI Sebagai Pembina Upacara Pada Acara Penutupan Perkemahan Jambore Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah*, Karanganyar, 26 Februari 2016

konsistensi dalam menegakkan kebaikan *(amar ma'ruf)* dan menentang segala bentuk kemungkaran *(nahi mungkar)* dengan cara-cara yang berakhlaqul karimah.[332]

Cara-cara berdakwah dan mengajarkan ajaran agama Islam yang damai dan ramah sudah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw ketika terjadi *Fath Mekkah*, yakni Nabi Muhammad saw telah mengajarkan tradisi hidup dan beragama yang humanis, tidak ada balas dendam, apalagi kesewenang-wenangan. Demikian pula ketika ia berada di Madinah, ia membuat Piagam Madinah yang isinya menanamkan tradisi hidup yang toleran dan ramah terhadap non Muslim.[333]

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, paradigma pendidikan Islam terutama di dunia pesantren yang mengajarkan budaya multikultural itu perlu terus digali, dilestarikan dan diamalkan untuk membangun kerukunan dan keharmonisan umat yang taat dalam beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir-batin.Dengan tradisi multikultural itu, pesantren telah berhasil menanamkan tradisi beragama Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, Islam yang mengusung pengamalan prinsip *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (seimbang).[334]

Demikian juga melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimas Kementerian Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin telah berhasil membangun iklim kerja yang baik dalam membangun wacana moderasi agama di perguruan tinggi yang dikukung dengan penguatan kelembagaan perguruan tinggi

---

[332] Lukman Hakim Saifuddin, *Amanat Menteri Agama RI Sebagai Pembina Upacara Pada Acara Penutupan Perkemahan Jambore Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah*, Karanganyar, 26 Februari 2016

[333] Abdul Mustaqim, "Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an", *Epistemé*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 164-165.

[334] Lukman Hakim Saifuddin, *Amanat Menteri Agama RI Sebagai Pembina Upacara Pada Acara Penutupan Perkemahan Jambore Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah*, Karanganyar, 26 Februari 2016; Hadi Rahman dkk, *Lukman Hakim Saifuddin: Memimping Kementerian Agama Periode Oktober 2014-Desember 2015*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, 2016), hlm. 48

melalui program transformasi kelembagaan dari Sekolah Tinggi menjadi Institut dan dari Institut menjadi Universitas. Tidak hanya itu, Lukman Hakim Saifuddin juga telah berhasil menata sistem birokrasi yang baik, sehingga PTKN terus meningkat baik dari sisi mutu keilmuan maupun kelembagaannya.[335]

2. Paradigma Spirit dan Etos Kerja Bangsa

Soekarno menegaskan dalam pidato pembukaan Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung bahwa rakyat Indonesia harus bangkit menentang imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Bahkan Soekarno menegaskan bahwa kebangkitan rakyat Indonesia dan umat Islam se-Dunia akan menjadi tanda kematian daripada seluruh imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Dengan demikian, jika umat Islam hendak hidup kembali dengan baik dan subur, maka harus dibebaskan dari seluruh imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Soekarno menegaskan bahwa kita sebagai umat beragama harus berdiri di atas kaki sendiri dan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh agama Islam terhadap kita.[336]

> Kita tidak minta tolong kepada siapa pun, kita berdiri di atas kaki sendiri. Sekadar kita, Saudara-saudara, bersama-sama dengan umat Islam sedunia, bersama-sama dengan semua tenaga New Emerging Forces, kita menentang imperialisme, menentang kapitalisme, menentang kolonialisme, menentang pengisapan, menentang exploitation de phomme par I'homme, menentang *exploitation de nation*

[335] Hasil wawancara dengan Dr Ruchman Basori, Kasi Diktis Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, November 2018

[336] Soekarno, "*Kebangkitan Umat Islam Sedunia, Lonceng Kematian bagi Seluruh Nekolim, Amanat pada Rapat Umum Penutupan Konferensi Islam Asia-Afrika (KIAA) di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, 14 Maret 1965*", dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm 325-326.

par nation. Ini adalah kewajiban kita, Saudara-saudara, *ever onward, never retreat*.[337]

Semangat kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin juga menggelora dalam upaya membangkitkan kecintaan terhadap tanah air. Walaupun berada dalam kemajemukan yang luar biasa besar, tetapi kita harus tetap konsisten menjaga kebersamaan dan kemandirian yang dibuktikan dengan teguhnya jati diri kita, juga kemandirian ekonomi. Gambaran Indonesia mengenai kemajemukan tersebut bukan hal yang abstrak, tetapi kenyataan yang sudah diwariskan pada kita semua, termasuk anak-anak muda Indonesia.[338]

> Hanya dengan tanggung jawab, integritas dan kecintaan tanpa batas, ibu pertiwi akan selalu tersenyum melapangkan jalan untuk Indonesia 2035. Hari ini bukan pertemuan biasa, tetapi istimewa karena wajah Indonesia masa depan sedang dilukis anak-anak muda melalui berbagai potensinya. Ada banyak tema yang hendak didiskusikan, dan hampir semuanya menjadi masalah fundamental yang sedang dan akan terus dihadapi bangsa ini. Lagi-lagi, Saya harus menyemangati anda semua dengan kutipan Bung Karno yang pernah mengatakan: "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia".[339]

Dalam upaya membangun kemandirian, Lukman Hakim Saifuddin membidiknya memulai dari aspek spirit keberagamaan atau keislaman karena selain sumber daya manusia melalui pendidikan Islam, juga sangat spirit keislaman sangat menentukan

---

[337] Soekarno, "*Kebangkitan Umat Islam Sedunia, Lonceng Kematian bagi Seluruh Nekolim, Amanat pada Rapat Umum Penutupan Konferensi Islam Asia-Afrika (KIAA) di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, 14 Maret 1965*", dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm 327.

[338]Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI Pada Studium Generale "*Temu Kebangsaan Orang Muda: Orang Muda dan Indonesia 2035*" Bogor, 9 April 2016.

[339]Lukman Hakim Saifuddin, Sambutan Menteri Agama RI Pada Studium Generale "*Temu Kebangsaan Orang Muda: Orang Muda dan Indonesia 2035*" Bogor, 9 April 2016.

kemajuan suatu bangsa, bukan hanya sumber daya alamnya, sehingga pembangunan sumber daya manusia yang islami menjadi sangat penting melalui berbagai kegiatan keislaman tidak hanya lembaga formal pendidikanIslam, tetapi juga melalui berbagai media dakwah, majlis taklim, khutbah jum'at, kultum, dalam upaya membangun kemandirian ekonomi. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang sangat strategis di antaranya ialah menyelenggarakan layanan dakwah dan keagamaan. Dengan segala bentuk keberhasilan itu, Kementerian Agama berpijak pada potensi dan kekuatannya bersama-sama elemen seperti para pendidik, para tokoh agama, juga ormas-ormas keagamaan Islam yang menjadi penyelenggara layanan dakwah, majlis taklim, khutbah jum'at, kultum, termasuk pendidikan Islam. Dalam upaya membangun kemandirian bangsa, kita setidaknya harus melakukan dua hal penting, yakni *Pertama*, kita harus meningkatkan mutu wawasan keberagamaan dan kebangsaan melalui berbagai kegiatan keagamaan tersebut, sehingga dapat membentuk umat yang mandiri dan memiliki *ruhul jihad* dalam membangun bangsa. *Kedua*, kita juga harus melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan keagamaan tersebutdengan upaya mewujudkan wawasan kebangsaan yang kokoh bagi umat berlandaskan pendalaman kematangan spiritual yang teritegrasi dengan kecakapan intelektual dan kecakapan hidup (*lifeskill*).[340]

Demikian juga spirit Islam harus mampu menginisiasi dalam memecahkan masalah sosial-kemasyarakatan, dan sekaligus lebih kontributif bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dalam upaya membangun sikap kemandirian bangsa Indonesia, maka substansi berbagai kegiatan keislaman harus mampu mengajarkan secara seimbang antara dimensi tauhid (*akidah*) dan *syari'ah-'ubudiyah* yang berhubungan dengan ketuhanan, dengan dimensi *mu'amalah* yang berhubungan dengan sosial-kemanusiaan.

[340] Lukman Hakim Saifuddin, *Keynote Speech Menteri Agama RI pada Simposium Pendidikan IslamRevitalisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, 4 Mei 2017

Hanya dengan begitu, kita akan mampu mencetak generasi bangsa yang nasionalis dan religius, yakni bangsa yang mampu menempatkan urusan agama (*ad-diny lillah*) dan urusan kebangsaan (*al-wathon lil-jama'ah*) secara seimbang dan tanpa dipisahkan di antara keduanya.[341]

Dalam upaya membangun skill yang mumpuni, ada dua hal penting yang mendasari proses pengambilan kebijakan. *Pertama*, kita perlu memenuhi tuntutan masyarakat akan pentingnya layanan berbagai kegiatan keislaman yang bermutu, sehingga dari kegiatan yang bermutu itu akan melahirkan anak bangsa yang mandiri baik seara keagamaan, intelektual maupun ekonomi. *Kedua*, tantangan terhadap masuknya nilai-nilai asing dan arus informasi global yang tidak selalu positif, sehingga proses akulturasi budaya sebagai akibat dari penerapan teknologi informasi harus diantisipasi sehingga kita tidak menjadi bangsa yang komsumtif tetapi harus produktif, bukan diwarnai oleh budaya asing tetapi kita harus mampu mewarnai dan mempengaruhi dan menguasai budaya asing berbebekal budaya sendiri.[342]

Melalui bingkai beragam kegiatan keislaman, kemandirian bangsa yang berlandaskan jiwa keagamaan dan patriotisme akan terwujud sebagaimana sudah diwariskan oleh para pejuang Kemerdekaan bangsa Indonesia, misalnya resolusi jihad KH. Hasyim Asy'ari yang akan menjadi cambuk untuk menegakkan jiwa besar dan kemandirian bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme dan membakar semangat kebangsaan. Kewajiban atas dasar agama dalam menjaga NKRI menjadi dasar motivasi dan etos perjuangan dalam berkorban untuk memperjuangkan bangsa dan negara.Demikian juga pendekatan dakwah keislaman akan lebih humanis daripada pendekatan fisik dalam mengubah paradigma

---

[341] Lukman Hakim Saifuddin, *Keynote Speech Menteri Agama RI pada Simposium Pendidikan Islam Revitalisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, 4 Mei 2017

[342] Lukman Hakim Saifuddin, *Keynote Speech Menteri Agama RI pada Simposium Pendidikan Islam Revitalisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, 4 Mei 2017

berpikir yang sesat.Walaupun pendekatan pengamanan fisik juga perlu tetapi hanya dilakukan jika kondisinya sudah darurat untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.[343]

Peran dan fungsi agama sangat penting dalam membangun pembangunan nasional, khususnya melalui program bimbingan masyarakat Islam, yakni peningkatan kualitas program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat melalui program-program yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung, sehingga ide-ide inovatif dalam penguatan fungsi agama sangat penting untuk dikemukakan dan dirumuskan. Apalagi penguatan fungsi agama dalam pembangunan nasional merupakan amanat undang-undang, sehingga Pemerintah RI berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan di bidang agama untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan peribadatannya dengan baik dan juga dapat mendukung pembangunan nasional.[344]

Salah satu program Kementerian RI dalam upaya mewujudkan etos kerja bangsa Indonesia menuju kemandirian bangsa adalah program pelayanan dan kemitraan yang hingga saat ini telah menampakkan hasil yang menggembirakan, misalnya pengelolaan zakat dan wakaf yang hingga saat ini terus mendapatkan dukungan melalui berbagai kebijakan penguatan dari Kementerian Agama RI, seperti adanya regulasi dan bantuan operasional.[345]

> Mari kita ubah paradigma kita selama ini bahwa hasil-hasil kegiatan seperti ini hanya sekedar menjadi dokumentasi tahunan yang kurang memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas. Hasil-hasil Kegiatan kali ini, kita jadikan

---

[343] Lukman Hakim Saifuddin,*Sambutan Menteri Agama Ri Pada Pelatihan Bela Negara "Bela Negara Pendidikan Agama Islam Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia "*Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta,26 Mei 2017

[344]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat IslamTahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017.

[345]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RIpada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat IslamTahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017.

> sebagai peneguhan kembali komitmen untuk memantapkan fungsi agama dalam pembangunan nasional, sekaligus menjadi pedoman, koridor dan spirit kebijakan yang lebih berkualitas dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.[346]

Kemitraan Kementerian Agama RI dengan berbagai pihak merupakan keniscayaan dalam rangka penguatan fungsi agama. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan untuk mendukung kemandirian umat dalam menjalankan kewajiban dan tugas keagamaannya dan juga tugas-tugas sosial yang menjadi tanggung jawabnya untuk membangun kemandirian bangsa dalam segala seginya demi suksesnya pembangunan nasional. Seluruh pejabat kementerian Agama pusat ataupun daerah, tokoh agama, *stakholders* dan lainnya perlu membangun kemitraan yang erat dan konstruktif untuk melangkah bersama memperkuat fungsi agama dalam pembangunan nasional. Paradigma kerja Kementerian Agama RI tersebut diharapkan melakukan perubahan untuk melakukan perbaikan dan mampu membangun pribadi umat dan bangsa religius yang mandiri dalam segala seginya dengan etos kerja yang tinggi untuk memajukan dan memakmurkan kehidupan berbangsa dan bernegara.[347]

Program kerja Kementerian Agama RI tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membangun semangat beribadah dan berkerja dalam koridor nasionalisme. Etos kerja umat dan bangsa menjadi faktor kunci untuk membangun kemajuan dan kesuksesan program pembangunan nasional di Indonesia. Sebab, pembangunan nasional tidak akan berhasil sepenuhnya jika tidak ditopang oleh

---

[346]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat IslamTahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017.

[347]Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Rapat KoordinasiP enguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat IslamTahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017

spirit keagamaan dan etos kerja yang tinggi dari umat atau bangsa Indonesia itu sendiri.[348]

[348]Muhammad Ersya Faraby,"Etos Kerja Islam Masyarakat Etnis Madura (Islamic Work Ethic of Madura Ethnic Community)",*Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i,* Volume 3 No 1 (2016), hlm. 25-26.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Paradigma ijtihad Islam kebangsaan dan kebhinekaan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, kebangsaan sebagai wadah hidup kita bersama dan kebhinekaan sebagai arah berpikir dalam melakukan ijtihad Islam sehingga mampu melahirkan pemikiran-pemikiran Islam yang otentik dan aktual. Dengan menggunakan pendekatan pergeseran paradigma Thomas S Khun dan kerangka teori Trisakti Soekarno, maka hasil penelitian ini mengemukakan bahwa *Pertama*, Lukman menegaskan perlunya mengembalikan peran dan fungsi agama yang otentik, sehingga perlu ada pergeseran peran dan fungsi ormas keagamaan, yakni bagaimana agama berperan dan berfungsi untuk memberdayakan umat dan tanpa ada pembatas sebagaimana dalam sistem politik yang selalu ada pembatas dan penggolongan berdasarkan kepentingan, sedangkan agama termasuk ormas keagamaan bergerak dan bekerja di atas semua golongan dan kelompok untuk membangun kemaslahatan umat beragama secara keseluruhan. Dengan mengamalkan jati diri bangsa Indonesia yang moderat, maka kita menjadi bangsa yang besar, sejahterah dan maju.

Kedua, Lukman menegaskan perlunya membangun paradigma biokrasi dari elitis menjadi pradigma birokrasi yang merakyat alias melayani kepada rakyat sesuai dengan spirit pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Itulah paradigma birokrasi yang otentik, yakni selalu responsif dan cepat-tuntas dalam melayani dan mengayomi rakyat. Oleh sebab itu, lima budaya kerja yang diprogramkan oleh Lukman Haki Saifuddin pada dasarnya adalah upaya konkrit dalam membangun paradigma birokrasi pemerintahan yang melayani. Dalam bahasa Bung Karno, kita perlu berdaulat dalam politik, sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama selalu hadir dan dekat dengan masyarakat untuk memenuhi tuntutan

dan aspirasinya. Dengan sistem birokrasi yang melayani, maka kita akan berdaulat secara politik.

*Ketiga,*Lukman menegaskan perlunya bersama-sama untuk membina dan membimbing umat dalam menjaga kemakmuran, toleransi dan kerukunan hidup beragama. Kita juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas, toleransi, dan kerukunan bagi umat. Otentisitas kerukunan bangsa akan terwujud dengan baik dan tulus jika hal itu didasari oleh nilai-nilai agama yang berwawasan kebhinekaan. Oleh sebab itu, perlu ada pergeseran paradigma pembangunan kerukunan umat beragama dari sekedar formalitas menjadi subantatif sehingga suasana kerukunan umat beragama yang menjadi harapan dan tujuan seluruh elemen bangsa dapat terwujud dengan tulus. Dalam bahasa Bung Karno dikenal dengan berkepribadian dalam budaya yang berarti bahwa pemahaman keagamaan kita harus berwawasan kebhinekaan dalam wadah NKRI.

*Keempat,*Lukman menegaskan perlunya pendalaman dan sosialisasi konsensus hidup berbangsa agar menjadi landasan dalam membangun pemahaman Islam yang otentik, yakni pemahaman Islam yang tidak hanya lahir dari ruang kosong, tetapi pemahaman Islam yang lahir dari realitas empiris umat Islam di Indonesia sehingga selalu relevan dan aktual dengan kebutuhan empiris umat Islam di Indonesia. Gerakan ini merupakan upaya pergeseran paradigma dari paradigma Islam ekslusif yang selalu disuarakan kelompok fundamentalis/tradisional-konservatif menjadi paradigma Islam kebangsaan sebagai paradigma ijtihad Islam otentik yang memiliki spirit akomodatif terhadap setiap tatangan hidup umat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jika kita hendak menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam tata kehidupan berbangsa, maka wujudnya sudah berbentuk paradigma objektifikasi Islam yang cenderung akomodatif dan otentik -meminjam bahasa Kuntowijo-, bukan paradigma eksternalisasi Islam yang cenderung formalistik dan tidak otentik. Dari jiwa diri bangsa Indonesia yang sejati/otentik ini dapat dipupuk kemandirian perilaku dan etos kerja yang mandiri.

Kelima,Lukman berusaha melakukan penataan peradigma pengembangan pendidikan keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai keragaman etik, daerah, dan kekhasan lokal (multikultural). Pondok Pesantren juga dibuka di daerah-daerah 3T dan perbatasan dan pada saat yang sama dilakukan pertukaran guru dari Jawa ke luar Jawa. demikian juga pemerataan pendidikan tinggi keagamaan negeri (PTKN). Sebagai langkah untuk memajukan pendidikan keagamaan, Kementerian Agama meresmikan pesantren maritim untuk memberikan akses pendidikan keagamaan di daerah pesantren. Untuk membuka akses yang lebih luas dan kompetitif dengan dunia industri, Kementerian Agama melakukan kerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Demikian juga sebagai upaya mengakomodir keragaman potensi dan latarbelakang siswa/peserta didik, Kementerian Agama terus memperluas akses pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di beberapa daerah. Pendidikan yang bermutu itu akan menjadi modal dasar dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

Dari uraian tersebut, paradigma Islam kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin memiliki titik kelebihan dari konsepsi Trisakti Bung Karno, yakni dengan aksentuasi pada nilai-nilai agama, sehingga tidak hanya menarasikan budaya bangsa Indonesia secara global yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, tetapi lebih masuk lagi pada esensi budaya bangsa Indonesia yang religius yang hendak dijadikan pondasi dalam membangun bangsa dan negara, sehingga paradigma penerapan Islam bagi Lukman bukan berarti hendak mengganti ideologi Pancasila dengan agama Islam, tetapi merupakan upaya mengisi spirit kerja dalam pembangunan bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai agama (Islam), sehingga ada pergeseran dari konsep Trisakti-Sekuler Soekarno menjadi Konsep Trisakti-Religius Lukman.

B. Saran

1. Islam dan realitas kebangsaan merupakan hal yang erat sehingga pembahasan ini selalu aktual dan relevan dengan tantangan hidup umat dan bangsa Indonesia, sehingga kajian ini perlu dikembangkan dalam tataran yang lebih spesifik.
2. Islam dan realitas kebangsaan yang menjadi perhatian Lukman Hakim Saifuddin menjadi salah satu parameter dalam membangun budaya beragama yang santun, toleran, pluralis dan rukun.

DAFTAR PUSTAKA

‘Audah, Jasir, *Maqashid al-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadiin*, Beirut: Maktabah al-Tauzi’ fi al-‘alami al-‘Arabi, 2011.

2017: Tangkal Potensi Radikalisme dan Intoleransi dengan Dialog, http://ksp.go.id/2017-tangkal-potensi-radikalisme-dan-intoleransi-dengan-dialog/, diakses 14 September 2017.

Abdullah, M Amin, *Sumbangan Nurcholish Madjid Atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, http://nurcholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64 diakses 19 September 2016

Abdullah, M. Amin, “Kebebasan Beragama Atau Dialog Antaragama 50 Tahun Hak Asasi Manusia’, dalam *Jurnal Filsafat dan Teologi*, no. 11, Tahun 1998.

Abdullah,M. Amin, “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam M. Amin Abdullah dkk (eds.), *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Abdullah,Taufik, “Menteri Agama Republik Indonesia: Suatu Pengantar Profil Biografis”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri*

Agama RI, Jakarta: INIS, PPIM, Balitbang Depag RI, 1998.

Ali, A. Mukti, "Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia", dalam Muhamad Wahyuni Nafis dkk, (eds.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Syadzali*, Jakarta: Paramadina,1995.

Ali, A. Mukti, "Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia", dalam Zaini Muhtarom dkk.,(redaksi), *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan),* Jakarta: INSIST, 1990.

Ali,A. Mukti, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufik Abdullah dan M Rusli Karim (eds.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Ali,A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1998.

Ali,A. Mukti., *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini,* Jakarta, Rajawali Press, 1987.

al-Najjâr, 'Abd al-Majîd, *Maqâshid al-Syarî'ah bi Ab'âd Jadîdah*, Beirut : Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2008.

al-Qurṭubī, Abū Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid

8, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

al-Syâthibî, Abû Ishâq,*Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* Jilid I, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997.

Amalkan Ajaran Alquran dalam Kehidupan Berbangsa, http://ksp.go.id/amalkan-ajaran-alquran-dalam-kehidupan-berbangsa/, diakses 9 September 2017.

Anderson,James Norman Dalrymple, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: CV. Amrpress, 1991.

Andrian, Desmon, dkk, *Spirit Moderasi Beragama, Ucapan dan Tindakan Lukman Hakim Saifudddin*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, 2018.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, "The Compatibility Dialectic: Mediating the Legitimate Coexistence of Islamic Law and State Law", The Modern Law Review, Volume 73 January 2010 No 1.

Arnold,T.W. ,*The Preaching of Islam A History of the Propagation of the Muslim Faith,* Second Edition Revised And Enlarged, London: Constable & Company Ltd, 1913.

Asy'ari, Hasyim,"Relasi Negara dan Agama di Indonesia", *Rechts Vinding Online: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Asy'arie, KH Muhammad Hasyim, "Irsyâd al-Mu'mîn ila sairah Sayyid al-Mursalîn wa Man Tabi'ahu min al-Shahabah wa al-

Tabi'în", *Irsyâd al-Sârî fî Jam'i Mushannifât al-Syaikh Hâsyim Asy'arî*, Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th.

asy-Syawwâf, Muhâmî Munîr Muhammad Thâhir, *Tahâfut al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah*, Cyprus: Al-Syawwâf li al-Nasyr wa al-Dirâsât, 1993.

Aulianto, Wibi, *Kebangsaan dalam Perspektif Alquran: Islam dan Kebangsaan*, http://www.lppmnuansa.org/2017/02/kebangsaan-dalam-perspektif-alquran.html, diakses 22 Februari 2018.

Azra,Azyumardi, "Kerukunan dan dialog Islam-Kristen di Indonesia; Kajian Historis-Sosiologis", dalam Mursyid Ali, (ed.), *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-agama*, Jakarta: Balitbang Agama, 1999-2000.

Barton,Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina, 1999.

Basyir, Khairul Huda, dkk, *Lukman Hakim Saifuddin, Memimpin Kementerian Agama Periode 2014-Desember 2015*, Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kemenag RI, 2016.

Bleicher,Josef,*Contemporary Hermeneutics; Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Routledge dan Kegan Paul, t.th.

Dahlan, Moh, "Modernisasi Islam di Indonesia: Studi Atas Akar Pemikiran H A Mukti Ali", *Jurnal Hermeneia* PPs UIN Sunan Kalijaga, Vol 05 Tahun 2006.

Dahlan,Moh, "Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2012.

Dahlan, Moh, dan Sirajuddin M, *Paham Islam Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin*, artikel belum diterbitkan, 2017.

Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*, Yogyakarta: Kaukaba Press, 2013.

Dakir & Umiarso, "Pesantren Dan Perubahan Sosial: Optimalisasi Modal Sosial Bagi Kemajuan Masyarakat", *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Volume XIV, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Didampingi Menag, Presiden Jokowi Meresmikan Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Seluruh Indonesia, https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220309/didampingi-menag--presiden-jokowi-meresmikan-pertemuan-pimpinan-gereja-dan-rektor-ketua-perguruan-tinggi-keagamaan-kristen-

seluruh-indonesia , diakses 21 November 2018

Faraby,Muhammad Ersya,“ Etos Kerja Islam Masyarakat Etnis Madura (Islamic Work Ethic of Madura Ethnic Community)”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume 3 No 1 (2016).

Hanafy,Muh Sain, “Pendidikan Multikultural dan Dinamika Ruang Kebangsaan”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015.

Haryatmoko, “Pluralisme De Jure, Kritik Ideology”, dalam M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Hasil Wawacara dengan M Abzar, Pengurus DDI Kalimatan Timur, November 2018.

Hasil Wawancara Darmadi, Penasehat Gerakan Pemuda Anshor Kota Lhoksumawe, Desember 2018.

Hasil Wawancara dengan Abdul Muis, PNS Kementerian Agama RI, Julis 2018.

Hasil Wawancara dengan Ahmad Mutahar, Ketua Yayasan Baiturrahman Jember Jawa Timur, November 2018

Hasil wawancara dengan Dr Ruchman Basori, Kasi Diktis Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, November 2018

Hasil Wawancara dengan Jailani, warga masyarakat Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tanggal 25 November 2018.

Hasil Wawancara dengan M Adib Abdusshomad, PNS Kementerian Agama RI, Desember 2018.

Hasil Wawancara dengan M Nasron HK, Da'i Propinsi Bengkulu, yang juga Direktur Ma'had al-Jami'ah IAIN Bengkulu, Juli 2018.

Hasil Wawancara dengan Prof Dr H Rohimin, Ketua MUI Propinsi Bengkulu, Agustus 2018.

Hasil Wawancara dengan Syamsuddin, Pengurus MES Bengkulu, Juli 2018.

Hasil wawancara Lomba Sultan, Pengurus ICMI Sulawesi Selatan, Desember 2018.

http://aannaim.law.emory.edu/

http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/riwayat%20perjuangan%20Prof.%20KH.%20Saifuddin%20Zuhri.pdf, diakses 12 Agustus 2016

http://www.nu.or.id/post/read/64589/tiga-jasa-penting-gus-dur-menurut-menag-lukman-saifuddin 25 oktober 2018

https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220194/hadiri-asadha-mahapuja-2562-be--menag--kitab-suci-adalah-sumber-gagasan-dan-inspirasi, diakses 26 Oktober 2018.

https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220203/menag-dampingi-presiden-joko-widodo-pada-tasyakur-milad-ke-43-mui, diakses 21 November 2018

https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220255/buka-kongres-i-pakin--menag-imbau-pemuda-khonghucu-terus-berkontribusi-untuk-bangsa, diakses 26 Oktober 2018.

https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220262/-pertemuan-tokoh-agama-dan-tokoh-masyarakat-katolik-tingkat-nasional, diakses 26 oktober 2018

https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220307/menag-tutup-festival-tajug-cirebon-, diakses 26 Oktober 2018.

https://www.intelijen.co.id/lukman-hakim-saifuddin/ diakses 9- 8-2016

Iskandar, Muhaimin, *Sejarah Islam dan Kebangsaan di Indonesia dalam Bingkai Kebhinekaan*,http://dpp.pkb.or.id/content/sejarah-islam-dan-kebangsaan-di-indonesia-dalam-bingkai-kebhinekaan, diakses 22 Februari 2018

Jangan Gunakan Agama Untuk Kepentingan Pilkada,http://poskotanews.com/2016/10/28/jangan-gunakan-agama-untuk-kepentingan-pilkada/, diakses 21 November 2018.

Jati, Wasisto Raharjo, *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*, Jurnal Walisongo, Volume 21, Nomor 2, November 2013.

Jiyanto dan Amirul Eko Efendi, *Implementasi Pendidikan Multikultural di Madrasah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016.

JK: Indonesia Tertoleran Se-Dunia, http://jusufkalla.info/archives/2013/11/06/jk-indonesia-tertoleran-se-dunia/, diakses 25 Maret 2017.

Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2015.

Khoiron (ed), *Menag Tutup Konsultasi Pimpinan Induk Organisasi Gereja*,https://kemenag.go.id/berita/read/509193/menag-tutup-konsultasi-pimpinan-induk-organisasi-gereja 26 Oktober 2018.

Khoiron (ed.), *Gelar Sarasehan, Kemenag Bahas Reaktualisasi Relasi Agama dan Budaya*, https://kemenag.go.id/berita/read/509248/gelar-sarasehan--kemenag-bahas-reaktualisasi-relasi-agama-dan-budaya, diakses 21 Nov 2018

Khoiron (ed.), *Habib Zen Umar Sumaith Undang Menag di Peringatan 90 Tahun Rabithah Alawiyah*, https://kemenag.go.id/berita/read/509383/habib-zen-umar-sumaith-undang-menag-di-peringatan-90-tahun-rabithah-alawiyah--, diakses 21 November 2018.

Kita Bangun Islam Yang Tebarkan Perdamaian, http://ksp.go.id/kita-bangun-islam-yang-tebarkan-perdamaian/, diakses 14 September 2017

Koran Sindo, 4 September 2017.

Kuhn,Thomas S.,*The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

Laporan Utama, "NU Mengembangkan Tugas Keumatan dan Kenegaraan", dalam *Risalah: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 69/X, Februari 2017.

Leaman, Oliver, *Pengantar Filsafat Islam: Kajian Tematis*, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi, Bandung: Mizan 2002.

Lubis, Ridwan, "Upaya memperoleh Bentuk-bentuk Kerukunan Hidup Beragama Untuk Meningkatkan Ketahanan Msyarakat", dalam Mursyid Ali (ed.), *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-agama*, Jakarta: Balitbang Agama, 1999-2000.

Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Agama Peduli Kaum Minoritas, Artikel ini pernah dimuat di Majalah Tebuireng edisi 35/November-Desember 2014, dimuat kembali untuk kepentingan pendidikan. http://tebuireng.org/lukman-hakim-saifuddin-menteri-agama-peduli-kaum-minoritas/, diakses 9 Agustus 2016

Lukman Hakim Saifuddin: UIN Walisongo Harus Mewarnai Islam Indonesia sebagai Islam Moderat, *http://justisia.com/2015/04/lukman-hakim-saifuddin-uin-walisongo-harus-mewarnai-islam-indonesia-sebagai-islam-moderat/*, *diakses 9Agustus 2016*

Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren,* Jakarta: Dian Rakyat.

Magnis-Suseno, Franz, *Agama, Kebangsaan dan Demokrasi Nurcholish Madjid dan Kemanusiaan,*http://nurcholishmadjid.net/index.php?page=news&action=view&id=68, diakses 19 September 2016

Mahfudh, KH M A Sahal, *Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi*, http://www.nu.or.id/post/read/50426/posisi-umat-islam-indonesia-dalam-era-demokratisasi, diakses 20 Juni 2016

Mahfudh, KH MA Sahal, *Aktualisasi Nilai-Nilai-Aswaja* ,http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja, diakses 20 Juni 2016

Mahfudh, KH MA Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: *LKi*S, 2004.

Mahfudh, KH MA Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: *LKi*S, 2004.

Mas'adi,Gufron A.,*Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Mempertanyakan Sejarah Masuknya Islam di Indonesia(1),http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/07/21/m7ihrr-mempertanyakan-sejarah-masuknya-islam-di-indonesia-1.

Menag Buka Musyawarah Besar ke-8 Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220327/menag-buka-musyawarah-besar-ke-8-persekutuan-gereja-gereja-pantekosta-indonesia--pgpi-, diakses 21 November 2018

Menag Hadiri Rakornas FKUB dan Konferensi Nasional ke IV, https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220252/menag-hadiri-rakornas-fkub-dan-konferensi-nasional-ke-iv, diakses 21 November 2018

Menag Lantik 12 Pejabat Eselon II, https://kemenag.go.id/berita/read/509331/menag-lantik-12-pejabat-eselon-ii, diakses 21 November 2018

Menag Lukman Hadiri Persparawi Tahun 2018 di Pontianak, https://kemenag.go.id/berita/photo_read/220222/menag-lukman-hadiri-persparawi-tahun-2018-di-pontianak, diakses 21 November 2018.

Menag: Gerakan radikalisme Islam ancam keutuhan NKRI http://indonesia.ucanews.com/2014/08/29/menag-gerakan-radikalisme-islam-ancam-keutuhan-nkri/diakses 9 Agustus 2016.

Menag: Gerakan radikalisme Islam ancam keutuhan NKRI, *http://indonesia.ucanews.com/2014/08/29/menag-gerakan-radikalisme-islam-ancam-keutuhan-nkri/ 9 8 16*

Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila, http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html, diakses 15 september 2017.

Muhtarom, Zaini, "Bagaimana Mencermati Suatu Dialog", dalam Adurrahman dkk, "Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H. A. Mukti Ali, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.

Mustaqim, Abdul, "Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an", *Epistemé*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2014.

Nawa.Cita,https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita diakses 30 November 2018

Nugroho, Ari, (ed), *Sarasehan Kemenag bersama Tokoh Agama-Budayawan Hasilkan Enam Permufakatan*, http://jogja.tribunnews.com/2018/11/03/sarasehan-kemenag-bersama-tokoh-agama-budayawan-hasilkan-enam-permufakatan?page=3, diakses 21 November 2018.

Nurdin, Ahmad Ali, "Revisiting discourse on Islam and state relation in Indonesia: the view of Soekarno, Natsir and NurcholishMadjid", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Volume 6, Nomor 1 (2016).

Panggabean, Samsu Rizal,dkk, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi,* Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Peran Penting Ulama Memelihara Semangat Kebersamaan dan Kedamaian, http://ksp.go.id/peran-penting-ulama-memelihara-semangat-kebersamaan-dan-kedamaian/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658.

Pertemuan Dengan Tokoh Agama, Menag : Jangan Gunakan Agama di Pilkada, http://poskotanews.com/2016/10/14/pertemuan-dengan-tokoh-agama-menag-jangan-gunakan-agama-di-pilkada/, diakses 21 November 2018

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2012.

Pokok Pikiran Kebangsaan KH Sahal Mahfudh, http://www.nu.or.id/post/read/37877/pokok-pikiran-kebangsaan-kh-sahal-mahfudh, diakses 20 Juni 2016

Poljarevic, Emin,"Exploring the Islamic State", Review Buku dari karya Noah Feldman, *The Fall and Rise of the Islamic state*, (Princeton, Princeton University Press, 2008), di Jurnal European Political Science: 7 2008, European Consortium for Political Research. 1680-4333/08 www.palgrave-journals.com/eps/, diakses 2 Desember 2018.

Priyono, B Herry, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta: Gramedia, 2018.

Qomar, Mujamil, "Ragam Identitas Islam di Indonesia dari Perspektif Kawasan",*Epistemé*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.

Rahardjo, M. Dawam,*Gerakan Islam Kultural Paramadina: Fundamentalisme Agama dan Masa Depan Keislaman dan Keindonesiaan,* http://nurcholishmadjid.net/index.php?page=news&action=view&id=62, diakses 19 September 2016.

Richards,Cameron, "Towards a Restoration of the Humanities in the Future University: Asia's Opportunity", *Kemanusiaan,* Volume 18, Nomor 2, (2011).

Ristekdikti, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* , Cet I, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016.

Rois, Achmad, "Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah", *Epistemé,* Vol. 8, No. 2, Desember 2013.

Said,As'ad Ali,*Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Jakarta: LP3ES, 2014.

Saifuddin, Lukman Hakim, "Islam Sebagai Faktor Determinan Indonesia" *Orasi Kebangsaan* oleh Menteri Agama RI pada Acara Penutupan Muktamar IX KAMMI, Banjarbaru, 3 Oktober 2015

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI* pada Acara Pengkajian Ramadlan 1438h PP Muhammadiyah, Ciputat, Senin, 5 Juni 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, "Relevansi Pemikiran KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Konteks Indonesia Sekarang"**,** *Disampaikan pada acara Seminar Pemikiran KH.Muhammad Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Gedung MPR, Jakarta, 6 Mei 2017*

Saifuddin, Lukman Hakim, "Sambutan Menteri Agama RI Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia 2017", yang Diselenggarakan Oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

Saifuddin,Lukman Hakim, "SambutanMenteri Agama RI pada Pelatihan Bela Negara "Bela Negara Pendidikan Agama Islam dalam Menjaga Negara KesatuanRepublik Indonesia" Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 26 Mei 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, *"Sambutan Menteri Agama RI Pada Pelatihan Bela Negara "Bela Negara Pendidikan Agama Islam dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia"* Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 26 Mei 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, "Sambutan Menteri Agama RI" pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan,* Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

Saifuddin, Lukman Hakim, "*Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam Pembinaan Toleransi dan Penghormatan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyak",* Sambutan Menteri Agama RI pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2017 yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI, Jakarta, 16 Maret 2017

Saifuddin, Lukman Hakim, *Amanat Menteri Agama RI Sebagai Pembina Upacara Pada Acara Penutupan Perkemahan Jambore Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah*, Karanganyar, 26 Februari 2016.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Keynote Speech Menteri Agama RI pada Simposium Pendidikan Islam Revitalisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, 4 Mei 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI*, https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/uploads/2016/09/5_nilai_budaya_kemenag_compressed.pdf, diakses 30 November 2018.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama Ri Pada Pelatihan Bela Negara "Bela Negara Pendidikan Agama Islam Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia"* Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 26 Mei 2017

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI dalam Acara Wisuda Sarjana Akademi Angkatan Udara,* Tahun 2017 Yogyakarta, Senin, 10 Juli 2017

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara "Halaqah Ulama: Refleksi 33 Tahun Khittah NU"* PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo, 12 Januari 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara Haul Ke-46 KH. Abdul Wahab Chasbullah*, Jombang, Jum'at, 4 Agustus 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama Dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan*

Masyarakat Islam Tahun 2017, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017

Saifuddin,Lukman Hakim,*Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017*, Jakarta, Jum'at, 11 Agustus 2017

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI pada Acara Tasyakuran dan Pagelaran 71 Tahun Kementerian Agama RI Jakarta*, 20 Januari 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI pada Deklarasi Gerakan Cinta Kerukunan Umat Beragama*, di Sumatera Barat, Solok, 2 April 2017

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI pada Pelatihan Bela Negara "Bela Negara Pendidikan Agama Islam dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia"* Batalyon Paskhas 461 TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 26 Mei 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan *International Symposium On Religious Literature & Heritage* Ke 2, Bogor, Selasa, 18 Juli 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, Sambutan Menteri Agama RI pada Pengarahan Program

Penelitian Tahun 2017 Balai Litbang Agama Semarang "Isu-Isu Aktual Penelitian Bidang Keagamaan" Semarang, 31 Januari 2017.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Serang, 3 Mei 2017.

Saifuddin,Lukman Hakim,Sambutan Menteri Agama RI Pada Studium Generale "*Temu Kebangsaan Orang Muda: Orang Muda dan Indonesia 2035*" Bogor, 9 April 2016.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama KE-71*, Jakarta, 3 Januari 2017.

Sapendi, "Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Pendidikan Tanpa Kekerasan, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No 1 (2015).

Schumann, Olaf H, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004.

Shihab,Alwi, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan,1999.

Sholikhudin,M. Anang, “Praktik Pluralisme di Pondok Pesantren Ngalah”, *Dirāsāt* Volume 2 Nomor 2.

Sikapi Natal, Menag: Toleransi Bukan Campur Baur Simbol Agama, http://www.antiliberalnews.com/2014/12/10/sikapi-natal-menag-toleransi-bukan-campur-baur-simbol-agama/, diakses 9-8-2016.

Soekarno, “Negara Islam dan Cita-cita Islam”, Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953, dalam dalam R Soemarno, *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.

Soekarno, “Agama Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan”, Amanat pada Kongres Muhammadiyah Bandung, 24 Juli 1965, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.

Soekarno, “Kebangkitan Umat Islam Sedunia, Lonceng Kematian bagi Seluruh Nekolim, Amanat pada Rapat Umum Penutupan Konferensi Islam Asia-Afrika (KIAA) di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, 14 Maret 1965”, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.

Soekarno, “Negara Nasional dan Cita-cita Islam, Kuliah Umum di Universitas

Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953", dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.

Soekarno, "Negara, Amanat Tuhan kepada Kita, Amanat Ketika Menerima Gelar Pengayom Agung Muhammadiyah Istana Bogor, 25 September 1965", dalam R Soemarno, *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.

Soekarno, "Negara, Amanat Tuhan kepada Kita, Amanat Ketika Menerima Gelar Pengayom Agung Muhammadiyah Istana Bogor, 25 September 1965", dalam R Soemarno, *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.

Soekarno, "Pertahanan Nasional dapat Berhasil Maksimal Jika Berdasarkan Geopolitik, Pidato Presiden Soekarno pada Peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965", *Bung Karno Setialah kepada Sumbermu*, Jakarta: Penerbit Naraprana, 2015.

Soetapa, Djaka, "Ibn Hazm atau As-Syahrastani", dalam Zaini Muhtarom dkk.,(redaksi), *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan),* Jakarta: INIS, 1990.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Sulistiyo,Eko,*Jokoway: Cara Memahami Kepemimpinan Jokowi*, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017.

Sulistiyo,Eko, *Jokowi & Trisakti: Amanat Konstitusi untuk Menyejahterakan Rakyat*, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017.

Sulistiyo, Eko, *Soekarno dan Masjid Istiqlal*, http://ksp.go.id/soekarno-dan-masjid-istiqlal/

Sulistyo, Eko, *Negara Hadir Melawan 'Hate Speech'*, http://ksp.go.id/negara-hadir-melawan-hate-speech/, diakses 12 September 2017

Suppiah, Haridas, Suresh Kumar P. Govind, dan Yan Piaw Chua, "Transforming Leadership Performance - Breaking Comfort-Zone Barriers", *Educational Leader (Pemimpin Pendidikan)*, Volume 6, 2018.

Taufik, Abdullah, "Refleksi atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi", *Jurnal Universum*, Volume 9 Nomor 1 Januari 2015.

Tjarsono, Idjang, "Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi

Heterogenitas" *Jurnal Transnasional*, Volume 4, Nomor 2, Februari 2013.

Umar, Nasarudin,"Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional", *Walisongo*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014.

Wahid,Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Wahid,Abdurrahman,*Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, Tri Agus Siswowiharjo dkk, (peny), Bandung: Nuansa, 2011.

Wahid,KH Abdurrahman,*Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, Tri Agus Siswowiharjodkk, (peny), Bandung: Nuansa, 2011.

Wapres: Quran dan Hadist Mendorong Terciptanya Tatanan Kehidupan Moderat dan Demokratis, http://jusufkalla.info/archives/2015/03/26/wapres-quran-dan-hadist-mendorong-terciptanya-tatanan-kehidupan-moderat-dan-demokratis/diakses 26 Maret 2017

Wawancara dengan Dr Mukhtar Hadir, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, tanggal 25 November 2018.

*Wawasan Kebangsaan Harus Melekat dalam Kurikulum Ma'had Aly***,** http://www.pendidikanislam.id/berita/1

842/wawasan-kebangsaan-harus-melekat-dalam-kurikulum-mahad-aly.html, diakses 9- 8- 2016.

Wibisono,M. Yusuf, "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam", *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Volume 1, Nomor 1, September 2016.

Widodo, Joko, *Pengantar Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Mengenai Pendidikan Tinggi Islam Moderat di Indonesia*,http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9395&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Yafie, KH Ali, "Konsep-konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Yusuf, Mohamad, dan Carl Sterkens, "Analysing The State's Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Volume 53, Nomor 1, 2015.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saifullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zawawi, Ali, Zubairi Hasan, dan Sahlul Fuad (Tim Penyusun), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Semua Agama*, Jakarta: Kemenag RI, 2014.

Ziemek, Manfred, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial,* Jakarta: P3M, 1986.

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Selamat dan Sukses

Atas Penganugerahan

GELAR DOKTOR KEHORMATAN

DOCTOR HONORIS CAUSA (Dr. H.C.)
Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

Dr.(H.C.) Lukman Hakim Saifuddin

Bidang Pengkajian Islam
Peminat Moderasi Beragama

LpmqkemenagRI LpmqkemenagRI Lajnah Kemenag Lpmq_kemenag_ri

IKHLAS BERAMAL